

PERMUKIMAN TIONGHOA DI SURAKARTA PADA TAHUN 1900-1940

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sastra



Oleh:

Sri Sukirni
NIM 13407144031

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

**PERMUKIMAN TIONGHOA DI SURAKARTA
PADA TAHUN 1900-1940**



Disusun oleh:

Sri Sukirni
NIM. 13407144031

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dilaksanakan Ujian Akhir Tugas Akhir Skripsi bagi yang
bersangkutan.

Yogyakarta, 19 September 2017.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Agus", written over a horizontal line.

H.Y. Agus Murdiyastomo, M. Hum
NIP. 19580121 198601 1 001

Disetujui,
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mudji", written over a horizontal line.

Mudji Hartono, M. Hum
NIP. 19550115 198403 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

PERMUKIMAN TIONGHOA DI SURAKARTA PADA TAHUN 1900-1940

Disusun oleh:

Sri Sukirni
NIM. 13407144031

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Program

Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Yogyakarta

Pada tanggal 14 Agustus 2017

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan

Tanda Tangan

Tanggal

Mudji Hartono, M. Hum
Ketua Penguji/Pembimbing

.....

12-09-2017

Dina Dwikurniarini, M. Hum
Sekretaris Penguji

.....


14-09-2017

Ririn Darini, M. Hum
Penguji Utama

.....

18-09-2017

Yogyakarta, 19 September 2017
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

PERNYATAAN

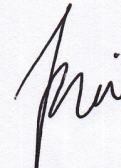
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Sukirni
NIM : 13407144031
Program Studi : Ilmu Sejarah
Jurusan : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Permukiman Tionghoa di Surakarta pada Tahun 1900-1940

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis orang lain atau pernah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang berlaku.

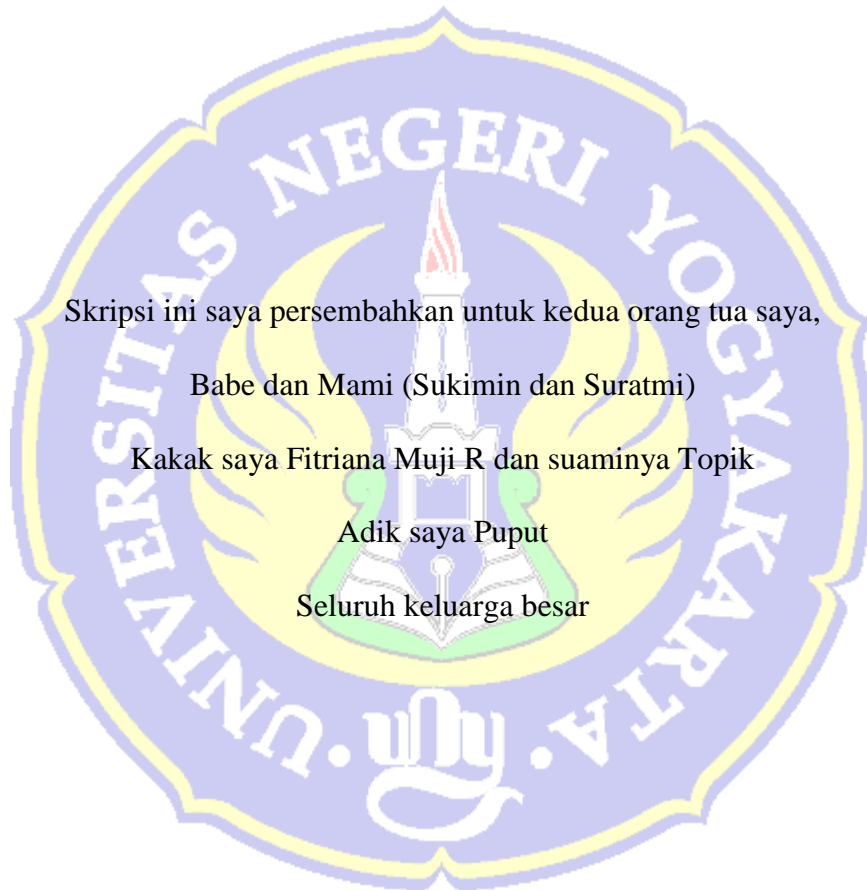
Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 19 September 2017



Sri Sukirni
NIM. 13407144031

LEMBAR PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya,

Babe dan Mami (Sukimin dan Suratmi)

Kakak saya Fitriana Muji R dan suaminya Topik

Adik saya Puput

Seluruh keluarga besar

MOTTO

*“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu
ada jalan bagi mereka yang sering berusaha”.*

*“Seorang yang menemani anda dalam kesusahan jauh lebih
berharga daripada beribu orang yang menemani anda dalam
kesenangan”.*

(Penulis)

ABSTRAK

PERMUKIMAN TIONGHOA DI SURAKARTA PADA TAHUN 1900-1940

Oleh: Sri Sukirni
13407144031

Orang Tionghoa datang ke Indonesia melalui beberapa tahap migrasi, pertama kali diawali oleh Fa Hien (seorang pendeta Budha yang berlayar menuju Sri Lanka dan terdampar di Pulau Jawa). Migrasi terbesar adalah pada masa penjajahan Belanda, etnis Tionghoa banyak didatangkan ke Indonesia sebagai buruh perkebunan. Imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu Hokkian, Hakka, Theo Chiu, dan Kanton. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui latar belakang keberadaan orang-orang Tionghoa di Surakarta, mengetahui perkembangan permukiman orang-orang Tionghoa di Surakarta serta mengetahui aktivitas orang-orang Tionghoa yang berpengaruh pada lingkungan sosial ekonominya.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis. Metode yang digunakan terdiri dari beberapa langkah. Pertama, *heuristik* yang merupakan suatu kegiatan mencari sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan data yang relevan. Kedua, *kritik* yaitu kegiatan untuk mengkaji otentitas dan kredibilitas sumber-sumber sejarah. Ketiga, *interpretasi* merupakan proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah serta mencari hal-hal yang saling berhubungan antara fakta yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sebuah rangkaian fakta yang bermakna dan logis. Keempat, *historiografi* merupakan proses penyampaian hasil interpretasi secara kronologis dan sistematis dalam bentuk karya ilmiah.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan orang-orang Tionghoa di Surakarta berawal dari konflik internal keraton, orang-orang Tionghoa melakukan pemberontakan kepada Paku Buwono II dan VOC yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi. Pemberontakan itu menyebabkan peristiwa *geger pecinan* 1742. Setelah *geger pecinan* berakhir, orang-orang Tionghoa diijinkan tinggal di sebelah utara Sungai Pepe sekitar Pasar Gede ke timur di Ketandan hingga Limalasan, ke sebelah utara sampai Balong, ke utara lagi sampai Warungpelem. Pemerintah kolonial lebih menertibkan orang-orang Tionghoa terutama dalam hal permukiman dan juga menunjuk para pejabat Tionghoa dari kalangan mereka sendiri yang diberi pangkat *Major*, *Kapitein*, *Luitenant*, dan *Wijk Meester*. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* untuk mengawasi aktivitas sosial ekonomi orang-orang Tionghoa. Setelah *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* dihapuskan aktivitas sosial ekonomi orang Tionghoa di Surakarta semakin kompleks serta interaksi dengan orang Jawa juga semakin erat. Namun, hubungan itu mengalami ketegangan yang diawali oleh industri batik yang menyebabkan persaingan antara *Kong Sing* Tionghoa dengan *Rekso Roemekso* Jawa.

Kata kunci: Permukiman, Surakarta, Tionghoa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu tujuan dari penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra. Keberhasilan yang dicapai dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungannya berupa materi, moril, spiritual, bimbingan serta arahan yang membangun. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dan segenap jajarannya yang telah memperlancar studi penulis hingga dapat selesai.
2. H.Y. Agus Murdiyastomo, M. Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Mudji Hartono, M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu tulus dan sabar memberikan bimbingan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ririn Darini, M. Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen narasumber yang telah sabar memberikan dukungan, arahan, semangat serta selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

5. Dina Dwikurniarini, M. Hum., selaku sekretaris yang telah memberikan kritik dan saran selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
7. Staf admin Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta yang telah membantu dalam mengurus surat dan berkas-berkas penelitian.
8. Segenap staf Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Laboratorium Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Grhatama Pustaka, Perpustakaan Sonobudoyo, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Surakarta, Perpustakaan Kota Surakarta, dan Perpustakaan Rekso Pustoko.
9. Binti Nurlailiya salah satu sahabatku sejak di bangku sekolah SMA yang selalu sabar menemani, membantu, memberikan saran, doa dan dukungan sejak proses awal penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Fitri, Ani, Umah, Alfi, semua rekan Ilmu Sejarah B 2013 dan teman-teman seangkatan yang telah memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

11. Teman-teman “Kos Prima” (Mbak Nur, Mbak Ana, Mbak Soleh, Mbak Ucek, Mbak Tyas, Yurfa, Nisa) yang telah memberikan dukungan dan semangat terhadap penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, maka dari itu saran, kritik dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi segenap kalangan pada umumnya, baik sebagai rujukan maupun referensi dan memberikan sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan. Amin Ya Rabbal ‘alamin.

Yogyakarta, 01 Agustus 2017

Penulis

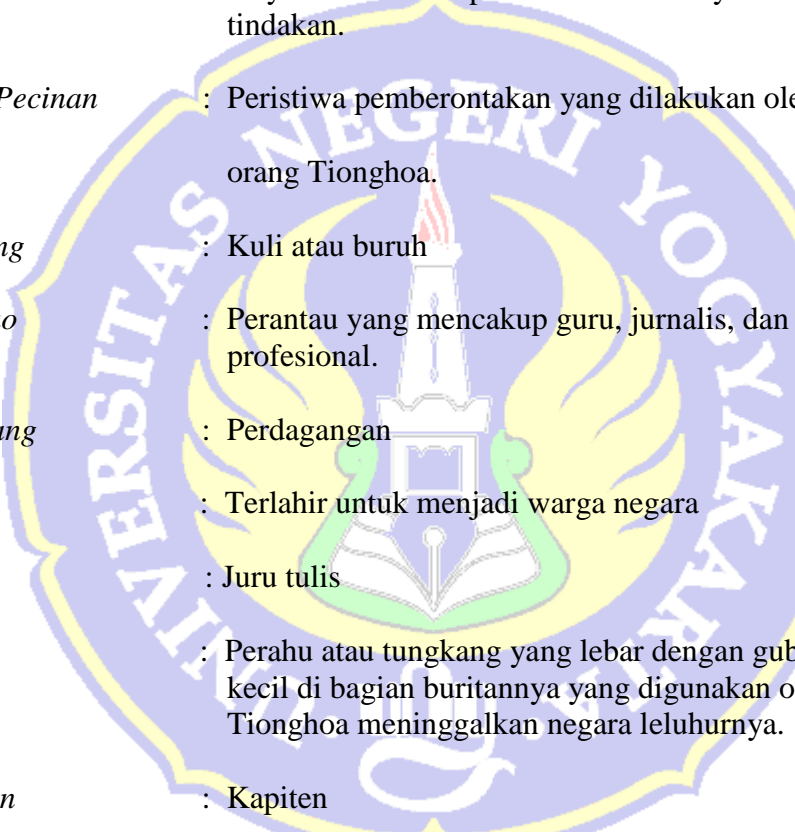
Sri Sukirni

DAFTAR ISI

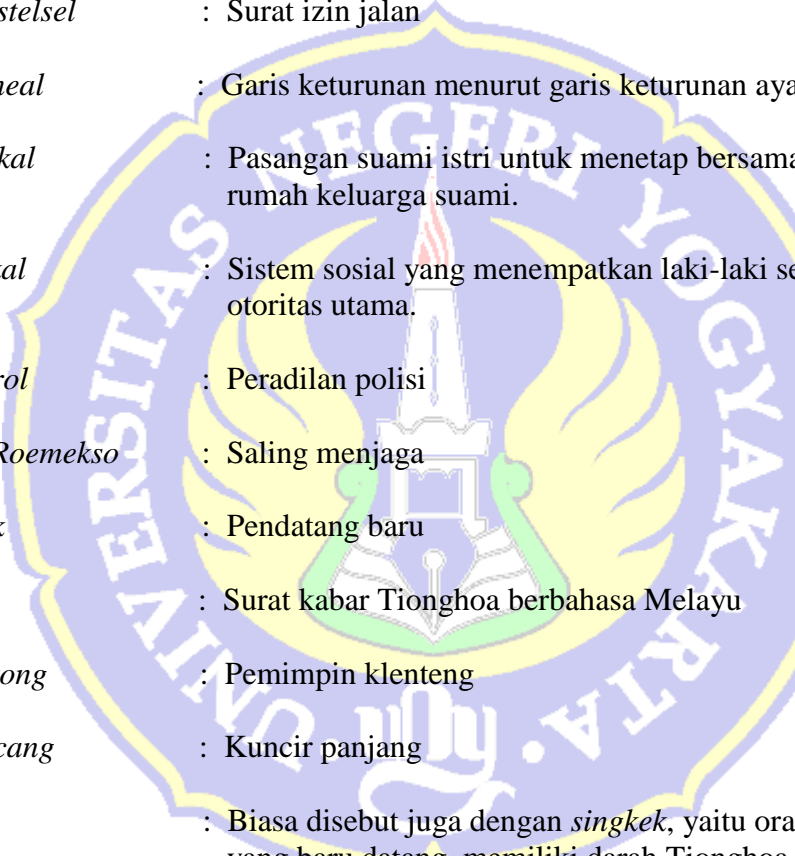
| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR ISTILAH | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN | xv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kajian Pustaka | 9 |
| F. Historiografi Relevan | 14 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| H. Pendekatan Penelitian | 20 |
| I. Sistematika Pembahasan | 22 |
| BAB II ETNIS TIONGHOA DI SURAKARTA | 25 |
| A. Orang-Orang Tionghoa di Surakarta | 25 |

| | |
|---|------------|
| 1. Proses Kedatangan | 25 |
| 2. Keragaman Asal Usul | 34 |
| B. Golongan <i>Totok</i> dan Peranakan | 38 |
| BAB III PERMUKIMAN TIONGHOA DI SURAKARTA PADA | |
| MASA KOLONIAL..... | 47 |
| A. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda..... | 47 |
| 1. <i>Wijkenstelsel</i> | 51 |
| 2. <i>Passenstelsel</i> | 55 |
| B. Pola dan Penyebaran Permukiman Tionghoa..... | 60 |
| BAB IV AKTIVITAS ETNIS TIONGHOA DI SURAKARTA | 70 |
| A. Bidang Sosial | 70 |
| B. Bidang Ekonomi | 85 |
| BAB V KESIMPULAN | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |
| LAMPIRAN..... | 106 |

DAFTAR ISTILAH



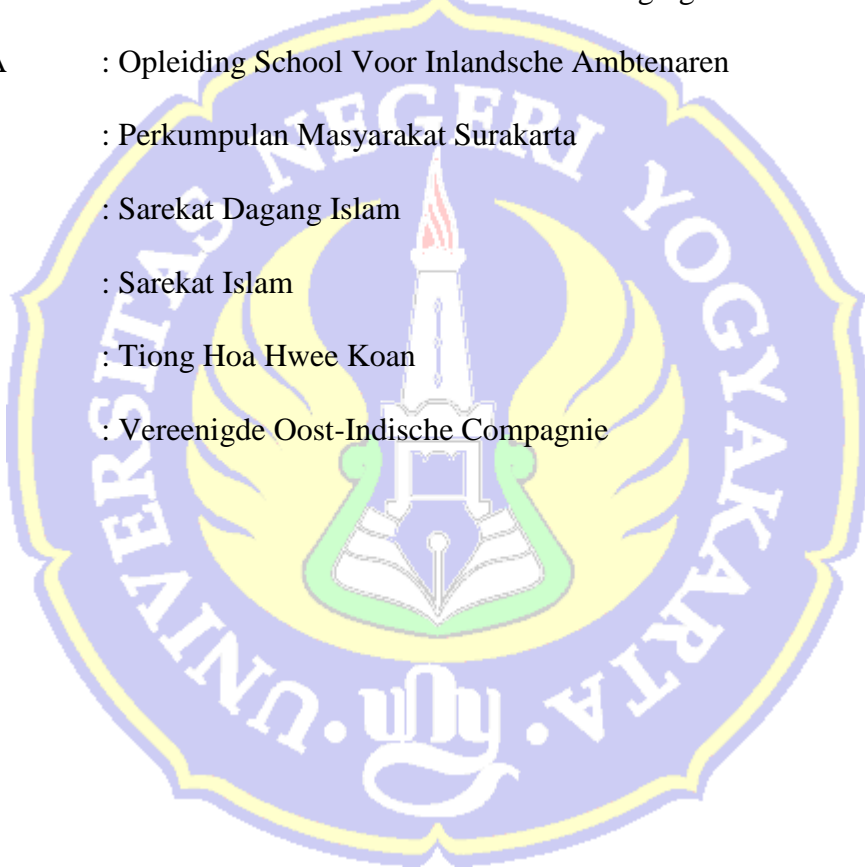
| | |
|------------------------|--|
| <i>Begrafenisfunds</i> | : Organisasi Kematian |
| <i>Enclave</i> | : Daerah kantong |
| <i>Feng Shui</i> | : Keyakinan terhadap nilai baik buruknya suatu hal atau tindakan. |
| <i>Geger Pecinan</i> | : Peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa. |
| <i>Huagong</i> | : Kuli atau buruh |
| <i>Huaqiao</i> | : Perantau yang mencakup guru, jurnalis, dan kelompok profesional. |
| <i>Huashang</i> | : Perdagangan |
| <i>Huayi</i> | : Terlahir untuk menjadi warga negara |
| <i>Jikak</i> | : Juru tulis |
| <i>Jung</i> | : Perahu atau tungkang yang lebar dengan gubuk-gubuk kecil di bagian buritannya yang digunakan oleh orang Tionghoa meninggalkan negara leluhurnya. |
| <i>Kapitein</i> | : Kapiten |
| <i>Kong Koan</i> | : Kantor dimana para pemimpin Tionghoa bekerja untuk kepentingan orang-orang Tionghoa. |
| <i>Kong Sing</i> | : Kumpulan dagang yang didirikan oleh orang-orang Tionghoa |
| <i>Landraad</i> | : Dewan pengadilan |
| <i>Luitenant</i> | : Letnan |
| <i>Major</i> | : Mayor |
| <i>Matrilineal</i> | : Garis keturunan menurut garis keturunan ibu |



| | |
|-----------------------------|---|
| <i>Nyah Nganten</i> | : Gelar untuk perempuan Jawa dari golongan bangsawan |
| <i>Onderdaan</i> | : Subyek |
| <i>Onderneming</i> | : Usaha |
| <i>Ongji</i> | : Izin, lisensi |
| <i>Passenstelsel</i> | : Surat izin jalan |
| <i>Patrilineal</i> | : Garis keturunan menurut garis keturunan ayah |
| <i>Patrilokal</i> | : Pasangan suami istri untuk menetap bersama di sekitar rumah keluarga suami. |
| <i>Patriakal</i> | : Sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama. |
| <i>Politierol</i> | : Peradilan polisi |
| <i>Rekso Roemekso</i> | : Saling menjaga |
| <i>Singkek</i> | : Pendatang baru |
| <i>Sin Po</i> | : Surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu |
| <i>Taopekong</i> | : Pemimpin klenteng |
| <i>Thauwcang</i> | : Kuncir panjang |
| <i>Totok</i> | : Biasa disebut juga dengan <i>singkek</i> , yaitu orang Tionghoa yang baru datang, memiliki darah Tionghoa dan masih berorientasi pada negara leluhur. |
| <i>Vorstenlanden</i> | : Wilayah-wilayah kerajaan |
| <i>Vreemde Oosterlingen</i> | : Timur Asing |
| <i>Wijkenstelsel</i> | : Surat izin tinggal |
| <i>Wijk Meester</i> | : Kepala kampung |
| <i>Xiao</i> | : Bakti kepada orang tua maupun kepada leluhur |

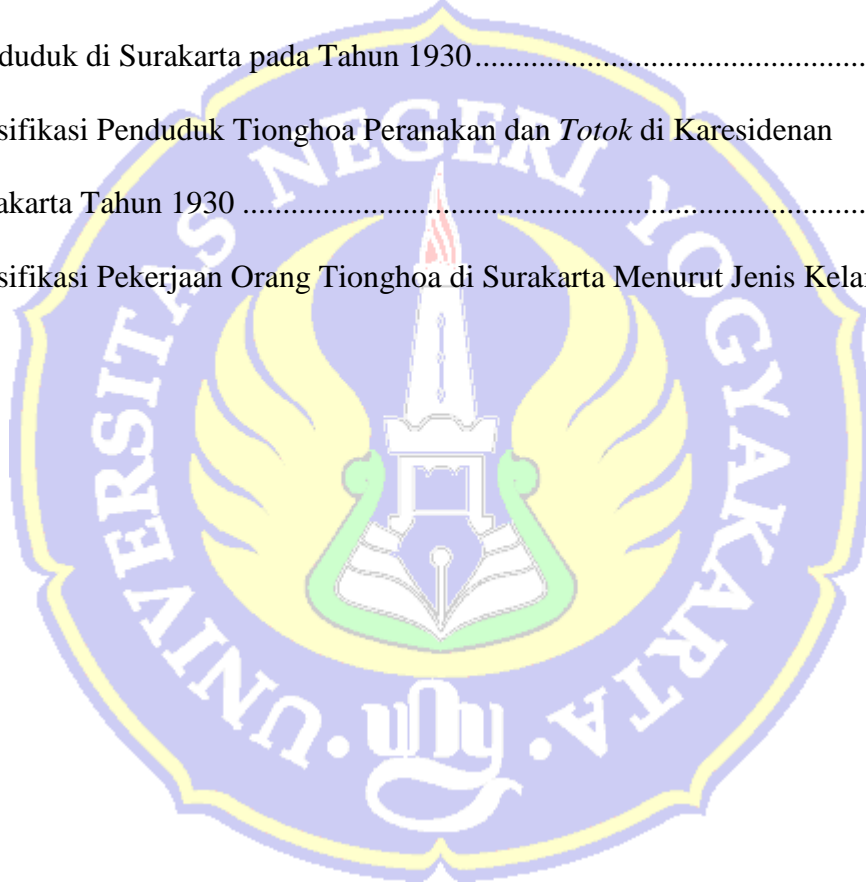
DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-------|---|
| HCS | : Hollandsch Chineesche School |
| HCTNH | : Hua Chiao Tsing Nien Hui |
| ISDV | : Indische Sociaal Democratische Vereeniging |
| OSVIA | : Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren |
| PMS | : Perkumpulan Masyarakat Surakarta |
| SDI | : Sarekat Dagang Islam |
| SI | : Sarekat Islam |
| THHK | : Tiong Hoa Hwee Koan |
| VOC | : Vereenigde Oost-Indische Compagnie |



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Jumlah Penduduk Tionghoa di Berbagai Daerah di Jawa Tahun 1815..... | 28 |
| 2. Sebaran Wilayah Tempat Tinggal Etnis-Etnis di Surakarta..... | 32 |
| 3. Penduduk di Surakarta pada Tahun 1930..... | 34 |
| 4. Klasifikasi Penduduk Tionghoa Peranakan dan <i>Totok</i> di Karesidenan Surakarta Tahun 1930 | 45 |
| 5. Klasifikasi Pekerjaan Orang Tionghoa di Surakarta Menurut Jenis Kelamin... | 86 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| 1. Peta Kota Surakarta Tahun 1940..... | 107 |
| 2. Peta Propinsi Fukien dan Kwangtung, Asal Suku Bangsa Orang-Orang Tionghoa di Surakarta | 108 |
| 3. Permukiman Tionghoa di Surakarta Tahun 1901..... | 109 |
| 4. Pasar Gedhe Surakarta, Pusat Aktivitas Ekonomi Masyarakat Tionghoa di Surakarta | 110 |
| 5. Klenteng Tien Kok Sie Pasar Gedhe - Solo 1906 | 111 |
| 6. Rumah Seorang Major Tionghoa - Solo 1906..... | 112 |
| 7. Salinan <i>Regeering Almanak</i> 1908 | 113 |
| 8. Salinan <i>Staatblad van Nederlandsch Indie</i> , 1835, No. 37..... | 114 |
| 9. Salinan <i>Staatblad van Nederlandsch Indie</i> , 1891, No. 214..... | 116 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah orang Tionghoa di Indonesia sudah cukup lama. Berbagai sumber menunjukkan bahwa orang Tionghoa hadir di Indonesia sejak abad ke-5 yaitu dengan kunjungan pendeta Fa Hien. Menjelang abad ke-19, kehadiran orang Tionghoa ke Indonesia semakin banyak, kebanyakan mereka adalah kaum laki-laki kemudian diikuti kaum perempuan.¹ Menurut catatan sejarah, keberadaan orang-orang Tionghoa di Indonesia lebih dulu dari pada orang-orang Eropa, yang ditandai oleh adanya perkampungan Tionghoa di pesisir Utara Jawa seperti Tuban, Demak, dan Jepara pada abad ke-15.²

Kehadiran para imigran Tionghoa itu berasal dari Propinsi Fujian dan Kwangtung di pantai selatan dan tenggara. Mereka adalah orang Tionghoa dari kelompok bahasa yang berbeda-beda seperti Hokkian, Hakka, Theo Chiu, Kanton, Hok Chiu, Hok Chia, Heng Hua, Hainese (Hailam). Orang-orang Heng Hua, Hok Chia, dan Hokkian disebut Minnan.³ Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Indonesia sudah beratus-ratus tahun yang lalu, Benny Juwono dalam

¹ Z.M. Hidajat, *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1993), hlm. 53.

² M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 6-10. Pada tahun 414 sebenarnya telah berlangsung pelayaran yang dilakukan orang Tionghoa yaitu Fa-Hien ke Malaka. Pendeta I-Tsing pada tahun 671, Ch'ang Chun pada abad ke-7, Chia Tan pada abad ke-8, namun pelayaran-pelayaran ini baru bersifat ekspedisi belum pelayaran migrasi.

³ Pratiwo, *Arsitektur Tradisional Tionghoa dan Perkembangan Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 15.

Lembaran Sejarah menjelaskan bahwa:

Imigran Tionghoa datang ke Indonesia sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Pengaruh pemujaan roh nenek moyang dengan ajaran Konfusianisme membentuk kepercayaan komunitas ini harus memelihara kuburan orang tua atau pendahulunya. Kepercayaan ini lama-kelamaan terkikis. Tekanan ekonomi dalam negara Tiongkok telah memaksa orang Tionghoa merantau ke Asia Tenggara dari Pantai China dengan hembusan angin muson Desember-Mei menyusuri daratan Asia Tenggara. Faktor kemiskinan menjadi salah satu sebab orang Tionghoa bermigrasi ke Asia Tenggara. Di samping itu, keadaan politik dalam negeri seperti Perang Candu 1839, Pemberontakan Taiping 1851 serta krisis ekonomi yang terjadi berulang kali seperti wabah kelaparan akibat kegagalan panen telah mendorong ribuan imigran dari China Selatan mencari pekerjaan ke luar negeri.³

Imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia mengelompok berdasar kesamaan suku tempat asalnya di Tiongkok. Orang-orang Hokkian adalah golongan terbesar yang bertempat tinggal di Jawa, dan Batavia sejak lama merupakan salah satu pusat permukiman Tionghoa di Jawa.⁴ Mereka datang ke Pulau Jawa sebagai pedagang yang membawa porselen dan sutra untuk ditukar dengan beras dan hasil pertanian yang lain.

Mereka datang dengan perahu yang kecil (jung) dan bergantung pada angin musim, mereka harus menunggu angin utara agar dapat pulang ke negaranya. Selama waktu menunggu di Pulau Jawa inilah mereka terpikat oleh perempuan setempat dan membentuk keluarga. Lama-kelamaan terbentuklah permukiman orang Tionghoa yang disebut dengan pecinan, yang berdampingan dengan rumah atau keraton penguasa pribumi.

³ Benny Juwono, "Etnis China di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi", *Lembaran Sejarah* Vol. 2, No. 1, (Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 1999), hlm. 59-60.

⁴ Z.M. Hidajat, *Ibid.*

Bangsa Eropa pertama datang ke Indonesia pada tahun 1595 setelah berlayar melewati Semenanjung Harapan di Afrika Selatan dengan tujuan membeli rempah-rempah dan membawanya ke Eropa, namun pada akhirnya berniat untuk menguasai wilayah tersebut. Demi menghindari persaingan di antara mereka, didirikanlah VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) pada tahun 1602. Markas VOC pertama kali didirikan di Ambon. Berhubung dengan semakin meluasnya wilayah yang dikuasai, markas VOC kemudian dipindahkan ke Jayakarta yang kemudian dinamai Batavia.⁵

Dominasi kepentingan VOC di Batavia seringkali menyebabkan konflik antara kompeni dagang Belanda itu dengan orang-orang Tionghoa. Salah satu konflik terjadi pada tahun 1740, yang dikenal dengan pembantaian masal orang Tionghoa di Batavia. Akibat peristiwa itu banyak orang-orang Tionghoa dari Batavia pindah ke beberapa wilayah di Jawa Tengah. Sementara itu, sebagian dari orang-orang Tionghoa yang mulanya akan dipulangkan ke negaranya, dalam perjalanan ternyata mereka diturunkan di Semarang. Orang-orang Tionghoa yang gagal kembali ke Tiongkok ini terpaksa tinggal di Semarang bergabung dengan masyarakat Tionghoa yang lebih dahulu bermukim di wilayah itu.

Pada waktu yang sama, di Semarang telah ada aktivitas perdagangan VOC yang dirasa mengurangi legitimasi kerajaan Mataram yang berpusat di Kartasura. Muncul perlawanan dari Paku Buwono II terhadap VOC, orang-orang Tionghoa di Semarang turut serta membantu Paku Buwono II. Sikap orang Tionghoa ini didorong keinginan untuk balas dendam pada VOC atas peristiwa pembunuhan

⁵ Pratiwo, *op.cit.*, hlm. 10.

masal di Batavia tahun 1740. Perlawanan yang dilakukan Paku Buwono II dengan orang Tionghoa ini mengalami kegagalan dan membuat mereka semakin terdesak.⁶ Sikap politik Paku Buwono II berbalik, ia menjadi akomodatif terhadap VOC. Perubahan sikap politik Paku Buwono II ini menimbulkan kekecewaan pada orang-orang Tionghoa yang telah membantunya melawan VOC. Bentuk kekecewaan orang-orang Tionghoa diluapkan dengan turut mendukung pemberontakan Raden Mas Garendi terhadap Paku Buwono II.

Serangan yang didukung oleh orang-orang Tionghoa itu berhasil menduduki Keraton Mataram di Kartasura, sehingga peristiwa ini juga dikenal dengan *geger pecinan* tahun 1742. Sebelum meletus *geger pecinan*, Paku Buwono II pada bulan November 1741 telah melakukan penyerbuan terhadap kantor VOC di Semarang dengan kekuatan 20.000 orang yang sebagian pasukannya adalah orang Tionghoa meskipun penyerbuan itu mengalami kegagalan. Pada bulan Juli di tahun yang sama, Paku Buwono II juga menumpas Garnisun VOC yang bertugas di Kartasura. Raden Mas Garendi yang memimpin penyerangan Paku Buwono II di Kartasura merupakan cucu Amangkurat III, ia diberi gelar Sunan Kuning. Nama Sunan Kuning diberikan oleh orang Tionghoa karena memimpin kaum kulit kuning atau orang Tionghoa.⁷

Didukung oleh VOC, Paku Buwono II berhasil menumpas pemberontakan dan merebut kembali Keraton Mataram, namun kerajaannya dalam kondisi yang rusak parah dan tidak mungkin untuk ditinggali kembali. Berakhirnya *geger*

⁶ Alex Sudewa, *Dari Kartasura ke Surakarta*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Asia, 1995), hlm. 241.

⁷ M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm, 140-141.

pecinan membuat Paku Buwono II harus memindahkan Ibu Kota Kerajaan ke Surakarta pada tahun 1745. Orang-orang Tionghoa yang turut serta melakukan pemberontakan pada Paku Buwono II tetap diizinkan tinggal di ibu kota yang baru.⁸

Permukiman Tionghoa di Surakarta pada masa awal didirikannya terletak di Kampung Balong (sebelah Utara Sungai Pepe sekitar Pasar Gede) ke Timur di Ketandan hingga Limalasan, ke sebelah utara sampai Balong, ke utara lagi sampai Warungpelem.⁹ Setelah terjadi perpecahan Kerajaan Surakarta tahun 1757, yang ditandai oleh Perjanjian Salatiga, sebagian Kota Surakarta menjadi bagian dari wilayah Kasunanan dan sebagian lain menjadi wilayah Mangkunegaran.¹⁰ Masa kepemimpinan Paku Buwono IV (1780-1820), pemerintah kolonial Belanda menunjuk pemimpin bagi orang-orang Tionghoa yang berpangkat mayor.¹¹ Penunjukan ini didasari semakin banyaknya orang-orang Tionghoa di Surakarta serta semakin pentingnya peran kelompok ini dalam aktivitas perekonomian. Mayor membawahi pemimpin perkampungan Tionghoa atau *wijk*, yang

⁸ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Bagian 2 Jaringan Asia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 125.

⁹ R.M. Sajid, *Babad Sala*, (Surakarta: Rekso Pustoko, 2001), hlm. 61.

¹⁰ Perpecahan Mataram ditandai oleh adanya Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi dua yaitu Kasultanan yang berpusat di Yogyakarta dan Kasunanan yang berpusat di Surakarta. Perpecahan Kasunanan ditandai oleh Perjanjian Salatiga tahun 1757 yang memberikan sebagian wilayah Kasunanan kepada Raden Mas Said, yang kemudian kadipaten otonom bernama Mangkunegaran. Lihat George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 1-3.

¹¹ R.M. Sajid, *op. cit.*, (1984), hlm. 65.

berpangkat kapiten. Kapiten bertanggung jawab kepada mayor Tionghoa, sedang mayor Tionghoa bertanggung jawab langsung kepada pemerintah kolonial. Penunjukan mayor dari kalangan orang-orang Tionghoa ditentukan dari jumlah kekayaan yang dimiliki, karena jumlah kekayaan identik dengan besarnya pengaruh seseorang dalam sosial politik.

Orang-orang Tionghoa di Surakarta harus mengikuti kebijakan pemerintah kolonial dan kebijakan keraton. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap orang-orang Tionghoa pada abad ke-19 adalah pembatasan terhadap gerak orang Tionghoa. Dampak dari kebijakan itu, orang Tionghoa tidak bisa tinggal pada suatu wilayah tanpa surat izin tinggal (*wijkenstelsel*) dan tidak seorang pun dapat menuju ke daerah pedalaman tanpa surat izin jalan (*passenstelsel*). Penetapan tempat tinggal dan sistem surat jalan bagi Tionghoa dilatarbelakangi oleh kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda terhadap aktivitas ekonomi orang Tionghoa yang berkembang pesat sehingga memicu peningkatan jumlah yang melampaui jumlah orang Eropa dan Timur Asing lainnya.¹²

Abad ke-19, atas desakan organisasi sosial masyarakat Tionghoa peraturan *wijkenstelsel* dihapuskan sehingga membuat orang Tionghoa mengalami penyebaran keluar dari tempat-tempat yang dikhususkan bagi mereka. Penyebaran orang-orang Tionghoa tetap berpusat di daerah yang terdapat klenteng. Selain itu *passenstelsel* juga dihapuskan yang menyebabkan aktivitas sosial ekonomi orang

¹² Sariyatun, *Usaha Batik Cina di Vorstenlanden Surakarta Awal Abad XX*, (Surakarta: UNS Press, 2005), hlm. 43.

Tionghoa di Surakarta semakin kompleks serta interaksi dengan orang Jawa juga semakin erat. Hubungan antara orang Tionghoa dengan orang Jawa di Surakarta mengalami ketegangan diawali dengan industri batik. Para pengusaha dan pedagang batik Jawa sangat tergantung pada bahan-bahan batik yang dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Salah satu konflik terjadi pada tahun 1911 ketika terjadi bentrokan kelompok Tionghoa dan Jawa yang disebabkan persaingan *Kong Sing* Tionghoa dengan pedagang batik pribumi muslim yang membentuk *Rekso Roemekso* (saling menjaga). Paguyuban ini menjadi cikal bakal berdirinya Sarekat Dagang Islam tahun 1909 di Surakarta yang memberi fasilitas serta perlindungan pedagang muslim Jawa untuk menghadapi pedagang Tionghoa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang keberadaan orang-orang Tionghoa di Surakarta?
2. Mengapa permukiman orang-orang Tionghoa di Surakarta menempati lokasi tersendiri dan bagaimana perkembangannya?
3. Bagaimana aktivitas orang-orang Tionghoa berpengaruh pada lingkungan sosial ekonominya?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum:

- a. Sebagai sarana untuk melatih penerapan metode penelitian sejarah dan historiografi yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

- b. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, analitis, serta objektif sesuai dengan metodologi dalam mengkaji proses terjadinya suatu peristiwa sehingga dapat memahami segala nilai yang terkandung di dalamnya.
- c. Menambah pengetahuan di bidang sejarah mengenai perkembangan pemukiman Tionghoa di Indonesia.

2. Tujuan Khusus:

- a. Memberikan gambaran tentang latar belakang keberadaan orang-orang Tionghoa di Surakarta.
- b. Melihat perkembangan permukiman orang-orang Tionghoa Surakarta pada masa kolonial.
- c. Mengkaji aktivitas orang-orang Tionghoa yang berpengaruh pada lingkungan sosial ekonominya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

- a. Memperoleh gambaran mengenai keberadaan orang-orang Tionghoa di Indonesia
- b. Menambah referensi pembaca terkait dengan proses perkembangan permukiman orang-orang Tionghoa di Surakarta.
- c. Menghasilkan historiografi baru terkait dengan aktivitas orang-orang Tionghoa yang berpengaruh pada lingkungan sosial ekonominya di Surakarta.

2. Bagi Penulis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
- b. Dapat menjadi tolak ukur kemampuan dalam menerapkan metode penelitian sejarah serta kemampuan menganalisis peristiwa sejarah.
- c. Menambah pengetahuan mengenai perkembangan permukiman orang-orang Tionghoa di Surakarta.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian sejarah sebagai sarana untuk menelaah literatur yang baik yang dilandasi oleh pemikiran dan penelitian. Kajian pustaka dapat menambah informasi dan data-data yang dibutuhkan dan yang mendukung untuk melakukan penelitian sejarah. Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.¹³ Kajian pustaka sangatlah diperlukan dalam sebuah penelitian, karena dapat menambah informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam proses penulisan.¹⁴

Pustaka Benny Juwono yang berjudul *Etnis Cina di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi*. Migrasi orang Tionghoa ke kawasan Asia Tenggara dilakukan oleh suku bangsa Tiongkok bagian selatan. Secara umum imigran Tionghoa pada abad 19 di Muangthai, Malaysia, Singapura, Filipina, dan

¹³ Tim Kaprodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hlm. 6.

¹⁴ Suhartono, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 156.

Hindia Belanda tergolong miskin, baik secara individu maupun kelompok. Kemiskinan imigran Tionghoa tampak dari pekerjaan mereka yang tergolong kasar yaitu sebagai buruh, kuli perkebunan atau pedagang kecil. Modernisasi Kota Surakarta, khususnya sejak pemerintahan Paku Buwana X (1893-1939), tampak dari sarana perkotaan seperti kereta api, jaringan telepon pasar, dan transportasi darat. Hal tersebut menjadi kebutuhan pokok Kota Surakarta bersamaan dengan itu muncul bangunan yang dikembangkan imigran asing dengan seni arsitektur yang khas. Imigran Tionghoa menempati sebagian wilayah kota yang tampak melalui pertokoan milik orang Tionghoa yang terkadang juga berfungsi sebagai tempat tinggal. Pada bagian tengah kota Surakarta banyak ditempati beberapa etnis seperti etnis Jawa, Eropa, Tionghoa dan Arab.

Perkampungan orang-orang Eropa terletak di sekitar rumah residen, perkantoran, gereja, gedung pertunjukan, toko-toko, gedung-gedung sekolah, dan Benteng Vastenburg. Perkampungan Eropa di luar benteng itu yang disebut Loji Wetan karena bangunannya berbentuk loji yang menggunakan bahan batu bata. Apabila perkampungan orang Eropa terpisah dari perkampungan etnis lain berdasarkan diskriminasi ras, maka penentuan letak perkampungan pecinan untuk orang-orang Tionghoa terletak di sekitar Pasar Gedhe yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan terhadap gerak-gerik orang Tionghoa.

Etnis Tionghoa masuk ke Indonesia melalui beberapa tahap migrasi, pertama kali diawali oleh Fa Hien, seorang pendeta Budha yang hendak berlayar menuju Sri Lanka dan terdampar di Pulau Jawa. Migrasi terbesar adalah di saat masa penjajahan Belanda, etnis Tionghoa banyak didatangkan ke Indonesia

sebagai buruh perkebunan. Banyaknya etnis Tionghoa yang masuk Indonesia menyebabkan ledakan penduduk. Meledaknya populasi Tionghoa di Batavia memaksa pemerintah kolonial mengurangi populasi etnis Tionghoa dengan memulangkan etnis Tionghoa ke negara asalnya, namun mereka berhasil melarikan diri dan menyebar di daerah dan kota di Jawa. Etnis Tionghoa masuk dan berkembang di Surakarta pada masa Kerajaan Mataram di bawah Paku Buwono II. Mereka bergabung dengan pasukan kuning, pelarian Tionghoa dari Batavia yang menyerbu Mataram dan menyebabkan *geger pecinan*. Peristiwa itu menyebabkan Paku Buwono memindahkan kerajaan dari Kartasura ke Surakarta.

Penduduk Surakarta dapat dikatakan homogen, artinya masing-masing etnis terkumpul dan menempati daerah-daerah tertentu secara terpisah dengan etnis lainnya. Beberapa etnis yang mendiami di seputar wilayah ibukota kerajaan yaitu Jawa, Tionghoa, Arab, dan Eropa.¹⁵ Luas Kota Surakarta 24 km² dengan ukuran panjang 6 km, membentang dari arah barat ke timur, dan 4 km dari arah utara ke selatan. Kota ini terletak pada ketinggian 200 m di atas permukaan laut, di sebelah kiri Bengawan Solo, dan pada kedua sisi Sungai Pepe.

Sebagian besar kota tersebut masuk wilayah kasunanan dan hanya seperlima saja yaitu di sebelah barat laut, masuk Kadipaten Mangkunegaran.¹⁶ Meskipun daerah milik kasunanan ini terbentang di seluruh kota, selain bagian

¹⁵ Dwi Ratna Nurhajarini, dkk., *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta* (Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), hlm. 9.

¹⁶ Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*, (Yogyakarta: Taman Siswa, 1989), hlm. 2.

barat laut, namun di kalangan penduduk daerah kasunanan itu dikenal dengan nama Kidulan. Sebutan ini dihubungkan dengan letak keraton yang terdapat di sebelah selatan, sedang istana Mangkunegaran di sebelah utara. Jalan Raya Purwasari (sekarang Jl. Slamet Riyadi) dan jalan trem yang menghubungkan Boyolali dan Wonogiri seakan-akan menjadi batas yang memisahkan kedua daerah itu.¹⁷

Di sebelah utara keraton terletak kepatihan, tempat kediaman pepatih dalem, sekaligus berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan. Istana Mangkunegaran terletak di sebelah selatan Sungai Pepe, demikian pula perkampungan orang-orang Eropa yang meliputi rumah residen, kantor-kantor, gereja, gedung pertunjukan, gedung-gedung sekolah, toko-toko, dan Benteng Vastenburg sebagai pusatnya.

Letak keraton Istana Mangkunegaran, rumah residen, dan kepatihan tidak berjauhan. Benteng Vastenburg dibangun dekat dengan keraton dan rumah residen. Meski jarak antara keraton dan istana Mangkunegaran yang menghadap ke selatan tidak berjauhan, namun letaknya diatur agar keduanya dipisahkan oleh suatu jalan raya. Selain juga dapat dilihat bahwa jarak dari kepatihan ke rumah residen lebih dekat daripada jarak dari kepatihan ke keraton, dan untuk mencapai keraton, pepatih dalem harus melewati rumah residen.

Pengaturan tempat-tempat itu adalah untuk kepentingan dan keamanan pemerintah kolonial Belanda di Surakarta. Jika perkampungan orang Eropa terpisah dari perkampungan etnis lain berdasarkan diskriminasi ras, maka

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

penunjukan kampung pecinan untuk orang-orang Tionghoa ditujukan agar gerak-gerik mereka mudah diawasi.¹⁸ Pecinan terletak di sekitar Pasar Gede, diurus oleh kepalanya yang diambil dari etnis yang sama, dan diberi pangkat mayor. Di kalangan penduduk kepala etnis ini dikenal dengan nama Babah Mayor.

Buku “Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo” karya Ayu Windy Kinasih menjelaskan bahwa kebijakan pemukiman di Surakarta dilakukan dengan penunjukkan daerah-daerah tertentu yang bisa dihuni oleh etnis Tionghoa. Kampung pecinan di Surakarta adalah Balong dan disekitar Pasar Gede, yang mana setiap warga kampung tersebut hanya boleh bergaul dalam lingkungan mereka sendiri. Orang Tionghoa diharuskan melakukan adat-istiadat mereka sendiri sehingga identitas mereka akan tetap berbeda dengan penduduk lain di luar kampung pecinan. Orang Tionghoa ditempatkan sebagai kasta kedua di bawah golongan Eropa dan di atas golongan pribumi.

Pustaka lain yang digunakan yaitu karya George D. Larson berjudul “*Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*”. Buku ini menjelaskan perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, politik yang ada di Surakarta. Buku itu juga menyebutkan bahwa etnis Tionghoa berhasil menguasai perekonomian di Surakarta termasuk perusahaan-perusahaan batik. Orang-orang Tionghoa mendirikan organisasi bernama *Kong Sing*, sehingga pedagang batik Jawa di Surakarta yang diprakarsai oleh Haji Samanhudi membentuk *Rekso Roemekso* yang menjadi cikal berdirinya SDI (Sarekat Dagang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

Islam) dan diubah menjadi SI (Sarekat Islam) pada tahun 1911 untuk melawan praktek curang dari pengusaha Tionghoa.

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi merupakan peristiwa di masa lampau yang direkonstruksi oleh sejarawan berdasarkan sumber dan data yang diperoleh dan sudah teruji kebenarannya karena itu sebagai fakta. Sedangkan historiografi yang relevan merupakan suatu penelitian historis yang mendahului penelitian yang akan ditulis. Historiografi merupakan rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis.¹⁹ Historiografi dilakukan setelah menyelesaikan heuristik dan kritik sumber yang kemudian diwujudkan dengan sebuah karya sejarah. Historiografi yang relevan adalah upaya perbandingan sebuah penelitian yang akan dilangsungkan dengan penelitian sejarah yang telah ada.²⁰

Fungsi dari digunakannya historiografi yang relevan untuk menunjukkan perbedaan antara kajian yang dilakukan sebelumnya dan kajian yang akan ditulis serta membuat penelitian yang ditulis lebih jelas, sehingga karya sejarah yang ditulis diharapkan memiliki tingkat keaslian yang dipertanggungjawabkan yaitu murni tulisan sendiri, tidak meniru karya sejarah yang pernah ditulis sebelumnya. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan skripsi sebagai contoh yang relevan.

¹⁹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 39.

²⁰ Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 99.

Pertama, skripsi karya Cahyo Adi Utomo, *Peran Etnis Cina dalam Perdagangan di Surakarta pada Tahun 1959-1998*, membahas mengenai peranan etnis Cina dalam perdagangan sangat menonjol. Hal itu dikarenakan keuletan dan kerja keras etnis Tionghoa sendiri. Selain itu mereka juga didukung dengan adanya kesempatan yang dapat mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Skripsi mahasiswa Pendidikan Sejarah karya Eka Deasy Widyaningsih, *Masyarakat China Balong Sudiroprajan (Studi Interaksi Sosial Masyarakat China-Jawa di Surakarta pada Pertengahan Akhir Abad XX)*, membahas mengenai interaksi sosial antara etnis China-Jawa di Kelurahan Sudiroprajan ada kecenderungan intergrasi. Interaksi sosial itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang pendidikan, mata pencaharian, sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan.

Bakti Syamsudin, *Eksistensi Etnis Tionghoa di Surakarta pada Masa Orde Lama 1945-1965*, etnis Tionghoa memiliki peranan besar dalam perekonomian Indonesia. Pada masa kemerdekaan, etnis Tionghoa mendapat perlakuan berbeda di bidang ekonomi akibat dominan di bidang perekonomian. Kebijakan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang dilakukan oleh pemerintah orde lama untuk mewujudkan kesetaraan antara pribumi dan etnis Tionghoa. Pemerintah RI dan RRC sama-sama menganggap etnis Tionghoa di Indonesia adalah warga negaranya sehingga etnis Tionghoa di Indonesia memiliki dwi kewarganegaraan.

Ketiga karya di atas memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu tempat yang menjadi penelitian yaitu Surakarta. Perbedaannya, Cahyo Adi Utomo, *Peran Etnis Cina dalam Perdagangan di Surakarta pada Tahun 1959-*

1998 lebih difokuskan pada peranan etnis Tionghoa dalam perdagangan. Karya Eka Deasy Widyaningsih, *Masyarakat China Balong Sudiroprajan (Studi Interaksi Sosial Masyarakat China-Jawa di Surakarta pada Pertengahan Akhir Abad XX)* memfokuskan pada hubungan interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan pribumi yaitu Jawa. Bakti Syamsudin, *Eksistensi Etnis Tionghoa di Surakarta pada Masa Orde Lama 1945-1965* pada masa itu etnis Tionghoa mendapat perlakuan berbeda di bidang ekonomi akibat dominan di bidang perekonomian. Kebijakan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang dilakukan oleh pemerintah orde lama untuk mewujudkan kesetaraan antara pribumi dan etnis Tionghoa. Sedangkan pada penelitian ini akan lebih difokuskan pada perkembangan permukiman beserta aktivitas orang-orang Tionghoa yang berpengaruh pada permukiman etnis Tionghoa di Surakarta.

G. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian historis. Metode historis merupakan salah satu penyelidikan mengaplikasi metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. Metode penelitian skripsi ini meliputi:

1. Heuristik

Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah.²¹ Heuristik dilakukan untuk

²¹ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 67.

menghimpun jejak-jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui peristiwa-peristiwa bersejarah masa lampau. Penulis mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik ini baik sumber primer maupun sumber sekunder. Langkah awal dari tahapan ini penulis terlebih dahulu menentukan topik dan judul skripsi serta pengumpulan sumber sejarah atau data-data yang mendukung dan didapat dari berbagai perpustakaan, instansi pemerintah dan perorangan. Pengumpulan bahan dalam skripsi ini antara lain dari Perpustakaan UNY, Perpustakaan UGM, Perpustakaan UNS, Perpustakaan Monumen Pers, Perpustakaan Kota Surakarta, Perpustakaan Rekso Pustoko.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain atau dengan alat mekanik seperti rekaman saat peristiwa terjadi yang dapat berupa tulisan atau foto. Sumber primer dapat juga disebut arsip atau manuskrip. Posisi arsip sebagai sumber menempati kedudukan yang tertinggi dibandingkan dengan sumber sejarah lainnya. Sumber primer yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Regeering Almanak 1908

Staatblad van Nederlandsch Indie, 1835, No. 37

Staatblad van Nederlandsch Indie, 1891, No. 214

Volkstelling, 1930.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan maya, yaitu saksi yang tidak hadir dalam peristiwa tersebut.

Sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari buku, catatan benda, dan narasumber kerabat dekat pelaku utama atau saksi sejarah. Sumber primer yang digunakan antara lain:

Ayu Windy Kinasih, *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*, Yogyakarta: Fisipol UGM, 2005.

Benny Juwono, "Etnis China di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi", *Lembaran Sejarah* Vol. 2, No. 1, Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 1999.

Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*, Yogyakarta: Taman Siswa, 1989.

Dwi Ratna Nurhajarini, dkk., *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*, Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.

Larson, George D., *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1990.

2. Verifikasi

Verifikasi atau kritik sumber merupakan suatu pengujian sumber dan menganalisis secara kritis mengenai keotentikan sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Kritik sumber ada dua macam yaitu kritik eksternal (otentisitas) dan kritik internal (kredibilitas).²² Kritik sumber ekstern merupakan kritik sumber sejarah dari luar misalnya mengenai keaslian dari kertas yang dipakai, ejaan, tinta, gaya, tulisan, dan semua penampilan luarnya untuk mengetahui keotentikannya. Kritik sumber intern yaitu penilaian atau pengujian sumber sejarah dari isi sumber dokumen tersebut, sehingga sumber tersebut dapat dianalisis berdasarkan isinya.

²² R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 246.

Kritik sumber diperlukan dalam sebuah penelitian sejarah karena semakin kritis dalam menilai sumber sejarah, maka akan semakin otentik penelitian sejarah yang dilakukan.

3. Interpretasi

Interpretasi yaitu merangkai fakta-fakta yang telah ditemukan dan ditetapkan melalui kritik sumber ekstern maupun intern agar menjadi sebuah makna yang saling berhubungan. Fakta-fakta tersebut dirangkai, dikaitkan dengan fakta lain, agar terlihat sebagai rangkaian fakta yang masuk akal, dan menunjukkan sebuah arti dan kecocokan satu sama lainnya.

4. Historiografi

Secara harfiah, historiografi berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu yang disebut sejarah. Sejarah sebagai pengetahuan tentang masa lalu diperoleh melalui sistem penelitian mengenai kenyataan masa lalu dengan metode ilmiah yang sah.²³ Rekonstruksi rekaman dan peninggalan masa lampau secara kritis dan imajinatif berdasarkan bukti-bukti atau data-data yang diperoleh melalui proses itu disebut historiografi.

Historiografi yaitu penyampaian sintesis yang diperoleh melalui penelitian. Tahap ini merupakan tahap terakhir bagi penulis untuk menyajikan fakta ke dalam bentuk tulisan sejarah. Pada tahap ini penulis berusaha mensintesis dan menyusun fakta-fakta sejarah menjadi sebuah karya sejarah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Permukiman Tionghoa di Surakarta pada Tahun 1900-1940”.

²³ Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 16.

G. Pendekatan Penelitian

Permasalahan inti dari metodologi dalam ilmu sejarah adalah masalah pendekatan (*approach*). Proses rekonstruksi sejarah atau penggambaran mengenai suatu peristiwa sejarah sangat tergantung pada pendekatan yang dilakukan dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan politik dan sosiologis.

1. Pendekatan Politik

Pendekatan politik akan menyoroti tentang pola distribusi kekuasaan, yang akan dipengaruhi oleh banyak hal terutama faktor sosial dan ekonomi. Pendekatan politik mampu melihat siapa yang menduduki posisi yang paling tinggi, sehingga status tinggi akan dapat memiliki kesempatan dan keleluasaan dalam memperoleh bagian kekuasaan.²⁴ Vilfredo Pareto tentang teori elit politik, berpendapat bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Elit sendiri merupakan orang-orang yang menduduki jabatan tinggi dalam suatu lapisan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat 3 lapisan masyarakat di Indonesia yaitu lapisan atas diduduki oleh orang-orang Belanda dan Eropa, lapisan menengah orang Timur Asing seperti Tionghoa, Arab, dan lapisan paling bawah yaitu pribumi.

Etnis Tionghoa sebagai orang Timur Asing menempati lapisan menengah yang artinya berada di bawah golongan Eropa dan di atas golongan pribumi.

²⁴ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 149.

Orang-orang Eropa yang mempunyai kedudukan paling tinggi dan berkuasa di Hindia Belanda mengeluarkan beberapa kebijakan bagi orang Timur Asing yaitu orang-orang Tionghoa dan pribumi. Pendekatan politik dapat menggambarkan bagaimana orang-orang Tionghoa mempertahankan kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat sekitar pada masa kolonial Belanda sebagai akibat dari beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis sudah barang tentu akan meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, umpamanya golongan sosial mana yang berperan, serta nilai-nilainya, hubungan dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi, dan lain sebagainya.²⁵ Pendekatan sosiologis membantu mengkaji hubungan antara hubungan masyarakat Tionghoa dan pribumi, serta hubungan antara warga Tionghoa yang satu dengan yang lainnya.

Pendekatan ini juga membantu menggambarkan adanya struktur sosial (lapisan sosial) di dalam masyarakat Indonesia, yaitu adanya perbedaan golongan sosial yang diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang dimaksudkan untuk membedakan kedudukan hukum masing-masing golongan (antara golongan Eropa, Tionghoa, pribumi, dan Timur Asing lainnya). Salah satu teori yang digunakan yaitu teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan

²⁵ Cholisin, dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial UNY, 2006), hlm. 56.

kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan.

Hal ini dapat dilihat dari dipisah-pisahnya kedudukan hukum penduduk Hindia Belanda berdampak sangat buruk bagi hubungan antara penduduk di Hindia Belanda dan menimbulkan banyak masalah antara orang-orang Tionghoa dan pribumi. Politik segregasi yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda yang membagi-bagi penduduk Hindia Belanda menjadi alat pemecah belah yang efektif antara orang Tionghoa dan pribumi.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul Pemukiman Tionghoa di Surakarta Tahun 1900-1940, terdiri dari lima bab pembahasan, setiap bab akan dijelaskan garis besar isi dari masing-masing bab. Berikut sistematika pembahasannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan ringkasan dari bab yang akan disajikan dalam skripsi ini.

BAB II ETNIS TIONGHOA DI SURAKARTA

Pada bab ini membahas tentang awal kedatangan orang-orang Tionghoa ke Indonesia pada umumnya dan ke Surakarta pada khususnya. Dalam hal ini, etnis

Tionghoa di Surakarta seperti halnya dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya yaitu dibagi menjadi golongan *totok* dan golongan peranakan.

BAB III PEMUKIMAN ETNIS TIONGHOA DI SURAKARTA PADA MASA KOLONIAL

Pada bab yang ketiga, penulis akan menjelaskan mengenai perkembangan pemukiman etnis Tionghoa di Surakarta yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial terhadap etnis Tionghoa. Kebijakan-kebijakannya yaitu *wijkenstelsel* dan *passenstelsel*. Kedua peraturan itu sangat membatasi ruang gerak etnis Tionghoa. Namun setelah kebijakan-kebijakan itu dihapuskan, pola pemukiman etnis Tionghoa mulai menyebar dan tidak hanya berpusat pada satu tempat saja.

BAB IV AKTIVITAS ETNIS TIONGHOA DI SURAKARTA

Pada bab keempat, diuraikan mengenai kehidupan sosial ekonomi orang-orang Tionghoa di Surakarta. Aktivitas sosial disajikan dengan maksud untuk melihat aktivitas orang-orang Tionghoa agar mampu beradaptasi dengan penduduk pribumi melalui saluran-saluran sosial dalam bentuk perkawinan dan kekerabatan. Mereka juga membentuk organisasi-organisasi. Aktivitas ekonomi orang-orang Tionghoa juga disajikan untuk melihat sektor ekonomi mana yang dapat dimasuki oleh orang-orang Tionghoa di tengah persaingan dengan pribumi. Sejak awal orang-orang Tionghoa sudah menjalin hubungan baik dengan pedagang Jawa. namun hubungan itu mengalami ketegangan yang disebabkan oleh industri batik.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab yang terakhir ini akan memberikan kesimpulan dari rangkaian penjelasan pada bab-bab sebelumnya serta jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan di awal penulisan.



BAB II ETNIS TIONGHOA DI SURAKARTA

A. Orang-Orang Tionghoa di Surakarta

1. Proses Kedatangan

Orang Tionghoa di Indonesia bukanlah masyarakat baru. Kehadiran orang Tionghoa di Indonesia khususnya di Jawa sudah ada sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Orang-orang Tionghoa memiliki sejarah panjang dalam mengintegrasikan diri mereka ke dalam masyarakat Asia Tenggara, terutama Indonesia. Kehadiran orang-orang Tionghoa ke Indonesia sudah berlangsung sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Secara historis hal ini dapat diketahui lewat kedatangannya Fa Hien, seorang pendeta agama Budha dari Tiongkok yang datang ke Indonesia dan singgah di Pulau Jawa pada abad ke-4 dan I-Tsing pada abad ke-7.¹ Fa Hien menyebut keberadaan *to-lo-mo* (di Jawa), sedangkan I-Tsing pernah singgah di Indonesia untuk mempelajari Bahasa Sanskerta sebelum ke India untuk belajar agama Buddha.

Pada masa Dinasti Tang (618-907 M),² daerah selatan Tiongkok merupakan daerah yang ramai dalam bidang perdagangan, dari tempat tersebut

¹ Nuraini Soyomukti, *Soekarno dan Cina*, (Yogyakarta: Garasi, 2012), hlm. 160.

² Dinasti Tang adalah salah satu dinasti yang paling berpengaruh di Tiongkok, pada masa ini terjadi migrasi secara besar-besaran. Kaisar Dinasti Tang melarang rakyatnya meninggalkan Tiongkok pergi merantau ke negeri asing. Tetapi meskipun dilarang, banyak orang-orang Tionghoa pergi ke luar negeri. Lihat Sie Tjoen Lay, dkk, *Di Sekitar Sedjarah Indonesia-Tiongkok*, (Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru, t.t), hlm. 20.

timbul keinginan untuk memperluas perdagangan mereka dengan melakukan pelayaran. Perjalanan perdagangan yang membutuhkan waktu cukup lama membuat orang Tionghoa sering bersinggah dan menetap di wilayah Laut Cina Selatan. Pada masa Dinasti Tang inilah orang-orang Tionghoa mulai berdatangan ke Indonesia, puncaknya pada abad ke-19 dan awal abad-20 merupakan migrasi besar-besaran bagi orang-orang Tionghoa ke seluruh dunia.³

Secara umum orang-orang Tionghoa bermigrasi secara individu maupun kelompok kecil kurang dari lima orang. Imigran-imigran ini tergolong Tionghoa miskin di negaranya, kemiskinan tampak dari pekerjaan mereka yang kasar seperti buruh, kuli perkebunan atau pedagang kecil. Para pendatang dari Tiongkok ini kemudian melakukan perkawinan campuran dan asimilasi dengan pribumi, hal ini dikarenakan wanita Tionghoa hampir tidak ada yang keluar dari Tiongkok sebelum abad ini. Baru setelah Perang Dunia I yang mana kolonisasi Barat di Asia Tenggara dimulai, arus masuk Tionghoa perantau naik secara besar-besaran di wilayah Indonesia. Para pendatang ini membawa kaum wanita serta keluarga lainnya, yang kemudian membentuk komunitas baru yang terpisah dari masyarakat Tionghoa yang telah datang dan terbentuk lebih dahulu.

Faktor lain yang mendukung orang-orang Tionghoa melakukan migrasi adalah situasi dalam negeri Tiongkok sendiri, arus migrasi ke luar negeri cukup tinggi sejak negara itu mengalami pergantian dinasti yaitu digantinya Dinasti Ming oleh Dinasti Manchu. Sejak masa pemerintahan Dinasti Ming (1368-1644) jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Kepadatan penduduk terus meningkat

³ Victor Purcell, *The Chinese in South East Asia*, (London: Oxford University Press, 1981), hlm. 465.

sampai masa pemerintahan Dinasti Manchu (1600-1911). Kepadatan penduduk ini meningkatkan arus migrasi, disebabkan berkurangnya lahan untuk usaha pertanian. Pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan tersedianya lahan pertanian di negara Tiongkok menyebabkan tingginya angka atau jumlah pengangguran.

Keadaan itu dipersulit ketika tuan-tuan tanah menaikkan pajak sewa tanah, yang menyebabkan kehidupan para petani semakin bertambah berat. Keadaan yang sulit itulah yang mendorong orang-orang Tionghoa melakukan migrasi. Faktor penyebab juga terkait dengan pola migrasi orang-orang Tionghoa. Ada empat pola migrasi mereka yaitu pola *huashang* atau perdagangan, pola *huagong* atau kuli atau buruh, pola *huaqiao* atau perantau yang mencakup guru, jurnalis, dan kelompok profesional lainnya; serta pola *huayi* atau terlahir untuk menjadi warga negara setempat.⁴

Sistem ekonomi liberal yang diterapkan oleh pemerintah kolonial di Indonesia menyebabkan modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan berbagai perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang besar di Deli, Sumatera Timur. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini memungkinkan harus mendatangkan tenaga kerja orang-orang Tionghoa, karena memang sulit untuk mempekerjakan penduduk setempat. Awalnya mengambil orang-orang Tionghoa dari Penang dan Singapura, kemudian mencari tenaga kerja langsung ke negeri Tiongkok sendiri. Berbekal secarik kertas keterangan ijin menetap dari pemerintah Hindia Belanda yang harus dibayar f.150 bagi seorang

⁴ Nuraini Soyomukti, *op. cit.*, hlm. 161.

imigran laki-laki dan f.50 bagi imigran perempuan yang disebut *ongji*. Mereka dengan nekad dan berani mencoba nasib di negeri baru yang menjadi tumpuan harapan mereka.

Pada masa liberal ini, jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia semakin meningkat terutama di Pulau Jawa.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Tionghoa di Berbagai Daerah di Jawa Tahun 1815

| Daerah | Jumlah Seluruh Penduduk | Jumlah Seluruh Penduduk Tionghoa | Prosentase |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| Banten | 231.604 | 628 | 0.27 |
| Batavia | 332.015 | 52.394 | 15.78 |
| Bogor | 76.312 | 2.633 | 3.45 |
| Cirebon | 216.001 | 2.343 | 1.08 |
| Tegal | 178.415 | 2.004 | 1.12 |
| Pekalongan | 115.442 | 2.046 | 1.77 |
| Semarang | 327.610 | 1.700 | 0.15 |
| Jepara & Juana | 103.290 | 2.290 | 2.21 |
| Rembang | 158.530 | 3.891 | 2.45 |
| Gresik | 115.442 | 364 | 0.31 |
| Surabaya | 154.512 | 2.047 | 1.32. |
| Pasuruan | 108.812 | 1.070 | 0.98 |
| Prabalingga | 104.359 | 1.430 | 1.37 |
| Surakarta | 972.727 | 2.435 | 0.25 |
| Yogyakarta | 685.207 | 2.202 | 0.32 |

Sumber: Handinoto, *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa pada Masa Kolonial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 37.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Tionghoa terbanyak adalah di Batavia yaitu 52.394 orang. Jumlah penduduk Tionghoa kedua di Rembang yaitu sebanyak 3.891 orang, Bogor sebanyak 2.633 orang, Surakarta sebanyak 2.435 orang, Cirebon sebanyak 2.343 orang, Jepara & Juana sebanyak 2.290, Yogyakarta sebanyak 2.202, diikuti oleh Surabaya, Pekalongan, Tegal, dan daerah-daerah lainnya.

Kedatangan etnis Tionghoa di Surakarta berawal dari konflik internal Keraton Surakarta. Keberpihakan Sunan Paku Buwono II terhadap VOC mengecewakan para pembesar keraton lainnya. Pangeran Tepasana dieksekusi karena tuduhan memberontak melawan sunan. Raden Mas Garendi (putra Pangeran Mangkunegoro), adik Paku Buwono II bersama Pangeran Wiramenggala melarikan diri menuju Semarang. Mereka ditahan oleh pasukan Tionghoa ketika tiba di dekat Terboyo, kemudian Raden Mas Garendi tinggal bersama Tan Sin Ko atau Singseh.⁵ Raden Mas Garendi berniat untuk melakukan pemberontakan terhadap VOC dan juga keraton.

Pemberontakan Raden Mas Garendi banyak dibantu oleh pasukan Tionghoa (pasukan kuning) yang datang dari Semarang. Pasukan Tionghoa ini adalah orang-orang Batavia yang hendak dipulangkan ke Tiongkok karena tingginya populasi Tionghoa di Batavia. Meningkatnya populasi Tionghoa di Batavia telah menyebabkan kota menjadi kumuh karena tingkat pengangguran yang tinggi. Populasi yang tinggi ini menyebabkan munculnya gerombolan-gerombolan di kalangan etnis Tionghoa. Batavia menjadi tidak aman dan seringkali terjadi kerusuhan. Peristiwa ini berujung pada pembantaian terhadap etnis Tionghoa pada tahun 1740.⁶ Sebagian yang selamat diangkut ke kapal-kapal menuju ke Ceylon (Sri Lanka) dan Afrika Selatan, namun dalam perjalanan

⁵ Ayu Windy Kinasih, *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2005), hlm. 87.

⁶ Pembantaian di Batavia berlangsung selama tiga hari yaitu pada tanggal 8-10 Oktober dan menyebabkan sekitar 10.000 orang Tionghoa meninggal dalam peristiwa tersebut. Lihat Colin Brown, *A Short History of Indonesia*, (Singapore: South Wind Productions, 2003), hlm. 61.

mereka diturunkan di Semarang dan banyak yang dibuang di laut.⁷ Sedikit dari mereka yang tersisa dan sempat melarikan diri dan menjadi pasukan kuning. Pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Garendi dan pasukan Tionghoa menyebabkan peristiwa yang dikenal dengan nama *geger pecinan* atau disebut dengan Bedah Kartasura, aksi perusakan oleh pasukan Tionghoa.⁸

Akibat peristiwa itu pusat kerajaan dipindahkan dari Kartasura ke Solo (sebuah desa dekat Bengawan Solo). Solo sendiri merupakan desa yang dahulu terdapat banyak pohon Solo (pinus merkusi). Pujangga R. Yosodipuro dan petinggi kerajaan Kartasura bertemu dengan suatu daerah bernama Desa Solo, pemilik sekaligus penguasanya yaitu Kiai Gedhe Solo. Solo telah menjadi desa yang penting karena di timur desa terdapat sungai besar yang panjang bernama Bengawan Solo (Bengawan Beton).⁹

Berakhirnya *geger pecinan* pada tahun 1745 mengharuskan Paku Buwono II melakukan pemindahan pusat kerajaan ke wilayah baru yang kemudian diberi nama Surakarta Hadiningrat. Menurut J. Brandes, nama Surakarta ternyata merupakan nama varian dari Jakarta yang pada masa lalu disebut Jayakarta.

⁷ Djakariah, *Sejarah Indonesia II*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 114.

⁸ Ada seorang Tionghoa tukang toko yang kurus kering bernama Cik Kim Lo melapor kepada kumpeni bahwa yang memimpin orang-orang Tionghoa melawan kumpeni itu bernama Sepanjang. Tionghoa kurus ini merasa bisa makan di Betawi (Batavia) karena kewibawaan kumpeni. Atas laporannya itu, Cik Kim Lo mendapat hadiah 80 dinar dari kumpeni. Lihat Moelyono Sastronaryatmo, *Babad Pacina I*, (Jakarta: Depdikbud Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1981), hlm. 17.

⁹ Kastoyo Ramelan, *Sinuhun Paku Buwono X: Pejuang dari Surakarta Hadiningrat*, (Bandung: Jiehan Institute, 2004), hlm. 43-44.

Surakarta berasal dari gabungan kata *sura* yang berarti berani, dan *karta* yang berarti sejahtera. Nama Surakarta yang dipakai untuk nama keraton yang baru dimaksudkan sebagai retisi atau imbingan dari Jakarta atau Jayakarta. Sebab Paku Buwono II memang mendambakan pusat kerajaan nantinya setara dengan Jakarta (Batavia) yang dapat berkembang dengan pesat terutama pada saat VOC menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan. Berdasarkan alasan itulah, maka Paku Buwono II tidak lagi memakai nama Kartasura lagi bagi keratonnya yang baru itu, yang ternyata tidak membawa keberuntungan, melainkan nama Surakarta sebagai imbingan nama Jakarta.¹⁰

VOC dinyatakan bubar dan digantikan oleh Belanda. Belanda mulai menancapkan kekuasaannya, yang mana setiap patih yang bekerja di kerajaan otomatis bekerja pada Belanda. Surakarta terpecah menjadi Kasunanan dan Mangkunegaran, yang disebabkan oleh pemberontakan yang dilakukan Raden Mas Said (Pangeran Sambernyowo) yang dibantu oleh Pangeran Mangkubumi (adik Paku Buwono II), kemudian disepakati Perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret 1757.¹¹

Surakarta menjadi kedudukan bagi Kasunanan dan Mangkunegaran serta kantor residen Belanda yang terletak di tengah Kota Surakarta. Jika dilihat dari segi etnis dapat dilihat bahwa secara keseluruhan komposisi penduduk Surakarta

¹⁰ Dwi Ratna Nurhajarini, dkk., *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*, (Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), hlm. 8.

¹¹ Purwadi, *Babad Giyanti: Sejarah Pembagian Kerajaan Jawa*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2008), hlm. 26.

dapat dikatakan homogen. Surakarta terdiri dari beberapa etnis yang tinggal menetap. Mereka terdiri dari golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Perkampungan Eropa terletak di sekitar rumah residen, perkantoran gereja, toko-toko, gedung-gedung sekolah. Perkampungan Eropa biasanya selalu berada di pusat kota atau pusat pemerintahan.¹² Perkampungan Eropa yang terletak di luar Benteng Vastenburg disebut Loji Wetan, karena bangunannya berbentuk loji yang menggunakan bahan batu bata. Hunian orang Tionghoa dipusatkan di sekitar Pasar Gede, untuk daerah permukiman orang Arab terletak di daerah Pasar Kliwon dan Kedung Lumbu, sedangkan untuk masyarakat pribumi terpencar di seluruh kota.¹³

Tabel 2
Sebaran Wilayah Tempat Tinggal Etnis-Etnis di Surakarta

| Etnis | Wilayah Tinggal |
|--------------|---|
| Jawa/pribumi | Tersebar di seluruh kota, merupakan etnis mayoritas |
| Tionghoa | Daerah Pasar Gede, Balong, Kecamatan Jebres |
| Arab | Kecamatan Pasar Kliwon |
| Eropa | Loji Wetan |

Sumber: Ayu Windy Kinasih, *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2005), hlm. 68.

Orang-orang Tionghoa diijinkan bermukim di Kota Surakarta sebagai ibukota baru yang dipindahkan dari pusat pemerintahan lama Kartasura. Mereka diberi tempat oleh sunan untuk tinggal di sebelah utara Sungai Pepe sekitar Pasar

¹² Antoine Cabaton, *Jawa, Sumatra, dan Kepulauan Lain di Hindia Belanda*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 85.

¹³ Iwan Santosa, *Legiun Mangkunegaran (1808-1942)*, (Jakarta: Kompas, 2011), hlm. 17.

Gede¹⁴ ke timur di Ketandan hingga Limalasan, ke utara sampai di Balong. permukiman Tionghoa terletak di timur laut kraton atau sebelah utara permukiman orang-orang Eropa. Selain itu mereka juga diijinkan untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi.

Penunjukan tempat-tempat orang Tionghoa di lokasi yang terletak di sentra aktivitas tersebut bisa dikaitkan dengan kepentingan penguasa pribumi untuk mengembangkan sistem ekonomi swadaya. Pada saat itu Sungai Pepe masih digunakan sebagai sarana perdagangan dengan perahu-perahu sungai yang membawa barang dagangan dari daerah arus Sungai Bengawan Solo dari Gresik, Tuban ke Ngawi, Madiun dan Surakarta untuk kemudian dibongkar dan dibawa ke Pasar Gede.¹⁵

Pada tahun 1920, jumlah penduduk di Kota Surakarta mencapai 134.000 orang termasuk penduduk Eropa, Tionghoa, Indo, dan Arab. Jumlah penduduk Eropa dan Indo sebanyak 5.000 orang dan setengahnya tinggal di kota. Orang Tionghoa berjumlah 14.000 dan 8.000 di antaranya tinggal di kota. Orang Arab berjumlah 800 orang dan semuanya tinggal di kota. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk Arab, Indo, Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing lainnya berjumlah 10% dari total penduduk yang mayoritasnya adalah pribumi.¹⁶

¹⁴ Lihat R.M. Ng. Tiknopranoto dan R. Mardisuwignyo, *Sejarah Kutha Sala: Kraton Sala, Bengawan Sala, Gunung Lawu*, (Sala: Toko Buku Pelajar, 1980), hlm. 52

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

¹⁶ Ayu Windy Kinasih, *op.cit.*, hlm. 66.

Tabel 3
Penduduk di Surakarta pada Tahun 1930

| Surakarta | Mangkunegaran | Kasunanan | Total |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Luas dalam km ² | 2.751,0 | 3.288,0 | 6.039,0 |
| Bangsa Eropa | 5.235 | 1.270 | 6.555 |
| Pribumi | 892.283 | 1.643.311 | 2.535.594 |
| Tionghoa | 4.192 | 17.032 | 21.224 |
| Timur Asing lainnya | 73 | 1.402 | 1.475 |
| Total penduduk | 897.818 | 1.667.030 | 2.564.848 |

Sumber: George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. xvii.

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk Tionghoa di Surakarta pada tahun 1930 berjumlah 21.224 orang yang dibagi menjadi ke dalam wilayah Mangkunegaran sebanyak 4.192 orang dan Kasunanan sebanyak 17.032.

2. Keragaman Asal Usul

Secara fisik orang-orang Tionghoa terlihat sama dan mudah untuk dibedakan dari etnis lain, namun sebenarnya orang-orang Tionghoa di Surakarta terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki perbedaan. Para imigran dari negeri Tiongkok ini bukan berasal dari satu kelompok suku bangsa, melainkan terdiri dari berbagai suku bangsa dan daerah yang berbeda. Para imigran Tionghoa kebanyakan berasal dari Propinsi Fukien dan Kwangtung di Pantai Selatan dan Tenggara yang merupakan daerah padat penduduk. Mereka membawa kebudayaan suku bangsanya sendiri-sendiri bersamaan dengan perbedaan bahasanya. Ada empat suku bangsa Tionghoa di Indonesia yaitu Hokkian, Hakka, Theo Chiu, dan Kanton.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 88.

1. Suku Hokkian

Suku Hokkian berasal dari propinsi Fukien di negara Tiongkok. Suku ini merupakan nenek moyang dari Tiongkok rantau atau *hoakiau* dan saudagar dagang yang mahsyur. Suku Hokkian adalah orang Tionghoa yang pertama kali bermukim di Indonesia dalam jumlah yang besar, dan mereka merupakan golongan terbesar yang memasuki Pulau Jawa pada abad ke-19.¹⁸ Mereka kebanyakan tinggal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di pantai Barat Sumatra. Suku Hokkian yang tinggal terbagi dalam beberapa sub suku yaitu sebagai berikut:

a. Ming Ang

Banyak yang tinggal di Selatan Surakarta. Sub suku ini memilih mata pencaharian sebagai seorang petani sawah, kebun-kebun teh dan palawija. Suku ini merupakan yang pertama kali menjadi golongan peranakan.

b. Hok Chia

Sub suku ini menyebar merata di Surakarta. Sub suku ini menguasai perekonomian. Suku ini memiliki mata pencaharian dalam sektor vital di bidang pengusaha batik dan tekstil, distribusi pemasaran serta industri manufaktur lain.

c. Heng Hua

Banyak dijumpai di Kemlayan. Sub suku ini memiliki mata pencaharian dalam bidang otomotif, bengkel motor, dan suku cadang lainnya.

¹⁸ Mely G. Tan, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Gramedia, 1979), hlm. 7.

d. Hok Chiu

Sub suku ini berasal dari wilayah Beijing, mereka terkenal sebagai seorang pedagang dan pengusaha emas. Oleh karena itu di Surakarta usaha mereka tidak jauh dari usaha dagang logam mulia dengan membuka toko emas di sepanjang Coyudan, Pasar Klewer. Selain berdagang emas mereka juga berjualan barang-barang antik.¹⁹

2. Suku Theo Chiu

Mereka berasal dari pedalaman Swatow dan sepanjang pantai Barat Daya kota pelabuhan di Tiongkok. Kelompok Theo Chiu pada awal datang ke Indonesia merupakan pekerja tambang-tambang dan perkebunan pemerintah Belanda. Secara tradisional bidang spesialisasi mereka adalah pertanian, bahkan sampai sekarang di antara mereka masih banyak yang berkecimpung dalam bidang sayur mayur dan pertanian komersial lainnya. Beberapa tahun selanjutnya mereka mulai menunjukkan kemajuan yang pesat dalam segala bidang perdagangan dan di banyak daerah yang sedikit orang Hokkiannya, orang Theo Chiu menguasai perdagangan. Mereka sebagian besar terdapat di luar Jawa, di sepanjang pantai Timur Sumatra, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat terutama Pontianak.

3. Suku Hakka atau Khek

Suku ini termasuk golongan bangsa Tionghoa yang paling banyak merantau keluar negeri. Mereka berasal dari pedalaman Kwangtung dan memiliki keahlian dalam bidang pertambangan. Kelompok suku Hakka merupakan keturunan dari suku Han yang menyebar ke seluruh dunia. Mereka memiliki ciri

¹⁹ Ayu Windy Kinasih, *op.cit.*, hlm. 90-91.

khas kebudayaan mengecilkan kaki dengan menggunakan sepatu khusus yang membuat kaki orang-orang Hakka selalu tertekuk sehingga cara mereka berjalan berbeda dengan orang lainnya. Hal ini digunakan sebagai lambang kenengratan seorang perempuan Hakka. Selama gelombang perpindahan yang besar dari tahun 1850-1930, orang-orang Hakka merupakan imigran yang paling melarat dari Tiongkok.²⁰ Suku bangsa Hakka ini banyak bermukim di Kalimantan Barat, pada akhir abad ke-19 mereka mulai berdatangan di Jawa Barat.

4. Suku Kanton

Mereka berasal dari Kwangtung yang berdomisili di delta raya sungai Mutiara atau sungai barat, Tiongkok. Seperti juga orang Hakka, orang Kanton terkenal sebagai pekerja tambang. Perpindahan mereka pada abad ke-19 kebanyakan ditujukan ke pertambangan. Umumnya, di Jawa mereka datang dengan modal yang lebih besar dan juga keterampilan yang luar biasa untuk bertukang dan berusaha dalam bidang industri.²¹ Orang Kanton terkenal sebagai tukang yang terampil. Mereka memanfaatkan hubungan yang erat antara daerahnya untuk memperoleh rahasia permesinan Barat dan keberhasilan usaha industri.²² Orang Kanton menempatkan dirinya sebagai tukang-tukang yang mahir, pekerja mesin, pemilik toko besi atau industri kecil di samping perannya sebagai pengurus restoran atau hotel, bidang usaha mereka yang terkenal di negara-negara Barat.

²⁰ Bakti Syamsudin, "Eksistensi Etnis Tionghoa di Surakarta pada Masa Orde Lama 1945-1965", *Skripsi*, (Yogyakarta: FIS UNY, 2014), hlm. 25.

²¹ Mely G. Tan, *op.cit.*, hlm. 8.

²² *Ibid.*

Orang-orang Tionghoa dari suku Hokkian jumlahnya paling besar dibandingkan dengan suku bangsa lainnya. Di antaranya, 45% orang Hokkian (554.981 jiwa), 16% orang Hakka (200.736 jiwa), 11% orang Kanton (136.130 jiwa), 7% orang Theo Chiu (87.812 jiwa), dan sisanya terdiri dari beberapa suku bangsa lain yang masing-masing jumlahnya tidak sangat banyak. Kecuali orang Hokkian, sebagian besar orang Tionghoa berada di luar Pulau Jawa dan Madura.

B. Golongan *Totok* dan Peranakan

Masyarakat Tionghoa di Surakarta juga seperti yang tinggal di kota-kota lain, golongan Tionghoa dibagi menjadi dua golongan yaitu *totok* dan peranakan. Jumlah Tionghoa peranakan di Jawa lebih besar dibandingkan dengan *totok*. Jumlah ini berbanding terbalik dengan situasi di luar Jawa, terutama di wilayah pertambangan yang disebabkan oleh banyak faktor seperti lama tinggal, sifat kedatangan, kondisi alam, dan komposisi penduduk. Gelombang pertama imigran sebagian besar adalah laki-laki. Mereka kemudian menikah dengan wanita pribumi, melahirkan keturunan campuran yang dikenal dengan sebutan Tionghoa peranakan.

a. *Totok*

Yusiu Liem mengatakan bahwa Tionghoa *totok* disebut juga *sing-kek* (pendatang baru) yaitu orang-orang Tionghoa sebagai migran ke Indonesia.²³ Para pendatang baru tersebut terdiri dari beberapa suku bangsa. Perbedaan suku bangsa

²³ Yusiu Liem, *Prasangka terhadap Orang-Orang Cina*, (Jakarta: Jambatan, 2000), hlm. 10.

ini membawa perbedaan pada bahasa asli mereka, sehingga belum tentu sesama pendatang dapat berkomunikasi dengan baik. Umumnya orang-orang Tionghoa *totok* masih tetap berpegang pada ikatan budaya leluhurnya serta berorientasi ke budaya yang ada di negerinya.

Tionghoa *totok* masih memegang teguh kebudayaan dan adat-istiadat leluhurnya, dan menggunakan bahasa Tionghoa.²⁴ Hal itu disebabkan karena mereka masih menggunakan bahasa asli sebagai bahasa ibu di lingkungan keluarga dan sesama orang Tionghoa yang satu suku. Pemakaian bahasa asli oleh orang-orang Tionghoa dengan sendirinya sudah menyatakan suatu identitas orang Tionghoa yang terpisah. Masyarakat Tionghoa *totok* masih tetap mempertahankan keyakinannya pada kepercayaan tradisionalnya yaitu Taoisme, Konfusianisme, dan Budhisme. Ketiga kepercayaan ini disebut *Sam-Kao* (tiga agama).²⁵

Ada tanda fisik yang menunjukkan golongan Tionghoa *totok* laki-laki pada masa itu, yaitu masih menggunakan dan memelihara kuncir panjang yang dikepang rapi dan dililit dengan pita merah. Ketampanan laki-laki Tionghoa ditentukan oleh panjang rambutnya.²⁶ Pakaian yang mereka kenakan adalah baju panjang dengan lengan lebar dan celana panjang longgar yang biasanya berwarna hitam atau gelap. Baju itu panjang seperti rok perempuan dan tertutup rapat di leher.

²⁴ Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta (1895-1998)*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 68.

²⁵ Yusu Liem, *Ibid.*

²⁶ Frieda Amran, *Batavia: Kisah Kapten Woodes Rogers dan Dr. Strehler*, (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 63.

Perempuan Tionghoa *totok* memakai pakaian *pekki* yang terdiri dari baju kurung panjang, celana longgar, dan berselop. Kaki perempuan *totok* biasanya kecil, sebab sudah menjadi tradisi bagi mereka, kaki bayi perempuan dimasukkan dalam bambu. Keluarga Tionghoa *totok* sangat memperhatikan pendidikan budaya leluhur, sehingga mereka lebih suka memasukkan anak-anak mereka ke sekolah khusus Tionghoa. Diharapkan anak-anak mereka tidak akan terpengaruh adat dan budaya masyarakat setempat.

Sebagai kelompok masyarakat asing, orang-orang Tionghoa dilarang menghilangkan ciri khas dan tanda fisik yang melekat pada dirinya. Kunci panjang (*thauwcang*) yang dikepang rapi dan dililit dengan pita merah harus tetap dipelihara, dan pakaian yang dikenakan adalah pakaian khas Tionghoa. Merupakan pelanggaran kriminal jika mereka tampil di depan umum dengan menggunakan pakaian lain. Ada sebuah artikel yang diambil dari harian lokal mengenai hukuman yang dikenakan jika seorang Tionghoa membuang kuncirnya

Hoekoeman Menjalin Bangsa

Barang siapa jang berani menjalin bangsa, merobah sipat bangsanja, maka ialah terantjem hoekoeman politie rol, sebab tertoeoeh hendak mentjemarkan diri ... Tetapi heranlah soedah seringkali kedjadian, apabila orang Tjina boewang tauwtjangnya masoek Agama Islam, tidak boleh loepoet hoekoeman politie rol kasi hoekoeman krakal doea belas hari, atawa lebih ... Orang-orang Tjina pertandaan dari tauwyjangnja; orang-orang Olanda pertandaan dari topo sepatoenja; orang-orang Islam pertandaan dari setangan kepala dan trompanja dan orang-orang Arab oedang-oedangnja, tetapi kenapa orang-orang Tjina sadja jang dihoekoem kaloe ia berani boewang itoe tauwtjangnja?

Entje Ismail²⁷

²⁷ Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 83.

Dari artikel di atas terlihat bahwa orang Tionghoa yang masuk agama Islam dan menggunting *thauwcangnya* seringkali luput dari hukuman. Hal tersebut tampaknya menimbulkan kecemburuan. Selain itu, dalam artikel ini juga terlihat kesenjangan dalam pelaksanaan hukuman bagi orang-orang Tionghoa.

Mengenai kehidupannya, golongan *totok* lebih suka bekerja untuk dirinya sendiri dan sebagian besar berkecimpung dalam bidang usaha. *Totok* lebih menghargai kekayaan, kehematan, kerja, kepercayaan pada diri sendiri dan keberanian. Di kota besar atau kecil di Jawa, golongan *totok* berkumpul di daerah pusat perdagangan, dengan ciri khas tinggal di rumah-rumah yang merupakan toko dan sekaligus juga tempat tinggal seperti yang juga terdapat di kota-kota Tiongkok Tenggara.

b. Peranakan

Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya sudah berbaur.²⁸ Menurut kenyataannya yang disebut peranakan adalah pertama, mereka yang dilahirkan dari seorang ibu dan ayah dari Tiongkok dan lahir di Hindia Belanda. Dalam ketentuan hukum kolonial Belanda, mereka masuk sebagai *Onderdaan* Belanda (kawula Belanda). Kedua, mereka yang lahir dari perkawinan campuran yaitu laki-laki Tionghoa dan wanita pribumi. Sebagai anak yang diakui secara sah oleh ayahnya dan didaftarkan sebagai anak sah ayahnya dengan diberi nama keluarga (She). Ketiga, mereka yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara ayah pribumi dan ibu Tionghoa, dan karena pengaruh keadaan sosial dan ekonomi diberi nama keluarga (She) dan mendapat

²⁸ Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002), hlm. 17.

pendidikan di dalam lingkungan Tionghoa. Dapat disimpulkan bahwa peranakan yaitu orang-orang Tionghoa yang hidup beberapa generasi di Indonesia dan menikah dengan orang pribumi.

Peranakan sudah lama tinggal di Indonesia, sudah berbaur dengan masyarakat pribumi, berbahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat, dan berperilaku seperti pribumi. Golongan peranakan di Surakarta tinggal di perkampungan-perkampungan dalam kota. Mereka hidup berdampingan dengan kelompok pribumi Jawa dan menjalin hubungan yang baik dalam kehidupan sosial mereka, karena mereka menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, maka orang Tionghoa peranakan tersebut banyak yang mengikuti organisasi masyarakat sekitar, terutama dengan orang pribumi.

Kehidupan kaum peranakan lebih terbuka dan lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat setempat. Golongan peranakan di Surakarta masih menggunakan kuncir panjang. Hal ini disebabkan pola pendidikan yang mereka terima dan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa Belanda. Golongan peranakan, terutama para pemuda lebih sering mengenakan pakaian model Barat dengan pantalon dan kemeja membedakan mereka dari Tionghoa *totok*. Gaya berpakaian inilah yang membedakan mereka dari Tionghoa *totok*. Bahkan banyak pemuda Tionghoa peranakan yang terpengaruh oleh budaya Belanda. Mereka lebih menyukai nama-nama panggilan Belanda seperti Wim, Carel, dan Bob dari pada nama Tionghoa. Golongan peranakan tidak lagi dapat berbahasa Tiongkok. Mereka lebih sering berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Belanda, Inggris atau Melayu. Kondisi demikian membuat posisi mereka sangat dilematis

dan seringkali membuat mereka bimbang memilih identitas, untuk masuk dan menyatakan diri sebagai Tionghoa kadang mereka tidak diterima, dan untuk menjadi pribumi mereka merasa menjadi rendah karena harus menempati lapisan ketiga.

Adaptasi dan pendidikan modern diperoleh golongan peranakan Tionghoa membawa pengaruh pada pekerjaan. Mereka lebih suka mencari pekerjaan yang bervariasi dan tidak terbatas pada bidang perdagangan saja. Dengan kata lain peranakan lebih beraneka ragam bidang pekerjaannya, menunjukkan bahwa mereka suka pekerjaan kejuruan dan pekerjaan administrasi atau staf di perusahaan-perusahaan besar. Peranakan lebih menghargai penikmatan hidup, waktu senggang, kedudukan sosial dan perasaan terjamin daripada golongan *totok*.

Kalangan peranakan secara proporsional lebih banyak keluarga yang melakukan upacara pemujaan leluhur dan juga lebih teratur waktunya, suatu kenyataan yang membenarkan bahwa di kalangan *totok* kekeluargaan tradisional semakin kurang dipentingkan dan sekularisasi lebih besar. Dilihat dari sudut kegiatan dan penilaian diri, kaum muda peranakan lebih taat kepada agama. Meskipun imigran kelahiran Tiongkok cenderung menjadi orang yang taat beribadah di klenteng, namun anak-anak mereka lebih keras menolak pemujaan dewa-dewa dalam agama Tionghoa dibandingkan dengan pemuda-pemuda peranakan.

Golongan Tionghoa peranakan juga lebih terbuka dalam hal menerima pengaruh kebudayaan, agama, dan kepercayaan setempat. Hal ini terjadi karena

mereka tidak terlalu fanatik memegang ajaran leluhur. Akibatnya lambat laun dan tanpa mereka sadari, mereka telah melahirkan sebuah kebudayaan baru yang memadukan unsur kebudayaan Tionghoa dengan pribumi maupun dengan unsur kebudayaan asing lainnya, yang membuat identitas mereka berbeda sendiri. Meskipun demikian, golongan peranakan sebenarnya bukan merupakan golongan ras seperti orang Tionghoa *totok*.

Ada juga yang mengatakan bahwa kebanyakan orang Tionghoa memiliki identitas ganda. Mereka tetap mengidentifikasikan dirinya dengan tempat dimana mereka tinggal, tetapi mereka juga sadar bahwa mereka orang Tionghoa. Munculnya golongan *totok* disebabkan oleh perkembangan politik di negeri Tiongkok yaitu dicabutnya peraturan dari Dinasti Manchu tahun 1860 yang memperbolehkan orang-orang Tionghoa keluar dari negara Tiongkok. Selain itu juga karena adanya kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar di wilayah Hindia Belanda akibat pembukaan daerah-daerah perkebunan, sehingga memberi peluang kerja yang cukup besar.

Ada perbedaan kultural yang cukup signifikan antara kedua golongan tersebut, sehingga hal itu menjadikan sebuah kesenjangan dalam kehidupan sosial masyarakat dan juga politik di antara keduanya. Akar perbedaan itu karena adat istiadat dan tingkah laku. Orang-orang peranakan mengecam orang-orang *totok* sebagai orang-orang yang pelit. Sedangkan golongan *totok* mengecam golongan peranakan sebagai orang-orang yang malas dan tidak bisa berbahasa Tionghoa. Golongan *totok* juga menganggap kaum peranakan sebagai orang-orang yang

kedudukannya lebih rendah, karena memiliki darah campuran sehingga mereka tidak pantas lagi berada dalam kelompok etnis Tionghoa.

Menurut hukum kolonial, hak orang-orang Tionghoa peranan sebagai warga negara lebih besar daripada orang-orang *totok*.²⁹ Masyarakat Tionghoa *totok* datang belakangan, mereka datang dengan menumpang kapal dagang dan mengajak keluarga mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tanah perantauan. Dengan menumpang kapal-kapal dagang tersebut, mereka kemudian mendirikan kelompok-kelompok permukiman baru.

Tabel 4
Klasifikasi Penduduk Tionghoa Peranakan dan *Totok*
di Karesidenan Surakarta Tahun 1930

| Surakarta | Laki-Laki | | Total | Perempuan | | Total |
|-----------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|-------|
| | Peranakan | <i>Totok</i> | | Peranakan | <i>Totok</i> | |
| Jumlah | 8.219 | 3.020 | 11.299 | 9.255 | 595 | 9.928 |
| Total | 17.474 | 3.615 | 21.227 | - | - | - |

Sumber: Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta (1895-1998)*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 69.

Dari tabel di atas, pada tahun 1930, jumlah orang-orang Tionghoa peranan di Karesidenan Surakarta sekitar 17.474 orang yang lebih banyak dari golongan *totok* yang hanya sekitar 3.615 orang. Jumlah kaum perempuan Tionghoa peranan 9.255 orang yang berarti lebih banyak daripada jumlah kaum lelakinya yang hanya 8.219 orang. Jumlah kaum perempuan Tionghoa *totok* hanya 595 orang yang berarti lebih sedikit daripada jumlah kaum lelakinya yang sekitar 3.020 orang. Dengan melihat data tersebut, besar kemungkinan banyak laki-laki

²⁹ Rustopo, *op.cit.*, hlm. 68-69.

totok yang menikah dengan perempuan Tionghoa peranakan atau pribumi. Misalnya pengusaha batik Tjan Khay Sing, kakek Go Tik Swan³⁰ yang menikah dengan perempuan Tionghoa peranakan.



³⁰ Go Tik Swan adalah keturunan Tionghoa yang sejak masa kecil sudah menjadi Jawa, senantiasa berdialog dan melebur ke dalam nilai, simbol, dan idiom-idiom Jawa. Ia bukan orang pertama yang diangkat sebagai abdi dalem keraton, tetapi dialah orang Tionghoa pertama yang memperoleh anugerah derajat tertinggi keraton, yaitu sebagai Panembahan Hardjonagoro. Lihat Rustopo, *Jawa Sejati: Otobiografi Go Tik Swan Hardjonagoro*, (Yogyakarta: Ombak, 2008), hlm. 12.

BAB III

PERMUKIMAN ETNIS TIONGHOA DI SURAKARTA

A. Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, orang Tionghoa bersama orang-orang Arab secara hukum digolongkan sebagai orang Timur Asing dengan implikasi bahwa hukum yang diberlakukan bukan hukum Belanda atau hukum adat yang berlaku dalam hukum pribumi. Dampaknya adalah bahwa orang-orang Tionghoa tidak tergolong sebagai orang Belanda dan tidak tergolong pula sebagai orang pribumi. Orang-orang Tionghoa adalah orang Asing dari Timur. Hukum yang diberlakukan pun tidak jelas, bahkan ada yang dikenakan sesuai dengan yang diberlakukan terhadap orang-orang Belanda yang sangat menguntungkan dalam lapangan ekonomi dan penguasaan sumber-sumber ekonomi penting lainnya.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda bagi golongan Tionghoa di Surakarta, yang sebagian bahkan seluruhnya dikeluarkan pada tahun-tahun akhir abad ke-19 bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya terjadi serangkaian peristiwa yang melibatkan penduduk Tionghoa. Selain itu, penduduk Tionghoa cenderung hidup mengelompok, menggunakan tanda fisik yang khas, dan lain-lain. Aturan pemerintah Hindia Belanda dengan tegas membagi status sosial warga negara menjadi tiga golongan yaitu sebagai berikut:

1. Bangsa kulit putih (orang-orang Eropa) yang diberi hak dan perlakuan yang paling baik.

2. Bangsa asing kulit berwarna (Timur Asing), mendapatkan kedudukan tingkat dua.
3. Bangsa pribumi yang menduduki tingkat sosial paling rendah.¹

Bangsa kulit putih mendapatkan hak dan perlakuan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan golongan yang lain. Orang kulit putih mendapatkan jaminan sosial yang lebih baik daripada golongan yang lain. Posisi kedua dalam status sosial masyarakat Hindia Belanda ditempati oleh golongan Timur Asing. Dalam bidang hukum dagang dan hukum perdata, mereka disamakan dengan bangsa kulit putih. Kebijakan ini dimaksudkan agar para pedagang Eropa dapat memiliki kepastian hukum dalam mengadakan jual beli besar-besaran dengan pedagang non pribumi yang terdiri dari orang-orang Tionghoa.²

Sesuai kebijakan pemerintah kolonial, etnis-etnis pendatang diharuskan tinggal dalam kantong-kantong wilayah tempat tinggal yang khusus. Model segregasi kolonial untuk mempermudah mengelola penduduk sekaligus melakukan adu domba adalah dengan pengkastaan golongan Eropa, Timur Asing, pribumi, dan mengkotak-kotakkan tiga golongan penduduk dalam wilayah-wilayah tempat tinggal yang terpisah.³ Belanda melakukan segregasi sebagai kebijakan yang berlaku di seluruh Indonesia. Di kota-kota lain seperti Semarang,

¹ W. D. Soekisman, *Masalah Cina di Indonesia*, (Jakarta: Bangun Indah, 1975), hlm. 38.

² Pada tahun 1855, sebagian besar transaksi perdagangan orang-orang Tionghoa ditempatkan di bawah hukum perdata Eropa (*Europe code*), ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kedudukan yang lebih tinggi dari penduduk pribumi.

³ Mely G Tan, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Gramedia, 1979), hlm. 4.

Jakarta, Surabaya, Magelang, dan lain sebagainya masih bisa dilihat keberadaan permukiman orang-orang Tionghoa atau pecinan. Mereka ditempatkan dalam *geto-geto* yang terpisah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya politik pemerintahan kolonial untuk melakukan mekanisme kontrol karena ketakutan akan bangkitnya kesadaran kolektif antar etnis. Segregasi semacam ini menjadi alat untuk mempraktikkan politik adu domba (*divide et impera*).

Peraturan mengenai kampung pecinan pada awalnya adalah untuk melindungi mereka dari sentimen-sentimen anti Tionghoa dan untuk menghindari pemberontakan atau perlawanan orang-orang Tionghoa terhadap pemerintah VOC. Pada abad ke-19, peraturan yang mengharuskan orang Tionghoa tinggal di kampung-kampung tersendiri memiliki alasan yang berbeda. Menurut *Staatblad* tahun 1835 No. 37 dinyatakan bahwa sebab pertama pemisahan kampung Tionghoa itu adalah untuk menghindari tercampurnya berbagai bangsa di Jawa.⁴ Mulai tahun itu, pelaksanaan peraturan kampung Tionghoa diperkeras.

Diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa juga terlihat dengan adanya kebijakan penetapan tempat tinggal, surat jalan dan Undang-Undang Agraria yang sengaja diciptakan untuk mempertajam perbedaan antar golongan di masyarakat Hindia Belanda. Kebijakan-kebijakan itu dibuat untuk menghalang-halangi adanya asimilasi antar etnis. Pemusatan orang-orang Tionghoa di tempat-tempat tertentu juga akan memudahkan pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan pengawasan terhadap mereka. Alasan lain penetapan tempat tinggal terhadap orang-orang Tionghoa adalah semakin menurunnya kesejahteraan hidup orang-

⁴ Lihat lampiran 8, hlm. 114.

orang pribumi pada abad ke-19. Penguasa Belanda mengurangi peranan lintah darat Tionghoa dengan mengadakan fasilitas kredit pemerintah dan memaksakan diberlakukannya sistem surat jalan dan sistem permukiman khusus bagi orang Tionghoa yang menyebabkan kesulitan besar bagi mereka.⁵

Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan beberapa aturan yang berusaha membatasi ruang gerak orang-orang Tionghoa. Menurut Skinner, kebijakan yang setengah-setengah itu sebagai cerminan dari kebijakan yang tidak menentu.⁶ Dalam aturan kependudukan dan aturan pelanggaran, orang-orang Tionghoa selalu diberlakukan hukum yang tidak menentu, ada yang memakai hukum pribumi dan ada yang memakai hukum Belanda. Orang-orang Tionghoa selama ratusan tahun tinggal di daerah perkotaan dengan penetapan yang jelas dan harus dengan izin. Akan tetapi, pada kenyataannya orang-orang Tionghoa tetap saja bebas hingga ke pedesaan untuk mencari barang dagangan.⁷

Status orang Tionghoa yang diatur oleh pemerintah Hindia Belanda dapat dilihat pada penetapan surat izin tinggal (*wijkenstelsel*) dan dalam hal penetapan surat izin jalan (*passenstelsel*), Undang-Undang Agraria yang sengaja diciptakan untuk mempertajam perbedaan antar golongan masyarakat Hindia Belanda. Berikut ini akan dijelaskan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda:

⁵ Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 212.

⁶ Mely G. Tan, *op.cit.*, hlm. 5.

⁷ Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 21.

1. *Wijkenstelsel*

Wijk artinya kampung atau permukiman tertentu dalam kota besar atau kecil, sehingga *wijkenstelsel* berarti sistem perkampungan.⁸ Di Surakarta sistem perkampungan pada masa kolonial ini dapat dilihat dengan adanya pecinan. Setiap kota besar mempunyai kampung pecinan sendiri, yaitu bagian kota-kota tua yang hampir seluruhnya terdiri dari rumah-rumah toko. Kebijakan kolonial Belanda dengan *wijkenstelsel* diterapkan sejak tahun 1834 yang mengharuskan orang-orang Tionghoa untuk tinggal pada zona khusus di daerah-daerah perkotaan yang ditujukan bagi mereka. Peraturan ini mengatur tentang keharusan semua orang-orang Tionghoa tinggal di suatu kawasan khusus yang dinamakan “pecinan”. Peraturan yang lain mengenai zona system juga termuat dalam Undang-Undang pasal 73 *Reegering Reglement* yang berbunyi:

Bangsa Timur Asing yang bertempat tinggal di Hindia Belanda sedapat-dapatnya dikoempoelkan djadi satoe dalam *wijk* sendiri dengan diperintahkan oleh kepala-kepalanya sendiri. Pemberlakuan peraturan ini dimaksudkan agar etnis-etnis Tionghoa ini mudah diawasi dan juga untuk mencegah terjadinya perkembangan sosial dan bercampurnya golongan etnis Tionghoa dengan pribumi. Selain itu juga bertujuan agar pemerintah Belanda lebih leluasa mengeksploitasi perekonomian Hindia Belanda karena tidak selamanya kehadiran etnis Tionghoa menguntungkan pemerintah Belanda.

Bagi orang-orang Tionghoa yang melanggar aturan tersebut dijatuhi hukuman atau denda sebesar 25-100 gulden. Etnis Tionghoa Surakarta ditempatkan di sebelah utara Sungai Pepe sekitar Pasar Gedhe, ke timur di Ketandan hingga Limalasan, ke sebelah utara sampai Warungpelem.

⁸ Windi Astuti, *Peran Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta: Bangun Indah, 2002), hlm. 70.

Kebijakan pemerintah kolonial dengan adanya peraturan *wijkenstelsel* menyebabkan orang-orang Tionghoa menjadi kurang dan bahkan menutup diri dan membentuk golongan tersendiri lengkap dengan kehidupan yang tradisional.⁹ Etnis Tionghoa diharuskan untuk melaksanakan adat istiadat tradisional mereka sehingga tetap mempunyai identitas yang berbeda dengan golongan-golongan lain. Peraturan ini memisahkan orang-orang Tionghoa dengan pribumi, menghalangi adanya persatuan dan asimilasi serta integrasi.

Dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadinya *geger pecinan*, orang-orang Tionghoa di Surakarta lebih ditertibkan dalam hal permukiman. Mereka kemudian diberi tempat yang bebas untuk dihuni dengan batas-batas daerah yang telah ditetapkan. Permukiman khusus bagi orang Tionghoa ini dimaksudkan oleh pemerintah kolonial agar bisa lebih mudah mengawasi aktivitas ekonomi dan segala tindakan sosial etnis tersebut.¹⁰

Tindakan Belanda ini segera diikuti dengan penunjukan para pejabat Tionghoa yang diangkat dari kalangan mereka sendiri.¹¹ Hal serupa juga terjadi di kota-kota menengah lainnya di sepanjang pantai utara Jawa yang dikuasai oleh Belanda. Daerah pecinan biasanya diurus oleh seorang kepala wilayah yang diberi pangkat *Major* atau lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan *Babah Major*. Setiap daerah pecinan selain pangkat *Major* sebagai pangkat tertinggi terdapat

⁹ Windi Astuti, *op. cit.*, hlm. 71.

¹⁰ S. Margana, *Pujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kolonial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 133.

¹¹ Onghokham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 33.

beberapa pangkat di bawahnya yaitu, *Kapitein*, *Luitenant*, dan *Wijk Meester*.¹² Salah satu pemimpin orang-orang Tionghoa di Surakarta yang diangkat menjadi Kapten Tionghoa adalah S.T. Bee yang menggantikan Letnan Tionghoa Be Siau-w Tjong pada 21 Juni 1918. Pemimpin tersebut merupakan pejabat setengah resmi dan diangkat dari kalangan orang Tionghoa yang mempunyai pengaruh dalam masyarakatnya. Para pemimpin orang Tionghoa ini oleh orang Tionghoa sendiri disebut *Kong Koan* (Dewan Opsir Tionghoa). Kata *Kong Koan* berarti kantor dimana para pemimpin tadi bekerja untuk kepentingan orang Tionghoa..¹³

Para pemimpin tersebut mempunyai tugas sebagai perantara yang menghubungkan etnis Tionghoa dengan pemerintah Belanda dalam berbagai keperluan. Mereka bertanggungjawab untuk menyampaikan semua kebutuhan yang diperlukan dari warganya kepada pemerintah Belanda dan sebaliknya menyebarkan keputusan dari pimpinan Belanda yang berhubungan dengan masyarakat Tionghoa kepada warganya. Pejabat Tionghoa yang berada di kampung pecinan ini tidak bisa dianggap sebagai pejabat pimpinan dalam arti birokrat, mengingat mereka tidak digaji dan tidak memiliki wewenang memerintah warganya. Para pejabat Tionghoa tersebut lebih tepatnya bila disebut sebagai koordinator. Daerah pecinan sendiri setiap warganya hanya boleh bergaul dengan masyarakat di dalam lingkungannya sendiri dan diharuskan melaksanakan adat istiadat tradisional Tionghoa sehingga tetap punya identitas sendiri.

¹² M. Hari Mulyadi (et.al), *Runtuhnya Kekuasaan “Keraton Alit”: Studi Radikalisasi Sosial “Wong Sala” dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta*, (Surakarta: LPTP, 1999), hlm. 194.

¹³ Onghokham, *op.cit.*, hlm. 56.

Mekanisme pemilihan opsir Tionghoa menjadi hak sepenuhnya dari warga Tionghoa. Golongan *totok* maupun peranakan mempunyai hak yang sama untuk dicalonkan sebagai opsir Tionghoa. Sebenarnya jika warga Tionghoa mempunyai hak sepenuhnya untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria dan syarat yang mereka tetapkan, maka opsir yang terpilih tentu sesuai dengan kehendak mereka, namun kenyataannya tidaklah demikian. Campur tangan penguasa Belanda tetap berperan dalam menentukan hasil akhir pemilihan. Opsir yang diangkat selalu orang yang sesuai dengan selera penguasa. Kriteria yang biasanya dipakai penguasa Belanda adalah loyalitas dan tingkat sosial ekonominya.

Hasil akhir pemilihan opsir ini seringkali menimbulkan kekecewaan pada warga Tionghoa. Sebuah kekecewaan yang wajar karena sistem ini lebih menguntungkan pihak pemerintah Belanda dan pejabat opsir itu sendiri dari pada kepentingan warga. Jabatan ini diberlakukan turun temurun, artinya jika suatu keluarga opsir Tionghoa dapat mempertahankan kepercayaan pemerintah Belanda terhadap dirinya, jabatan opsir dapat terus dilanjutkan pada keturunannya. Jika pejabat opsir tersebut tidak memenuhi syarat, ia akan digantikan oleh orang lain. Syarat kekayaan diutamakan karena jabatan ini tidak menerima gaji dari pemerintah. Imbalan yang diberikan dalam bentuk hadiah seperti pemberian tanah, kemudahan usaha, persamaan kelas dengan penguasa, serta wibawa di kalangan warga Tionghoa. Sebelum penarikan *pach candu* diambil alih pemerintah pada 1911, opsir Tionghoa mendapat bagian 5 persen. Selain itu, seorang opsir harus selalu siap untuk menyambut tamu pembesar dan pejabat Belanda yang biasanya harus disertai dengan pengadaan pesta besar lengkap

dengan hiburan, minuman, dan wanita penghibur. Semua biaya ditanggung oleh opsir tersebut.

Peraturan-peraturan tentang wilayah tinggal semakin meningkatkan arti penting bandar-bandar pajak pemerintah. Pemerintah kolonial Belanda membebaskan para syahbandar dan pegawai-pegawainya dari kewajiban untuk melaksanakan peraturan kependudukan. Mereka tinggal dan bergerak di luar perkampungan-perkampungan yang sudah ditentukan secara resmi. *Wijkenstelsel* yang dirancang pemerintah kolonial Belanda dimaksudkan untuk memusatkan orang-orang Tionghoa untuk tinggal di wilayah tertentu.

Peraturan-peraturan ini justru memungkinkan orang-orang Tionghoa yang kuat mendapatkan pengaruh yang dominan terhadap masyarakat Tionghoa pada umumnya. Awal abad ke-20, tepatnya sejak tahun 1910, orang-orang Timur Asing diijinkan bertempat tinggal di ibu kota propinsi, karesidenan, kabupaten, kedistrikan, kecamatan, dan tempat-tempat tertentu yang ada pasarnya. Adapun penghapusan sama sekali kewajiban bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dilakukan pada tahun 1918.¹⁴

2. *Passenstelsel*

Pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan tentang peraturan surat izin jalan (*passenstelsel*). *Passenstelsel* membawa orang-orang Tionghoa menuju ke arah kebangkrutan, karena modal tidak dapat berputar dengan lancar, begitu juga dengan para pedagang Eropa karena barang-barangnya tidak dapat didistribusikan. *Passenstelsel* atau sistem surat jalan adalah peraturan

¹⁴ Windi Astuti, *op.cit.*, hlm. 75.

yang mengharuskan orang-orang Timur Asing, terutama orang-orang Tionghoa untuk memiliki surat ijin bepergian atau melakukan usaha perdagangannya. Sistem *passenstelsel* ini dikenakan kepada orang-orang Timur Asing yang melakukan perjalanan keluar daerah atau keluar kota tempat mereka bermukim. Sistem ini merupakan kelanjutan dari kebijakan *wijkenstelsel*.

Passenstelsel merupakan salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka membatasi perluasan pengaruh perdagangan orang-orang Tionghoa. Surat jalan ini digunakan untuk kepentingan bisnis dan jika tidak diperlukan lagi segera dicabut. Dengan adanya surat jalan ini orang Tionghoa dapat dikontrol sedemikian rupa agar tidak bersekongkol dengan etnis lain untuk menentang Belanda.¹⁵

Surat jalan dapat diperoleh yaitu dengan meminta kepada Kapiten Tionghoa atau *Wijk Meester* dengan membayar sejumlah uang dan harus dinyatakan dengan jelas tempat tujuan, naik kendaraan apa, bersama siapa, dan akan tinggal berapa lama. Jika membawa anak harus dijelaskan satu per satu dan jika tidak cocok akan dituntut. Ketika tiba di tempat tujuan, surat jalan tersebut harus diperlihatkan kepada petugas yang berwenang. Biaya memperoleh surat jalan sekitar f. 5 yaitu 10 sen untuk segel dan 40 sen untuk ongkos *jikak* atau juru tulis. Bagi orang yang terbukti tidak memiliki kartu jalan, maka ia akan mendapat hukuman atau denda sebesar 10 gulden. Surat jalan terdiri dari beberapa macam yaitu sebagai berikut:

¹⁵ A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan di Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 250-251.

1. *Louw-ji*, adalah surat jalan untuk pergi dari suatu tempat ke tempat lain.
2. *Pa-sat-ji*, adalah surat jalan untuk mereka yang pergi ke pasar-pasar di desa-desa di luar kota untuk berjualan ketika hari pasar.
3. *Le-sa-ji*, adalah surat jalan yang khusus digunakan oleh mereka yang pekerjaannya pergi ke desa-desa untuk membeli hasil bumi seperti tembakau, padi, dan lain-lain.
4. *Ni-ji*, adalah surat jalan tahunan bagi para pedagang yang sering bepergian ke luar kota.¹⁶

Khusus di *vorstenlanden* (Surakarta dan Yogyakarta), orang Tionghoa harus mengajukan permohonan sebulan sebelum kepergian mereka. Harus dinyatakan dengan jelas maksud kunjungannya, ke rumah siapa, bersama siapa, dan dengan kendaraan apa. Jika sudah mendapat jawaban dari pemerintah *vorstenlanden*, perjalanan baru dapat dilaksanakan.¹⁷

Peraturan *passenstelsel* ini sangat merepotkan orang Tionghoa, terutama untuk mengembangkan usaha perdagangan mereka. Prosedur untuk mendapatkan sehelai kartu *passenstelsel* saja sulit dan membutuhkan waktu panjang. Hal itu juga menyebabkan distribusi barang-barang dagangan dan komoditas pertanian dari daerah pinggiran ke kota atau sebaliknya menjadi kurang lancar. Dampak tersebut juga dirasakan sarana transportasi *Maatschappij Spoor en Tram* (Persatuan Kereta Api dan Trem) yang merugi karena makin sedikit pedagang Tionghoa yang menggunakan jasa kereta api.

¹⁶ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Trans Media, 2008), hlm. 133.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 134.

Sebelum tahun 1904, surat jalan hanya dapat digunakan untuk melakukan satu kali perjalanan. Tahun 1904 aturan ini diperlonggar dengan diperpanjang masa berlakunya selama satu tahun. Sistem *passenstelsel* mulai dilaksanakan tahun 1816 sampai dengan tahun 1914.¹⁸ Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan ini diprioritaskan untuk para pedagang Tionghoa, dengan tujuan untuk mengurangi kegiatan mereka di pedesaan, dengan alasan bahwa golongan Tionghoa mengakibatkan menurunnya kesejahteraan pribumi. Tujuan pemerintah kolonial Belanda melakukan pembatasan dan pengawasan terhadap orang-orang Tionghoa yaitu supaya pemerintah lebih leluasa untuk mengeksploitasi perekonomian Hindia Belanda.

Hal ini dilakukan karena tidak selamanya kehadiran orang-orang Tionghoa menguntungkan Belanda. Diterapkannya surat jalan membuat kebebasan kegiatan ekonomi orang-orang Tionghoa di pasar-pasar pedesaan berkurang. Adanya pembatasan ini menyebabkan saudagar-saudagar Tionghoa hanya dapat menjual barang dalam jumlah sedikit. Mereka menemui kesulitan untuk mengumpulkan hutang-hutang penduduk desa.

Ketentuan tersebut di atas masih ditambah lagi dengan diundangkannya *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) tahun 1870. Tokoh yang mengeluarkan undang-undang ini adalah de Waal (Menteri Jajahan dan Perniagaan Belanda). Undang-Undang itu berisi tentang sistem penguasaan tanah, pembatasan kepemilikan tanah di pedesaan oleh orang-orang Tionghoa dan orang asing lainnya. Dengan adanya peraturan ini jumlah tanah yang dimiliki para tuan

¹⁸ Mely G. Tan, (1981), *op.cit.*, hlm. xiv.

tanah Tionghoa berkurang, jumlah orang-orang Tionghoa yang hidup di pedesaan berkurang karena mereka pindah ke kota-kota besar.¹⁹ Secara umum, Undang-Undang Agraria 1870 bertujuan melindungi hak milik petani atas tanahnya dan penguasaan pemodal asing, memberi peluang pada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia, dan membuka kesempatan kerja pada penduduk Indonesia, terutama buruh pekerjaan.

Peraturan lain bagi orang-orang Tionghoa yaitu diberlakukannya peradilan *politierol*, yaitu sebuah peradilan polisi yang mana kepala polisi yang bertindak sebagai hakim. Sistem peradilan ini seringkali menjadi ajang pemerasan dan praktik ketidakadilan. Kepala polisi bisa saja memberi keputusan hukuman tanpa harus mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Akibatnya keputusan yang diambil kadang seenaknya sendiri. Sistem peradilan ini menangani masalah perdata dan baru dihapus pada 1914.

Sistem lainnya yaitu *Landraad* dan *Raad van Justitie*. Sistem *Landraad* adalah dewan pengadilan yang diketuai oleh seorang ahli hukum Belanda dengan seorang jaksa pegawai pencatat dan penasihat Tionghoa. Peradilan *Landraad* hanya digunakan untuk mengadili orang-orang pribumi, namun banyak kasus pelanggaran yang dilakukan orang Tionghoa diadili pada peradilan ini. Peradilan *Raad van Justitie* adalah pengadilan tingkat tinggi khusus orang Eropa. Peradilan ini benar-benar berhadapan dengan seorang ahli hukum dan prosedurnya pun sesuai dengan hukum. Orang-orang Tionghoa yang diajukan pada peradilan ini

¹⁹ Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2014), hlm. 270.

biasanya melakukan pelanggaran besar atau kriminal. Sebenarnya pada tahun 1864 Gubernur van der Cappelen mengeluarkan peraturan bahwa semua perlakuan hukum, baik perdata maupun pidana terhadap golongan Tionghoa di Jawa ditangani pengadilan *Landraad*. Namun peraturan itu berubah karena perkembangan kondisi orang-orang Tionghoa.

Sistem peradilan dan peraturan yang diskriminatif bagi orang-orang Tionghoa telah membentuk rasa nasionalisme di kalangan orang-orang Tionghoa. Pemerintah Belanda mulai melonggarkan pembatasan terhadap orang Tionghoa dengan imbalan gerakan nasionalisme di kalangan orang Tionghoa harus dikekang. Dengan Undang-Undang tahun 1907 orang-orang Tionghoa dapat memperoleh status Eropa dengan persyaratan khusus. Penduduk Tionghoa yang bertambah setiap tahun, baik karena kelahiran maupun pendatang baru yang masuk ke Surakarta, wilayah pecinan menjadi semakin padat dan mengakibatkan wilayah ini mengalami perluasan ke arah timur dan selatan. Hal itu juga disebabkan oleh penghapusan *wijkenstelsel*, banyak orang Tionghoa mulai keluar dari wilayah ini dan hidup memencar.

B. Pola dan Penyebaran Permukiman Tionghoa di Surakarta

Aktivitas perdagangan melalui transportasi sungai Bengawan Solo yang menghubungkan jaringan perdagangan pantai utara Jawa dengan Surakarta menyebabkan bandar perdagangan Bacem, Beton, Nusupan menjadi sangat ramai. Di kawasan alur Sungai Pepe, Sungai Laweyan, dan Kaliwingko bermunculan

komunitas dagang Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bali dan Belanda.²⁰ Kelompok-kelompok etnis ini akhirnya membentuk perkampungannya sendiri yang bernafaskan ekonomi lintas etnisitas.

Kota Surakarta dalam banyak hal menunjukkan eratnya hubungan antara faktor ekonomi lokal dan struktur sosial. Selain itu juga muncul potret segregasi sosial (etnis dan jabatan keraton) mewarnai situasi tempat tinggal dan wilayah kota. Di Surakarta nama Kampung Arab, Pecinan (Kampung Tionghoa), Kebalen (Kampung Bali), Sampangan (Kampung Madura), Kampung orang Banjar dan Kampung Laweyan orang Jawa menunjukkan ciri itu. Hunian orang-orang pribumi bercampur, baik penghuni lama maupun pendatang, kelas menengah maupun bawah, permukiman penduduk juga menggambarkan tajamnya pembagian segregasi sosial berdasarkan etnis, kelas sosial, dan ekonomi.²¹

Perkembangan ekonomi pada akhir abad ke-19 yang ditopang oleh pembangunan infrastruktur seperti komunikasi, transportasi, edukasi, dan birokrasi di Surakarta pada masa Paku Buwono X (1893-1939) menjadi perangsang urbanisasi. Kota-kota sebagai pusat pelayanan, kemudahan perdagangan, dan kedudukan penguasa, menjadi permukiman pendatang yang berasal dari daerah lain atau daerah pedesaan. Pola permukiman kota menunjukkan jelas-jelas sifat pluralistis masyarakat Indonesia. Kompleks rumah tembok (loji) dengan halaman luas di permukiman golongan Eropa dan elit

²⁰ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 70.

²¹ *Ibid.*, hlm. 74.

pribumi, pecinan dengan bangunan yang padat dan rapat satu sama lain, kemudian kampung kaum pribumi tinggal, yang biasanya merupakan kontras dengan daerah lainnya.²²

Selain mencerminkan pluralisme, pola permukiman juga menunjukkan stratifikasi sosial masyarakat kolonial yang mana pengelompokan menurut garis warna sangat mencolok. Pecinan sebagai pusat perdagangan merupakan *enclave*, bangsa Tionghoa dan Timur Asing lainnya tinggal. Jumlah orang Eropa terbatas, umumnya mereka tinggal di tempat yang terdapat garnisun militer kolonial atau dekat perkebunan yang sekaligus menjadi pesanggrahan karena iklimnya yang sejuk. Daerah permukiman Eropa secara fisik menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan kampung pecinan.²³

Permukiman etnis Tionghoa di Surakarta terbentuk akibat aktivitas perdagangan dengan berbagai elemen penting yang terdapat di permukiman tersebut. Model permukiman orang-orang Tionghoa, terutama di Surakarta berorientasi pada empat elemen utama yaitu klenteng, pasar, akses dan jalan. Aktivitas sosial dan keagamaan antar etnis Tionghoa dilakukan di klenteng sebagai elemen pengikat etnisitas. Pasar sebagai aktivitas sosial ekonomi, sedangkan akses transportasi serta jalan adalah penunjang bagi ruang gerak etnis Tionghoa.²⁴ Letak permukiman strategis di sepanjang jalan utama Kota Surakarta

²² *Ibid.*, hlm. 72-73.

²³ Mely G Tan, *op.cit.*, hlm. 2.

²⁴ Lihat <https://phesolo.wordpress.com/2012/02/25/pemukiman-tionghoa-di-surakarta-masa-kolonial/> (Diakses pada tanggal 28 April 2017, pukul 17:25).

dan dekat dengan pasar menyebabkan aktivitas ekonomi etnis Tionghoa menjadi maju.

Surakarta terdapat daerah permukiman etnis Tionghoa yaitu daerah Pasar Gede yang termasuk dalam wilayah Sudioprajan, Kecamatan Jebres, Kota Madya Surakarta. Pasar Gede diresmikan tanggal 12 Januari 1930, Thomas Karsten merupakan arsitek yang merancang bangunan pasar tersebut. Sebelum Keraton Kartasura pindah ke Solo, telah ada pasar yaitu Pasar Candi karena di belakang pasar terdapat candi.²⁵

Menurut tokoh-tokoh masyarakat Sudioprajan, wilayah tersebut adalah pemberian Paku Buwono X pada abad ke-19 kepada etnis Tionghoa dan kemudian digunakan sebagai tempat berdagang dan permukiman, serta di belakang atau di dalamnya adalah wilayah perkampungan yang biasanya digunakan sebagai wilayah permukiman oleh etnis Tionghoa maupun Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk yang mempunyai perbedaan etnis tersebut dapat hidup berdampingan tanpa adanya jarak rasial dan kawin campur atau yang disebut asimilasi sudah sering terjadi antara etnis Jawa dan Tionghoa.²⁶

Orang-orang Tionghoa dahulu lebih banyak tinggal di sekitar Pasar Gede, Kepanjen dan daerah luar (pinggiran jalan raya yang mengitari kelurahan Sudioprajan). Daerah pecinan itu berkembang menjadi daerah pertokoan dan

²⁵ Kastoyo Ramelan, *op.cit.*, hlm. 67.

²⁶ Eka Deasy Widyaningsih, "Masyarakat China Balong Sudioprajan (Studi Interaksi Sosial Masyarakat China-Jawa di Surakarta pada Pertengahan Akhir Abad XX)", *Skripsi*, (Surakarta: FSSR Universitas Sebelas Maret, 2007), hlm. 28.

perumahan golongan menengah ke atas yang umumnya dihuni penduduk etnis Tionghoa. Daerah Sama'an dimana penghuninya penduduk pribumi kaya yang dulu pekerjaannya sebagai penyamak kulit binatang berkembang menjadi daerah yang lebih mapan dan dihuni kelas menengah ke atas.²⁷

Tata letak rumah Tionghoa Surakarta sama seperti pecinan umumnya yaitu saling berhadapan dan berpetak-petak, dan di tengah rumah terdapat bagian tanpa atap, digunakan untuk menanam tanaman, mencuci piring, dan menjemur pakaian. Bagian depan rumah selalu merupakan ruang tamu dan tempat meja abu, dan kadang digunakan sebagai toko. Ciri khas utama perumahan orang Tionghoa adalah atapnya berbentuk lancip pada ujung-ujungnya, dan dengan ukiran yang berbentuk naga.²⁸ Permukiman etnis Tionghoa berisi perumahan yang merupakan gabungan antara tempat tinggal dengan rumah toko, sebagai tempat kegiatan sosial dan ekonomi.²⁹

Perubahan rumah dari model tradisional ke model baru telah dilakukan oleh orang Tionghoa yang tinggal di pinggir jalan besar. Bentuk dan gaya bangunan rumahnya mengikuti gaya perkembangan yang lebih modern. Pada umumnya bentuk rumah adalah bertingkat sesuai dengan kebutuhan keluarga yang tinggal. Mereka menggunakan arsitektur bangunan seperti daerah Tiongkok Selatan, tempat nenek moyang orang Tionghoa. Selain sebagai wahana sosial dan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁸ Puspa Vasanty, "Kebudayaan Orang Cina di Indonesia", dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1971), hlm. 359.

²⁹ Pratiwo, *op.cit.*, hlm. 283.

ekonomi, rumah orang Tionghoa juga digunakan sebagai tempat ritual kepercayaan orang Tionghoa. Rumah dijadikan tempat penyimpanan abu jenazah sebagai penghormatan terhadap arwah leluhur dan penghormatan terhadap dewa Kwan Tong, Kwan In, dan Sam Kwan Tay Te. Tempat persembayangan itu terletak di pusat organisasi ruang rumah.³⁰ Selain tata bangunan sebagai kesatuan sosial, religius dan ekonomi, arsitektur rumah juga menggunakan ilmu *Feng Shui* yaitu kepercayaan tata letak yang berorientasi kepada keberuntungan.³¹

Pada masa pemerintahan Belanda, terdapat perbedaan tempat tinggal yang didasarkan oleh warna kulit (segregasi ras) adalah sesuatu yang didesain oleh penjajah, karena penjajah memiliki kepentingan dengan terpecah-pecahnya warga kota berdasarkan ras tersebut, yaitu kepentingan untuk mengontrol mereka serta dengan alasan untuk menghindari konflik. Segregasi ras secara fisik diterapkan dalam permukiman mereka yang sengaja dipisahkan dan tidak boleh membaur.³² Pemusatan permukiman Tionghoa ditujukan untuk memudahkan pengawasan terhadap gerak-gerik orang Tionghoa. Permukiman orang Tionghoa terletak di sekitar Pasar Gedhe, tepatnya di Kampung Balong.

Kampung Balong didirikan pada masa pemerintahan Paku Buwono X. Kampung Balong didirikan untuk para buruh lepas yang umumnya berasal dari

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Feng Shui* merupakan keyakinan terhadap nilai baik dan buruknya suatu hal. Jika ingin berbuat sesuatu, orang Tionghoa cenderung untuk menanyakan atau meminta petunjuk terlebih dahulu kepada ahli *Feng Shui*, jika membangun rumah maka orang Tionghoa terlebih dahulu akan memanggil ahli *Feng Shui*.

³² Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta; Ombak, 2012), hlm. 94-95.

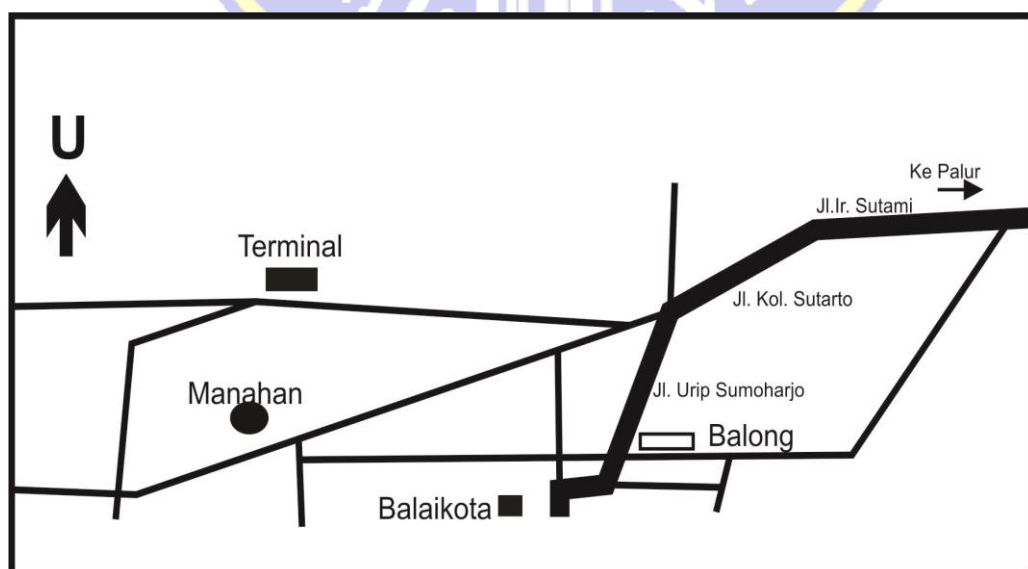
luar Kota Surakarta baik Tionghoa maupun Jawa. Sesuatu yang menarik dari Kampung Balong yaitu meskipun sebagai pecinan namun yang diberikan izin di wilayah itu bukan hanya orang Tionghoa melainkan juga orang Jawa. Hal ini menunjukkan latar belakang pembentukan Balong untuk mengatasi hunian liar yang tidak teratur dari para buruh lepas, maka tidak heran jika interaksi Tionghoa dan Jawa masih berlangsung harmonis dikarenakan sejak kampung itu dibentuk tidak ada batasan-batasan antara mereka.

Menurut salah satu pendapat, nama Balong berasal dari kata balung (tulang) yang merupakan tanah kosong milik Babah Mayor yang tidak terawat. Tanah kosong ini kurang sesuai dengan perhitungan mistik orang-orang Tionghoa, yang menghendaki tempat pemakaman itu ditinggikan atau dipindahkan di perbukitan. Tanah yang tidak terawat itu kemudian didirikan kemah dan gubuk-gubuk milik orang Tionghoa maupun orang Jawa yang kebanyakan miskin.

Kampung Balong dahulu merupakan daerah perkebunan yang ditumbuhi bambu-bambu dan pohon pisang serta daerah pemakaman, karena merupakan daerah pemakaman, maka sering kali penduduk yang menempati daerah itu menemukan “balung” (dalam bahasa Jawa berarti tulang) sisa-sisa tulang manusia yang dimakamkan disitu, Balong juga dekat dengan lembaga pemotongan hewan di Kampung Jagalan. Tulang-tulang dari lembaga pemotongan hewan tersebut juga di buang di daerah cikal bakal Balong. Sehingga kampung tersebut dikenal dengan nama “balung”. Kemudian seiring dengan waktu pengucapan kata “balung” berubah menjadi “balong”.

Balong hanya merupakan satu di antara pecinan di Surakarta. Kampung Balong terletak di sebelah utara Keraton Surakarta dan juga sebelah utara permukiman orang-orang Eropa di Loji Wetan. Pasar Gede yang menjadi pusat perdagangan di Kota Surakarta sejak awal abad ke-19 telah menjadi batas bagian barat dari Kampung Balong. Sementara itu, pada bagian timur Kampung Balong berbatasan dengan Kampung Jagalan yang mayoritas dihuni oleh para pedagang Jawa kelas menengah atas. Sebelah utara berbatasan dengan Purwodiningratan yang juga merupakan permukiman orang Jawa. Dalam perkembangannya, orang-orang Tionghoa bermukim di Kampung Mijen, Kampung Kepanjen, Kampung Samaan (sebelah timur), dan Kampung Balong (sebelah tengah). Di antara daerah-daerah tersebut, Kampung Balong merupakan pusat kebudayaan Tionghoa karena adanya klinteng yang dipersepsikan sebagai pusat kebudayaan bagi orang-orang Tionghoa.

Gambar 1
Denah Etnis Tionghoa di Surakarta



Sumber: Soedarmono, *Studi Historis Kerusuhan di Surakarta*, (Surakarta: PMS, 2000), hlm. 25.

Masa itu Balong merupakan pusat kebudayaan Tionghoa di Surakarta, namun di tempat itu hubungan Tionghoa dengan Jawa berlangsung dengan baik. Kondisi demikian tidak dijumpai dari permukiman yang lain meskipun terletak di sekitar Kampung Balong. Balong menjadi kampung yang memiliki pembaruan yang paling baik, dikarenakan seimbangannya komposisi Tionghoa dan Jawa serta kualitas ekonomi yang rata-rata miskin sehingga mudah melakukan pembauran.

Permukiman orang Tionghoa di Kampung Balong berbentuk rumah *kong*, yaitu rumah besar dengan banyak kamar yang di dalamnya dihuni oleh satu keluarga besar dan biasanya menggunakan identitas marga yang sama. Rumah *kong* sengaja dibangun untuk menyediakan anggota keluarga dan keturunan yang tidak berhasil dalam kehidupan ekonominya agar tetap tinggal di rumah *kong*. Bagi anggota keluarga yang berhasil dalam kehidupan ekonomi memilih keluar dari rumah *kong* dan mendirikan keluarga sendiri.

Orang-orang Tionghoa golongan pedagang dan menengah ke atas diberi tempat di sekitar Pasar Gede, yang sekarang disebut Ketandan, Limalasan, di sekitar Jalan Balong (Jl. Kapten Mulyadi) dan Warung Pelem.³³ Sedangkan orang-orang Tionghoa yang belum sukses, lebih banyak campur dengan golongan pribumi (Jawa) yang berdiam di tengah-tengah kampung, yang dulunya merupakan daerah kumuh, kebun-kebun liar dan kuburan. Kampung Balong ini berkembang menjadi daerah yang tidak teratur dan terlihat kumuh. Penghuni daerah ini merupakan kelas pendatang dan pada perkembangannya termasuk dalam

³³ R.M. Sajid, *Babad Sala*, (Surakarta: Rekso Pustoko, 2001), hlm. 61.

golongan kelas menengah ke bawah. Sampai saat ini, daerah permukiman ini dihuni oleh penduduk dari kelas sosial menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan menengah dan berkembang menjadi daerah yang padat.

Tahun 1919, atas desakan organisasi atau gerakan nasionalis di kalangan orang-orang Tionghoa, pemerintah Belanda menghapus peraturan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel*, sehingga permukiman Tionghoa tersebar hampir di seluruh wilayah Surakarta, namun mereka masih tetap hidup secara berkelompok. Mereka kebanyakan memilih tinggal di daerah-daerah strategis yaitu di daerah-daerah pusat perdagangan dan terletak di pinggir jalan utama. Biasanya yang menjadi tanda bahwa di daerah itu merupakan daerah pecinan adalah keberadaan sebuah kuil atau klenteng yang digunakan sebagai tempat ibadah keturunan Tionghoa. Di Surakarta ada beberapa klenteng yaitu, Klenteng Tien Kok Sie di Pasar Gede, Klenteng Poo An Kion di Coyudan, Klenteng San Tek Tong di Kebalen dan sebuah Lithang (tempat ibadah umat Khonghucu) yang terletak di Jalan Jagalan.³⁴

³⁴ Moerthiko, *Riwayat Klenteng, Vihara, Lithang, Tempat Ibadah Tri Dharma Se-Jawa*, (Semarang: Gramedia, 1980), hlm. 228.

BAB IV

AKTIVITAS ETNIS TIONGHOA DI SURAKARTA

A. Bidang Sosial

Aktivitas sosial orang-orang Tionghoa di Surakarta dilakukan untuk menjaga kelangsungan mereka di tengah kelompok sosial lainnya. Orang-orang Tionghoa beradaptasi dengan penduduk pribumi melalui beberapa saluran antara lain sistem sosial dan kekerabatan yang dianut, agama, organisasi dan perhimpunan Tionghoa, dan pendidikan. Untuk lebih jelasnya kelompok sosial Tionghoa berinteraksi dan berhubungan dengan penduduk pribumi serta etnis lainnya, bagian ini akan menjelaskan hal tersebut dan menunjukkan saluran-saluran yang digunakan bagi terciptanya interaksi sosial bagi kelompok sosial itu dengan kelompok sosial lainnya terutama warga masyarakat di sekitar pemukiman Tionghoa di Surakarta.

a. Sistem Sosial dan Kekerabatan yang Dianut

Perbedaan daerah asal, suku, dialek bahasa, dan desa di Tiongkok mengakibatkan orang Tionghoa yang datang di Indonesia juga memiliki perbedaan. Perbedaan yang sangat terlihat dari suku-suku orang Tionghoa yang dikelompokkan berdasarkan dialek bahasa Hokkian, orang Tionghoa yang berdialek bahasa Hakka, orang Tionghoa yang berdialek bahasa Theo Chiu, dan orang Tionghoa yang berdialek bahasa Kanton. Kelompok-kelompok ini kemudian menimbulkan terjadinya tingkatan-tingkatan sosial dalam kehidupan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. namun, tingkatan-tingkatan sosial dalam orang-orang Tionghoa di Surakarta tidak terlalu terlihat, karena masing-

masing kelompok tidak menyadari posisinya. Kelompok buruh di antara mereka yang masih bekerja pada majikannya tidak menyadari posisinya yang berada pada lapisan bawah dalam komunitasnya. Begitu juga dengan para majikan, mereka tidak menempatkan diri sebagai kelompok kelas atas. Hubungan yang terjalin antara majikan dan buruhnya adalah hubungan mitra usaha yang saling membutuhkan.

Kebanyakan orang Tionghoa pergi merantau tanpa membawa istri. Hal ini mengakibatkan terjadinya perkawinan campur antara mereka dengan perempuan pribumi. Perkawinan campuran sudah lama terjadi dan bukan hal yang langka. Perkawinan campuran sudah terjadi sejak masa pemerintahan Paku Buwana X. Prosesi perkawinan campuran antara etnis Tionghoa dan Jawa menggunakan adat Jawa. Anak-anak yang lahir dari perkawinan campur yang disebut Tionghoa peranakan, dan orang Jawa menamakan mereka sebagai babah. Lama-kelamaan terminologi babah tidak hanya diperuntukkan bagi para pria yang berasal dari perkawinan campur tersebut, tetapi juga dipakai untuk menyebut orang-orang Tionghoa *totok* yang sudah tinggal beberapa lama di Jawa dan larut dalam budaya Jawa.

Perkawinan antar kelompok tetap berlangsung secara meluas. Orang Jawa menyebutkan para perempuan Jawa yang menikah dengan orang Tionghoa dengan nama panggilan *Nyah Nganten* berasal dari kata *nyonyah* dan *nganten*. *Nganten* adalah penggalan dari gelar untuk perempuan Jawa dari golongan bangsawan menengah baik para imigran maupun kaum peranakan Tionghoa di

Jawa dengan cepatnya melakukan penetrasi ekonomi sampai ke segenap pelosok Pulau Jawa.¹

Bentuk rumah tangga orang Tionghoa didasarkan pada sistem kekerabatan keluarga luas. Keluarga luas dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, keluarga luas yang terdiri dari keluarga orang tua dan anak-anaknya laki-laki yang tertua beserta istri dan anak-anaknya dan saudara-saudaranya yang belum menikah. Kedua, keluarga luas yang terdiri dari orang tua dengan anak-anak lelakinya serta keluarga batihnya masing-masing. Keluarga batih terdiri dari suami, istri, dan anak-anak (baik yang berasal dari hasil perkawinan maupun yang berasal dari hasil adopsi).²

Sampai akhir abad ke-19 rumah tangga orang Tionghoa masih menganut bentuk keluarga seperti ini, namun sejak sistem *wijkenstelsel* dihapuskan pada tahun 1914, lambat laun bentuk-bentuk keluarga tadi mengalami perubahan. Dalam perkembangannya, sebagai akibat dari adaptasi dan sosialisasi yang terjadi dengan penduduk pribumi, sistem kekerabatan yang dianut sudah cenderung ke arah kekerabatan dan leluhur pada pihak perempuan, seperti sistem kekeluargaan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Surakarta. Bahkan kemudian banyak orang-orang Tionghoa yang menganut kedua sistem kekerabatan tersebut, yaitu yang dikenal dengan sistem kekerabatan bilineal, yaitu keluarga dari pihak ayah dan ibu adalah kerabat. Sistem kekerabatan ini tidak berpengaruh kepada sistem

¹ Daradjadi, *Geger Pacinan 1740-1743; Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC*, (Jakarta: Kompas, 2013), hlm. 58.

² Puspa Vasanty, "Kebudayaan Orang Cina di Indonesia", dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1971), hlm. 362.

ahli waris yang dianut oleh orang Tionghoa di Surakarta yang mana warisan tetap lebih mengutamakan patrilineal.

Prinsip keturunan tradisional Tionghoa yang berdasarkan patrilineal, patrilokal, dan patriakal yang mengakui garis keturunan hanya melalui laki-laki, sehingga kerabat dari garis ibu adalah kerabat luar. Prinsip ini selalu mendahulukan kepentingan kaum pria, dan menempatkan kaum perempuan sebagai pihak luar yang nantinya akan menjadi warga kerabat suaminya setelah menikah.³

Garis keturunan orang Tionghoa yang tradisional kemudian juga dibedakan antara warga dalam atau warga luar (cucu dalam, cucu luar). Garis keturunan atau *she* keluarga juga sangat menentukan tentang hak pewarisan harta dan perlakuan dalam pembagian hak dan kewajiban pewaris. Prinsip keturunan ini berlaku dalam keluarga pendatang baru (kelompok Tionghoa *totok*) yang masih memegang teguh budaya Tionghoa. Sebaliknya dengan kaum peranakan yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan lokal, yang mana unsur-unsur garis keturunan sudah diwarnai unsur-unsur kebudayaan dari garis ibu, seperti yang berlaku dalam masyarakat Surakarta. Hal ini bisa saja disebabkan oleh faktor keterbatasan yang mereka miliki di perantauan.

Orang Tionghoa di Surakarta masih memegang teguh ajaran leluhur yang mengharuskan mereka untuk selalu menghormati orang tua atau *xiao*, baik kepada yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Merawat orang tua yang masih

³ Leo Suryadinata, *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995*, (Singapore: Singapore University Press, 1997), hlm. 68-69.

hidup di Surakarta dilakukan tidak hanya terhadap garis keturunan pria saja, tetapi juga sudah merupakan panggilan dan kewajiban untuk garis keturunan wanita, walaupun menurut sistem kekerabatan tradisional Tiongkok kerabat dari garis ibu adalah kerabat luar. Menurut keyakinan religius tradisional orang Tionghoa, orang tua yang sudah meninggal harus tetap dirawat kuburannya, karena mereka diyakini masih hidup, walaupun berada di dunia yang lain. Orang tua yang sudah meninggal akan melindungi keluarga dan kerabat yang ditinggalkannya.⁴

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, hubungan kekeluargaan antara orang Tionghoa yang tinggal di Surakarta dengan keluarga mereka yang masih tinggal di daratan Tiongkok terjalin secara baik. Hal ini disebabkan karena pemerintahan Hindia Belanda memberikan peluang kepada orang Tionghoa untuk tetap memelihara identitas diri mereka sebagai orang Tionghoa dan memberikan izin kepada mereka yang ingin berkunjung atau kembali ke negara asalnya. Bagi orang Tionghoa yang akan mengunjungi atau kembali kepada keluarganya di Tiongkok, harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah Hindia Belanda. Hubungan ini mulai terputus setelah terjadi pergolakan politik dan pecahnya Perang Pasifik pada awal abad ke-20, yang mengakibatkan tidak mungkin lagi bagi orang Tionghoa untuk berkunjung ke Tiongkok.

Dalam lingkungan orang-orang Tionghoa, keluarga mempunyai peranan sangat penting, baik sebagai kerabat maupun sebagai rekan usaha. Bentuk hubungan keluarga sering diterapkan oleh orang Tionghoa dalam menjalin hubungan sosial dan ekonomi di dalam lingkungannya. Dalam melakukan

⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

interaksi sosial sesama orang Tionghoa, mereka menanamkan rasa persaudaraan di antara mereka yang berasal dari satu suku, satu bangsa, dan satu negara asal.

Kuatnya ikatan persaudaraan yang tumbuh di antara sesama orang Tionghoa, salah satunya dipengaruhi karena mereka sama-sama memegang ajaran Konfusianisme yang banyak mempengaruhi sikap mental orang Tionghoa. Orang Tionghoa juga memiliki tata kehidupan dan norma-norma yang berlaku di dalam tradisi budaya mereka, terutama sikap fanatik terhadap tradisi leluhurnya. Dalam berkomunikasi, rata-rata orang Tionghoa sering berdasarkan pada sikap yang berkaitan dengan hubungan keluarga, negara, dan pergaulan yang ada di sekitarnya.

Identitas orang Tionghoa juga terlihat dari nama mereka yang masih menggunakan nama Tionghoa yang terdiri dari tiga suku kata. Ketiga suku kata tersebut mencerminkan asal keturunan dan dari keluarga mana mereka berasal. Bagi orang Tionghoa peranan, penggunaan nama Tionghoa adalah identifikasi diri terhadap kebudayaan negeri leluhur mereka.⁵ Penggunaan nama keluarga Tionghoa memberikan identitas diri dan menumbuhkan keterikatan yang kuat bagi orang Tionghoa ke dalam sistem kemasyarakatan keluarganya.

Salah satu sifat orang Tionghoa yang menonjol bila berada di tengah lingkungan atau keluarganya adalah keramahan dan kebaikan hatinya. Jika memperoleh rezeki, mereka bersedia membantu sanak saudaranya yang kurang mampu atau memberi sumbangan kepada berbagai yayasan sosial dan perayaan-perayaan. Mereka lebih mau memberikan uangnya untuk sumbangan dari pada

⁵ Mely G. Tan, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Gramedia, 1979), hlm. 2.

membayar pajak. Rasa setia kawan dan kekeluargaan Tionghoa yang kuat, membuat mereka senantiasa memberikan perhatian yang lebih kepada sanak saudaranya dan kurang menghargai kepentingan umum yang lebih luas. Hal ini didukung oleh kesetiaan yang kuat kepada negara asal dan budaya leluhur mereka.

Sikap orang Tionghoa yang berusaha mempertahankan pola pemikiran, perbuatan, dan pola hidup yang berdasarkan kepada tradisi leluhurnya juga didukung oleh paham Taoisme. Paham ini juga mempengaruhi sikap orang Tionghoa dalam memulai suatu usaha yang cenderung dilakukan dengan cara bekerja sama dengan sesama keluarga.

b. Agama

Etnis Tionghoa di Surakarta pada abad ke-20 telah mengalami akulturasi adat, budaya, serta agama, meskipun ada di antara mereka yang masih tetap mempertahankan keyakinan pada tanah leluhur. Data tentang jumlah penganut agama dan kepercayaan masyarakat Tionghoa pada saat itu tidak diperoleh, sehingga kehidupan religi mereka tidak dapat digambarkan secara jelas. Umumnya masyarakat Tionghoa dianggap sebagai pemeluk agama Budha. Anggapan ini disebabkan bentuk-bentuk peribadatan yang mereka lakukan ada semacam kesamaan, juga karena keawaman masyarakat tentang agama dan kepercayaan yang dianut orang Tionghoa di Surakarta.

Sampai tahun 1940, di daerah pecinan Surakarta terdapat beberapa tempat ibadah orang-orang Tionghoa. Jumlah tersebut dapat dipakai untuk mengidentifikasi bahwa sebagian besar Tionghoa Surakarta adalah penganut ajaran Kong Hu Chu (Konfusius) dan Taoisme. Penganut ajaran Kong Hu Chu

(Konfusius) melakukan ibadah di Bon Bio, yaitu rumah penyembahan untuk Nabi Kong Hu Chu. Kegiatan yang dilakukan di rumah penyembahan ini yaitu sembahyang untuk memperingati hari lahir dan wafatnya Nabi Kong Hu Chu. Bentuk bangunan Bon Bio ini berlainan dengan bentuk klenteng. Bentuknya lebih megah dengan arsitektur khas yang dihiasi ornamen Tiongkok. Upacara sembahyang diadakan di ruang sembahyang Bon Bio, dan biasanya acara tersebut dilengkapi dengan sesajen seperti babi panggang utuh, sapi panggang utuh, pohon pisang yang berbuah, dan pohon tebu.

Penganut ajaran Taoisme dan Budha melakukan peribadatan klenteng. Surakarta terdapat tiga klenteng yang semuanya berada di wilayah pemukiman orang Tionghoa. Hal ini menunjukkan bahwa penganut Taoisme lebih besar. Penganut ajaran ini dapat setiap hari melakukan sembahyang untuk meminta Ciam Si, obat atau minta diramal nasib dan jodoh pada *Taopekong* (pemimpin klenteng).

Jumlah penganut agama Islam sangat sedikit sehingga kadang tidak diketahui oleh sesama Tionghoa. Mereka menganut Islam secara diam-diam dan tidak berani melakukan peribadatan. Orang-orang Tionghoa di Surakarta juga melakukan praktik-praktik ritual ajaran kepercayaan masyarakat setempat seperti membakar kemenyan dan berziarah ke cungkup makam tokoh agama di Jawa, jadi dalam hal agama dan kepercayaan ada semacam kekaburan dan tergambar pengaruh kuat dari kepercayaan setempat.

Masuknya orang-orang Belanda membawa pengaruh pada agama dan kepercayaan orang-orang Tionghoa. Mereka mulai mengenal ajaran Kristen

Protestan dan Kristen Katolik yang disebarkan oleh para misionaris dan *zending* yang sengaja didatangkan ke Hindia Belanda. Baik Tionghoa totok maupun peranakan mulai terpengaruh agama baru itu, bahkan ada di antara mereka yang kemudian beralih menjadi pemeluk Kristen. Jumlah penganut Kristen semakin meningkat terutama pada Tionghoa peranakan. Salah satu alasannya, dengan menganut agama Kristen mereka merasa sederajat dengan orang-orang Belanda (Eropa).⁶

c. Organisasi Tionghoa di Surakarta

Sejak tahun 1912 di Surakarta telah tumbuh organisasi-organisasi masyarakat untuk kelompok-kelompok tertentu. Tumbuhnya organisasi tersebut menunjukkan dinamika masyarakat Surakarta. Di kalangan masyarakat Tionghoa jumlah perkumpulan-perkumpulan Tionghoa juga memiliki dinamika. Perbedaan dan pertentangan ideologi di kalangan organisasi Tionghoa ini pada kenyataannya menimbulkan apatisme bagi masyarakat Tionghoa. Mereka berpandangan bahwa perjuangan politik hanya akan memecah belah mereka dan juga terpencil dari hubungan dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu mereka lari dari persoalan politik dan membentuk kelompok-kelompok yang berorientasi pada kegiatan-kegiatan sosial, olahraga, seni dan budaya, ekonomi, dan juga perkumpulan pemuda maupun kematian.

Tahun 1920 di Surakarta berdiri berbagai organisasi keturunan Tionghoa, tetapi baru pada tahun 1929 terdapat organisasi-organisasi etnis Tionghoa yang saling bertentangan. Terjadinya pertentangan antara organisasi tersebut

⁶ Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 56-57.

disebabkan karena organisasi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Pertentangan itu merupakan akibat dari adanya tiga aliran atau orientasi organisasi di kalangan etnis Tionghoa sebagaimana yang dijelaskan.

Organisasi-organisasi etnis Tionghoa itu adalah sebagai berikut:

1. Organisasi perkumpulan Kong Tong Hoo
2. Organisasi perkumpulan Hi Ang Gie Hwee
3. Organisasi perkumpulan Hap Gie Hwee
4. Organisasi perkumpulan Kong Sing Hwee
5. Organisasi perkumpulan Sam Ban Hien
6. Organisasi perkumpulan Tiong Hoa Poen Sing Hwee
7. Organisasi perkumpulan Hua Chiao Tsing Nien Hui
8. Organisasi perkumpulan Sing Boe Tjong Hwee
9. Organisasi perkumpulan Hoo Hap
10. Organisasi perkumpulan Ping Bin Hak Hauw
11. Organisasi perkumpulan Hoa Kiaw Kong Hak
12. Organisasi perkumpulan Giok Hiong
13. Organisasi perkumpulan Kioe Kok Gie Tjien Hwee
14. Organisasi perkumpulan Kok Bin Tong
15. Organisasi perkumpulan Tay Tong Hwee
16. Organisasi perkumpulan Tiong Lian Tjong Hwee
17. Organisasi perkumpulan Giok Tjong Hwee

Organisasi THHK dan HCTNH cenderung memiliki visi politik yang segaris dengan kelompok *Sin Po*. Namun aktivitas yang digelutinya tetap kegiatan

pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Dari sekian banyak organisasi Tionghoa yang saling bertentangan itu terdapat sejumlah organisasi yang memiliki kesamaan pandangan. Tahun 1929 tercatat enam perkumpulan sosial Tionghoa bergabung. Enam organisasi tersebut yaitu:

1. Organisasi perkumpulan Kong Tong Hoo
2. Organisasi perkumpulan Hi Ang Gie Hwee
3. Organisasi perkumpulan Hap Gie Hwee
4. Organisasi perkumpulan Kong Sing Hwee
5. Organisasi perkumpulan Sam Ban Hien
6. Organisasi perkumpulan Tiong Hoa Poen Sing Hwee

Keenam organisasi tersebut diambil keputusan bahwa mereka bermaksud menggabungkan diri dalam satu wadah. Pada tanggal 1 April 1932 terbentuk organisasi gabungan yang diberi nama Chuan Ming Kung Hui. Organisasi ini adalah organisasi kematian (*begrafenisfunds*) yang diketuai oleh Tan Gwan Soei, pelindung organisasinya yaitu Mayor Be Kwat Koen. Chuang Ming Kung Hui berganti nama menjadi PMS (Perkumpulan Masyarakat Surakarta).

d. Pendidikan

Awalnya persoalan pendidikan kurang diperhatikan oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena rata-rata keadaan sosial ekonomi mereka belum mapan. Sebagai imigran yang datang ke Indonesia dalam keadaan miskin, tentunya tujuan utama merantau adalah untuk memperbaiki kehidupan ekonominya. Para imigran ini umumnya mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah, bahkan ada yang tidak berpendidikan. Jika ada orang

Tionghoa di Indonesia yang mempunyai kesadaran untuk menyekolahkan anak-anaknya, jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan orang Tionghoa yang ada di Indonesia dan terbatas pada kalangan orang Tionghoa kaya.

Sebelum abad ke-20, model pendidikan Tionghoa yang ada di Indonesia adalah pendidikan tradisional, yaitu suatu sistem pendidikan yang diberikan oleh generasi yang lebih tua kepada generasi muda berdasarkan ajaran atau pengalaman-pengalaman nenek moyangnya. Sebagian orang Tionghoa di Indonesia terutama di Jawa adalah pedagang, maka pendidikan yang diajarkan pada anak-anaknya tidak terlepas dari cara berbisnis atau mencari uang. Pada masa itu sekolah-sekolah yang ada masih terbatas pada sekolah berdasarkan kelompok bahasa dan yang mengajarkan adat-istiadat leluhur mereka yang ada di Tiongkok. Sekolah bahasa pun masih terbatas pada masing-masing suku bangsa, dan materi yang diajarkan tentang negeri Tiongkok juga terbatas pada karya-karya klasik.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda sendiri kurang memperhatikan pendidikan bagi anak-anak Tionghoa. Undang-Undang Tahun 1854, yang memperluas kesempatan belajar hanya diberlakukan untuk kaum pribumi. Kemudian anak-anak Tionghoa diberi kesempatan untuk memasuki sekolah-sekolah Belanda, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu mengerti Bahasa Belanda, jika kebetulan ada lowongan, dan sanggup membayar uang sekolah yang tinggi. Bagi siswa yang sudah diterima setiap bulan mereka diwajibkan membayar uang sekolah sekitar f.10 hingga f.15. hal itu masih ditambah lagi dengan adanya kewajiban bagi orang tua, yaitu wajib mengambil

tutor untuk mengajarkan adat sopan santun Belanda, misalnya tata cara makan roti dengan pisau dan garpu. Biaya yang diperlukan untuk itu per bulannya yaitu f.100, sehingga setiap orang tua membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya kurang lebih f.115. tentunya ini bukan jumlah yang sedikit, sehingga tidak menutup kemungkinan jika tidak semua anak Tionghoa dapat masuk sekolah tersebut.

Menjelang tahun 1900-an, sudah banyak terdapat sekolah Tionghoa baik sebagai kegiatan usaha bersama maupun dikelola oleh keluarga. Bahasa pengantar di berbagai sekolah Tionghoa pada umumnya adalah bahasa daerah, baik Hokkian maupun Kanton.

a. Sekolah THHK

THHK (Tiong Hoa Hwee Koan) didirikan pada tahun 1901.⁷ Pendirian sekolah THHK yang pertama di Batavia kemudian diikuti oleh kota-kota lainnya di Indonesia, termasuk Surakarta. Sekolah THHK menggunakan bahasa daerah sebagai perantara, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya digunakan bahasa pengantar Mandarin karena dipengaruhi oleh sistem pendidikan di Tiongkok. Mata pelajaran yang diberikan sesuai dengan di Tiongkok seperti mata pelajaran matematika, geografi, dan adat istiadat Tiongkok.⁸ Para guru didatangkan langsung dari Tiongkok. Bahasa Belanda tidak diajarkan di sekolah THHK,

⁷ THHK adalah organisasi atau perkumpulan orang-orang Tionghoa perantauan yang berdiri pertama kali di Batavia pada tanggal 17 Maret 1900. THHK pada awal berdirinya bersifat sebagai organisasi keagamaan di kalangan orang-orang Tionghoa peranakan di Hindia Belanda.

⁸ Leo Suryadinata, *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 43.

namun justru Bahasa Inggris yang diajarkan. Hal ini dikarenakan guru Bahasa Belanda mahal dan orang Tionghoa merasa dianak tirikan dalam hal pendidikan dibandingkan dengan kaum pribumi. Pemerintah Hindia Belanda awalnya memang hanya menyediakan sekolah-sekolah untuk kaum pribumi saja, itupun sebagai akibat dari Politik Etis yang salah satunya menuntut dipenuhinya kebutuhan akan pendidikan di Hindia Belanda.

Sekolah THHK di Surakarta didirikan tahun 1907 oleh orang Tionghoa yang dimotori oleh Mayor Be Kwat Koen. Sistem pendidikan THHK yang berbeda dengan cara lama dan lebih modern maka hal ini merupakan daya tarik tersendiri bagi warga negara Tionghoa sehingga pada angkatan pertama saja sudah terdaftar 360 siswa yang terdiri dari siswa putra dan putri.

Biaya sekolah yang diperlukan sekitar f.125 sampai f.75 jadi dibandingkan dengan sekolah THHK yang ada di Jakarta dan Semarang, sekolah THHK di Surakarta lebih mahal. Sekolah THHK di Surakarta juga didanai dan dikelola oleh warga Tionghoa setempat, serta mata pelajarannya disesuaikan dengan sekolah yang ada di Tiongkok. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Mandarin. Jumlah guru sekolah THHK pada saat itu adalah 10 orang termasuk kepala sekolahnya, dengan jumlah murid 285. Guru ini ada yang langsung didatangkan dari Tiongkok dan ada yang tamatan dari sekolah Tionghoa di Hindia Belanda. Gedung sekolahnya sudah milik sendiri, tidak menyewa ataupun meminjam dari perkumpulan lain.

Sampai tahun 1920, jumlah sekolah THHK yang ada di Surakarta masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar saja. Baru pada tahun 1936 dibuka Sekolah

Menengah Pertama (Chu Chung) untuk menampung lulusan THHK yang semakin banyak. Tahun 1937 jumlah murid hanya 30 orang saja. Hal ini karena alumni dahulu sebelum ada sekolah menengah, melanjutkan sekolah ke Batavia atau ke Surabaya.

b. HCS

HCS (Hollands Chineesche School)⁹ didirikan pertama kali pada tahun 1908 sebagai tindak lanjut dari pemerintah Hindia Belanda terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat Tionghoa pada masa itu. Peningkatan jumlah sekolah THHK dan jumlah siswanya menyebabkan pemerintah Belanda merasa khawatir jika rasa nasionalisme orang-orang Tionghoa semakin bertambah, karena didapati kenyataan bahwa sekolah-sekolah THHK ini digunakan oleh orang-orang Tionghoa untuk menanamkan rasa nasionalisme perantauan terhadap tanah leluhurnya.

HCS didirikan Belanda pada tahun 1912. HCS ini lebih menarik minat para orang tua murid sehingga banyak anak Tionghoa yang masuk ke HCS dan bahkan banyak pula anak yang tadinya sudah masuk THHK kemudian dipindahkan oleh orang tuanya ke HCS. Bahasa pengantar yang digunakan di sekolah HCS adalah Bahasa Belanda. HCS lebih menarik simpati bagi orang Tionghoa peranakan karena mereka tidak memahami bahasa Tiongkok yang terdapat di sekolah Tionghoa. Selain itu lulusan dari sekolah HCS akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan dalam kehidupan sehari-hari.

⁹ HCS merupakan sekolah Belanda yang diperuntukkan bagi orang Tionghoa yang ingin mendapatkan pendidikan Barat. Tujuannya adalah untuk melawan pasangannya nasionalisme Tionghoa pada masa itu. Lihat S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, t.t), hlm. 10.

Syarat masuk HCS bagi anak Tionghoa lebih mudah yaitu syarat usia maksimum tujuh tahun dan penguasaan Bahasa Belanda tidak diberlakukan dengan ketat, bahkan HCS ini mempunyai kelas persiapan untuk anak-anak berusia lima tahun agar lebih mudah mengikuti pelajaran di kelas satu. Biaya sekolah di HCS disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Pemerintah telah membuat standar biaya uang sekolah di HCS menjadi delapan kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang berpenghasilan f.12.000 per tahun atau yang memiliki kekayaan f.240.000 ke atas. Bagi golongan ini, anak pertama mereka akan dikenakan biaya sekolah f.216 setahun. Dalam bidang pendidikan, pada awalnya warga Tionghoa tidak diperbolehkan masuk di sekolah Eropa, mereka hanya bersekolah di Tiong Hoa Hwe Koan (THHK). Sejak diberlakukannya Politik Etis, pemerintah kolonial membuka sekolah untuk khusus warga Tionghoa yaitu Hollands Chinnesche School.

B. Bidang Ekonomi

Bagian ini menguraikan aktivitas ekonomi masyarakat Tionghoa. Aktivitas ekonomi orang-orang Tionghoa sejak awal sudah menjalin hubungan dengan orang Jawa. Sejak tahun 1890-an orang-orang Tionghoa berperan dalam industri batik, yang semula hanya berkembang di lingkungan istana dan rumah-rumah para bangsawan. Melalui usaha mereka, lambat laun daerah pemasaran batik menjangkau seluruh Jawa, bukan hanya terbatas di kota-kota, tetapi juga masuk ke daerah pedalaman. Orang-orang Tionghoa menguasai perdagangan berbagai jenis bahan baku pembuatan batik. Perdagangan arang dan kayu bakar yang

terbesar juga ada di tangan orang Tionghoa. perdagangan bahan pewarna (indigo) dan kain mori juga di tangan orang Tionghoa dan Arab. Mereka berhubungan dengan importir yaitu pedagang besar Tionghoa dalam bidang pertekstilan.

Hingga tahun 1900-an, jumlah usaha pembuatan batik di seluruh Surakarta mencapai angka yang cukup menakjubkan yaitu 369 buah. Sektor perdagangan merupakan pekerjaan yang banyak dipilih oleh orang Tionghoa. Selain berperan dalam industri batik etnis ini juga bergerak dalam perdagangan kain tekstil yang sebagian besar diduduki oleh orang Tionghoa *totok* yaitu 320 orang sedangkan Tionghoa *peranakan* 144 orang. Orang Tionghoa *totok* lebih banyak menguasai perdagangan tekstil untuk seluruh Karesidenan Surakarta. Berbagai macam perdagangan eceran seperti toko klontong dan penjaja keliling juga menjadi pekerjaan utama.

Tabel 5
Klasifikasi Pekerjaan Orang Tionghoa di Surakarta
Menurut Jenis Kelamin

| Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| Produksi bahan mentah | 3,77 | 0,72 | 3,19 |
| Industri | 24,03 | 33,72 | 25,87 |
| Transportasi | 2,31 | 0,36 | 1,94 |
| Perdagangan | 61,79 | 54,93 | 60,50 |
| Pekerjaan bebas | 3,09 | 1,95 | 2,87 |
| Pegawai pemerintah | 0,56 | - | 0,45 |
| Jenis pekerjaan lain | 4,45 | 8,32 | 5,18 |
| Total | 100 | 100 | 100 |

Sumber: *Volkstelling* 1930.

Dari data di atas jelas terlihat bahwa mayoritas pekerjaan orang-orang Tionghoa di Surakarta adalah sebagai pedagang. Pemerintah kolonial memposisikan orang-orang Tionghoa sebagai pedagang perantara antara Eropa dengan pribumi,¹⁰ sehingga banyak keturunan Tionghoa yang memainkan peran pada bidang perdagangan. Landasan kebijakan yang menguntungkan mereka, sifat, karakter, dan etos kerja yang tinggi yang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa sangat mendukung kemajuan usaha perdagangan.

Akhir abad ke-19 orang-orang Tionghoa tetap memainkan perannya secara berhasil dalam bidang ekonomi. Ketegangan hubungan antara orang Tionghoa dan Jawa di Surakarta mulai terjadi, hal itu juga dimulai dari industri batik. Sebelumnya hubungan antara Jawa dan Tionghoa tidak ada masalah. Residen Bangka pernah menyatakan bahwa Samanhudi belajar tentang organisasi modern dari orang Tionghoa juga. Akibat pengaruh dari Revolusi Tiongkok pada Oktober 1911 dan berdirinya Republik pada Februari 1912, mereka memperlakukan orang Jawa lebih rendah. Sebagai reaksinya orang Jawa pun mempunyai rasa kebencian pada orang Tionghoa.¹¹

Para pengusaha dan pedagang batik Jawa sangat tergantung pada bahan-bahan batik yang dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Samanhudi, seorang pedagang batik terkemuka di Laweyan, bergabung dengan Budi Utomo dan memprakarsai berdirinya koperasi bumiputra, mengakibatkan banyak pedagang

¹⁰ Hall, D. G. E, *Sejarah Asia Tenggara*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1988), hlm. 296.

¹¹ George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 58.

batik pribumi yang masuk menjadi anggota Budi Utomo di Surakarta. Keadaan ini membuat pengusaha Tionghoa khawatir.

Awal abad ke-20, orang-orang Tionghoa di Surakarta membentuk perkumpulan dagang yang diberi nama *Kong Sing*. Perkumpulan ini awalnya hanya beranggotakan kalangan pedagang kecil Tionghoa yang miskin, tujuannya untuk membantu mereka dalam urusan kematian, pesta, dan perdagangan. Sejak ditemukannya metode batik cap dan bahan pewarna kimiawi, pedagang-pedagang Tionghoa di Surakarta mengalami kemajuan. Orang Tionghoa menguasai sektor perdagangan, terutama dalam hal impor bahan baku batik. Mereka memonopoli dan menjadi pedagang perantara dalam menyuplai berbagai bahan baku batik impor. Orang-orang Tionghoa memikat Samanhudi untuk bergabung dengan organisasi mereka yang bernama *Kong Sing*. Setelah Samanhudi bergabung, jumlah anggota orang Jawa dalam *Kong Sing* dua kali lipat daripada anggota orang Tionghoa, namun orang-orang Tionghoa tetap menguasai perhimpunan ini.¹²

Berita tentang kemenangan Revolusi Tiongkok pada Oktober 1911¹³ yang telah sampai di Hindia Belanda membuat orang-orang Tionghoa mulai bersikap

¹² Pada mulanya *Kong Sing* merupakan perkumpulan orang Tionghoa dari kalangan pedagang kecil atau golongan miskin, secara formal perkumpulan ini merupakan perkumpulan untuk membantu dalam urusan kematian, pesta, dan juga perdagangan. Ada yang mengatakan bahwa *Kong Sing* merupakan sisa jaringan ladang opium yang pernah dibangun atas model sindikat rahasia Tionghoa. Lihat Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 52-53.

¹³ Revolusi Tiongkok tersebut diprakarsai oleh Sun Yat-sen. Lihat Gondomono, *Manusia dan Kebudayaan Han*, (Jakarta: Kompas, 2013), hlm. 68.

angkuh terhadap orang Jawa dan memperlakukan anggota Jawa secara kurang layak.¹⁴ Dengan bantuan Tirtoadisuryo (seorang pendiri Sarekat Dagang Islam di Bandung), Samanhudi dan pengikutnya mengundurkan diri *Kong Sing* dan membentuk perhimpunan sendiri bernama *Rekso Roemekso*. *Rekso Roemekso* merupakan sebuah organisasi ronda yang didirikan oleh para pedagang dan pengusaha batik SI Surakarta di bawah pimpinan Samanhudi. *Rekso Roemekso* adalah organisasi ronda yang bertugas mengawasi keamanan daerah karena pada masa itu daerah Laweyan sering terjadi pencurian batik yang dijemur di halaman.¹⁵ Organisasi ini meningkatkan persaingan bahkan mengarah pada permusuhan dengan organisasi *Kong Sing* Tionghoa. Anggota dalam *Rekso Roemekso* disebut wargo rumekso dan pengurus disebut wargo pangarso.¹⁶

Keluarnya Samanhudi beserta pengikutnya, *Kong Sing* semakin mundur dan ketegangan antara orang Jawa dan Tionghoa sering meledak menjadi perkelahian antara kedua kelompok.¹⁷ *Rekso Roemekso* sendiri merupakan organisasi yang menjadi cikal bakal dari SDI (Sarekat Dagang Islam) yang kemudian berganti nama menjadi SI (Sarekat Islam).¹⁸

Adapun asas dan tujuan SDI yaitu sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

¹⁵ Ayu Windy Kinasih, *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2005), hlm. 69.

¹⁶ Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta, 1900-1915*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 100.

¹⁷ George D. Larson, *op. cit.*, hlm. 59.

¹⁸ Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 56.

1. Mengutamakan sosial ekonomi
2. Mempersatukan pedagang-pedagang batik
3. Mempertinggi derajat bumiputra
4. Memajukan agama dan sekolah-sekolah Islam

Latar belakang pendirian SDI adalah kompetisi yang meningkat dalam bidang perdagangan batik, terutama terhadap golongan Tionghoa. SDI diubah namanya oleh Samanhudi menjadi SI pada tahun 1912.¹⁹ Hal ini karena Residen Surakarta membekukan SDI setelah organisasi itu berkembang cepat ke daerah-daerah lain di Jawa dan setelah kegiatan-kegiatan pada anggotanya di Surakarta meningkat tanpa dapat diawasi oleh penguasa setempat.²⁰ Anggaran dasar SI disahkan pada 11 September 1912. Anggaran dasarnya yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan jiwa berdagang
2. Memberi bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesulitan
3. Memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat agama Islam.
4. Berjuang demi keadilan dan kebenaran²¹

Samanhudi mengajak seorang dari kalangan priyayi yaitu Tjokroaminoto yang juga seorang berpendidikan sekolah Administratur (OSVIA), di Surabaya.

¹⁹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 252.

²⁰ Nasruddin Anshoriy dan Jeihan Sukmantoro, *Paku Buwana X: Penjaga Tradisi dan Pelopor Modernitas Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Ilmu Giri, 2014), hlm, 78.

²¹ Radjiman, *Sejarah Mataram Kartasura sampai Surakarta Hadiningrat*, (Surakarta: KRIDA, 1984), hlm. 56.

Pada masa awal bergabung dengan SI, Tjokroaminoto adalah seorang priyayi yang kritis dengan pemerintah. Tjokroaminoto segera membuat akte hukum SI baru di Surabaya atas namanya sendiri beserta temannya, sebelas orang saudagar dan pegawai Sunan pada 10 September 1912. Di bawah kendali Tjokroaminoto, SI bertujuan untuk memajukan semangat perdagangan di kalangan bumiputera, membantu para anggota dari kesulitan yang bukan karena kesalahan sendiri, memajukan perkembangan spiritual dan minat di bidang materi di kalangan orang Indonesia sehingga meningkatkan standar hidup mereka, dan menentang salah paham tentang Islam serta memajukan kehidupan beragama di Indonesia.

Petrus Blumberger, seorang Asisten Residen Surakarta (Oktober 1913-Mei 1916), mencatat bahwa jika kita menyelidiki data dalam laporan-laporan resmi tentang asal mula perhimpunan yang didirikan di Surakarta, yang dikumpulkan dari sumber lokal yang sangat beraneka ragam ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa maksud semula dari para pendirinya tidak lain dari pada menciptakan sebuah perhimpunan yang kuat untuk menyaingi monopoli perdagangan perantara yang dipegang oleh orang Tionghoa, terutama dalam hal bahan mentah untuk industri tekstil lokal. Ia yakin bahwa sebab utama sesungguhnya dari SI adalah kesadaran nasionalisme Jawa.²²

Dalam rangka itu sebenarnya yang menjadi pemicu utama adalah persaingan dan permusuhan komersial yang intensif antara pedagang Jawa di Laweyan dengan firma Tionghoa milik Sie Dhian Ho yang berniaga dalam buku-buku keperluan kantor, menerbitkan surat kabar *Taman Pewarta*, dan juga bergerak dalam bidang batik.²³ Sementara itu di Batavia dan Surabaya telah terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh orang Tionghoa yang menumbuhkan

²² Mawardi dan Yuliani, *Dinamika Revolusi Sosial di Surakarta*, (Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara, 1995), hlm. 25.

²³ George D. Larson, *op.cit.*, hlm. 65.

perasaan curiga orang Jawa terhadap orang Tionghoa di Surakarta. Saat itulah mulai terjadi boikot terhadap Sie Dhian Ho.

Perkembangan yang lebih lanjut, berdirinya SI pada hakikatnya merupakan reaksi terhadap dominasi asing, sehingga SI mencari perlindungan kepada Sunan. SI pernah dibekukan sementara pada 10 Agustus 1912, karena terjadi peristiwa kerusuhan di Krapyak Surakarta yang dihubungkan dengan SI.²⁴ Insiden tersebut bermula dari penolakan penduduk Krapyak yang kebetulan juga sebagai anggota SI tidak mematuhi aturan kolonial. Kemudian pembekuan tadi dicabut kembali pada tanggal 26 Agustus dengan syarat agar anggaran dasarnya diubah, SI hanya terbatas pada daerah Surakarta saja.

Hubungan antara SI dengan Paku Buwono X seperti digambarkan Larson baru dimulai pada September 1912 ketika dari pimpinan SI yang terdiri dari 12 orang, 4 di antaranya merupakan pegawai Sunan. Jika tidak ada hubungan baik mustahil para pegawai itu ikut terlibat dalam SI, bahkan Sunan telah mengizinkan taman atau tempat pertemuan Sriwedari miliknya untuk mengadakan Kongres SI kedua tanggal 23 Maret 1913.²⁵ Dalam Kongres ini putra tertua Paku Buwono X yaitu Pangeran Hangabehi diangkat sebagai pelindung dalam struktur organisasi SI. Meskipun tidak lama menjadi pelindung dalam komite sentral, ia sangat berpengaruh terhadap rakyat untuk masuk SI. Ia mundur pada tanggal 24 Mei 1913 atas perintah ayahnya, Sunan yang saat itu mendapat tekanan dari Belanda, termasuk larangan mengadakan lawatan ke daerah.

²⁴ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 117.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

Pangeran Hangabehi memang tidak boleh lama-lama duduk sebagai pelindung SI. Dalam surat tanggal 24 Mei 1913, van Wijk melaporkan ke Batavia bahwa pangeran itu telah melepaskan kedudukannya atas perintah ayahnya. Belanda segera mengambil tindakan yang akhirnya memutus hubungan antara Sunan dengan SI. Atas hasutan residen van Wijk, Hangabehi dipindahkan ke Eropa untuk meredam pengaruhnya di kalangan tinggi keraton. Pengundurannya dari SI ternyata tidak mengurangi pamor Hangabehi di SI. Tanggal 18 Agustus 1913, Hangabehi dianggap oleh orang-orang SI sebagai calon ratu adil, juru penyelamat tanah Jawa. Anggota-anggota SI setempat mengatakan kepada teman-temannya bahwa pada saatnya nanti akan ada raja adil yang memerintah tanah Jawa.

Orang-orang SI secara pribadi menaruh sikap kompetitif yang kuat terhadap orang-orang Tionghoa sukses dalam menjalankan perekonomian di Surakarta. Abad ke-20 telah terjadi revolusi produksi batik, dengan digunakannya bahan-bahan kimia yang sebagian besar diimpor dari Eropa. Orang-orang Tionghoa lebih mampu menangkap peluang tersebut, sehingga orang Jawa memilih membeli bahan-bahan tersebut dari orang Tionghoa karena adanya kemudahan dalam hal pembayaran.²⁶

Persoalan intern pribumi tidak dapat disangkal bahwa terbentuknya SI juga merupakan sentimen rakyat demokratis yang ditujukan pada pihak istana.

²⁶ Orang Tionghoa yang menjadi pemasok barang-barang batik pada umumnya juga menawarkan kredit minding. Pengusaha Jawa sebenarnya sangat meminati sistem ini sehingga di satu sisi orang Tionghoa sebagai kompetitor namun juga sebagai rekan. Lihat George D. Larson, *op. cit.*, hlm. 55.

Kekecewaan terhadap pihak istana bukan karena mereka ditindas, akan tetapi justru karena kediaman istana dengan tradisi sejarahnya, sehingga diremehkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain itu status sosial terendah rakyat asing lebih tinggi dari pada orang Jawa yang paling berpendidikan. Dengan latar belakang kebencian terhadap dominasi asing di Jawa sangat wajar jika SI cenderung mencari dukungan terhadap Sunan dan pembesar lainnya, dalam rangka melawan para pegawai yang lebih banyak dipengaruhi oleh pemerintah Belanda. Surakarta, sebagai pusat berdirinya SI memiliki peran yang besar yaitu dibuktikan bahwa anggota SI dari keseluruhan 80.000 orang, 64.000 orang berasal dari Surakarta.²⁷

Popularitas dan keanggotaan SI semakin membengkak setelah diselenggarakan Kongres SI pertama pada Januari 1913 di Surabaya. Pada masa itu seiring dengan dimulainya Politik Etis Belanda, SI dapat berjalan searah dengan pemerintah meski dalam perjalanannya beberapa tahun kemudian mengalami perbedaan. SI mengalami kejayaan yang kedua kalinya pada tahun 1920, yang berhasil mendapat dukungan dari sekitar 400.000 orang anggota. Diawali dengan pertemuan dan kegiatan-kegiatan anggota lainnya, organisasi ini telah terlibat dalam berbagai pemogokan dan pemboikotan.

Para pedagang di Surakarta di bawah pimpinan Martodharsono melakukan boikot terhadap firma-firma Tionghoa dengan kekerasan. Perkelahian jalanan antara anggota SI dengan orang-orang Tionghoa semakin meningkat. Sebanyak 90 tentara Legiun Mangkunegaran juga ikut memukuli orang-orang Tionghoa, anak-

²⁷ *Ibid.*, hlm. 62 dan 64.

anak Jawa berkelahi dengan anak-anak Tionghoa. Dalam waktu yang hampir sama, aksi-aksi serupa itu juga terjadi di kota-kota lain seperti Surabaya, Bangil, dan Cirebon meskipun dalam skala yang kecil.²⁸ Jumlah anggota SI semakin bertambah, semakin meluas pula aksi-aksi kekerasan. SI yang dianggap semakin mengganggu ketertiban dan mengkhawatirkan pemerintah, maka pada tanggal 10 Agustus 1912 semua kegiatan SI dilarang oleh Residen Surakarta. SI menghentikan kegiatan tetapi tidak dibubarkan. Aksi-aksi SI kemudian diganti dengan ungkapan-ungkapan solidaritas melalui surat kabar.

Memasuki tahun 1915, SI mengalami kemunduran. Terjadi pergantian pimpinan, dan pusatnya pun pindah dari Surakarta. Hubungan antara keraton dan SI semakin menipis.²⁹ Kemunduran SI, terutama di Surakarta secara umum tidak dapat dilepaskan sebagai akibat dari renggangnya hubungan mereka dengan keraton. Di bawah Soerjopranoto yang juga mendapat dukungan dari Tjokroaminoto, SI membangkitkan semangat nasionalisme yang telah hilang. Kebangkitan semangat nasionalisme secara tidak langsung juga memberikan penentangan terhadap kerajaan yang ada waktu itu, di Surakarta terjadi gerakan radikal terhadap dua kerajaan yang ada. Menjelang tahun 1916, SI mulai terpecah karena sebagian tokohnya terpengaruh oleh masuknya ideologi komunisme oleh Snevliet melalui ISDV, dan sebagian tetap mempertahankan Islam yang militan.

²⁸ Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Nasionalisme Indonesia 1905-1942*, (Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008), hlm. 54.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa kedatangan orang-orang Tionghoa ke Indonesia melalui beberapa tahap migrasi. Pertama kali diawali oleh Fa Hien, seorang pendeta Budha yang berlayar menuju Sri Lanka dan terdampar di Pulau Jawa. Kebanyakan orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia adalah kaum laki-laki, kemudian diikuti oleh kaum perempuan. Kehadiran para imigran Tionghoa itu berasal dari Propinsi Fujian dan Kwangtung di pantai selatan dan tenggara. Orang-orang Tionghoa bermigrasi secara individu maupun kelompok kecil kurang dari lima orang.

Masyarakat Tionghoa yang berada di Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu Hokkian, Hakka, Theo Chiu, dan Kanton. Golongan etnis Tionghoa terbagi dalam dua golongan yaitu *totok* dan peranakan. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal dan umumnya sudah berbaur dengan pribumi, mereka berbahasa Indonesia. Sedangkan *totok* adalah pendatang baru dan berbahasa Tionggok. Sebagian besar golongan Tionghoa di Jawa merupakan suatu golongan menengah ke atas, kedudukan orang Tionghoa lebih tinggi dibandingkan dengan kaum pribumi yang rata-rata kehidupan sosial ekonominya rendah.

Kedatangan orang-orang Tionghoa di Surakarta berawal dari konflik internal Keraton Surakarta. Orang-orang Tionghoa merasa kecewa kepada Paku Buwono karena sikapnya yang berbalik mendukung VOC, kemudian melakukan pemberontakan terhadap Keraton Kartasura yang dipimpin oleh Raden Mas

Garendi. Peristiwa itu dikenal dengan nama *geger pecinan* 1742, Paku Buwono memindahkan kerajaan dari Kartasura ke Desa Solo dan diberi nama Surakarta Hadiningrat.

Setelah *geger pecinan* berakhir, orang-orang Tionghoa diijinkan tinggal di Surakarta yaitu di Kampung Balong (sebelah utara Sungai Pepe) sekitar Pasar Gede. Seiring dengan perkembangan politik yang diterapkan pemerintah kolonial, maka orang-orang Tionghoa mendapat beberapa peraturan yang membatasi gerak dan aktivitasnya. Berbagai aturan yang berkaitan dengan politik segregasi dari Belanda seperti *wijkenstelsel* dan *passenstelsel*. Akibat aturan itu, orang-orang Tionghoa terkonsentrasi di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah pecinan. Pemerintah Hindia Belanda juga menunjuk para pejabat Tionghoa yang diangkat dari kalangan mereka sendiri, mereka diberi pangkat *mayor*, *kapitein*, *luitenant*, dan *wijk meester*. Para pejabat itu mempunyai tugas sebagai perantara yang menghubungkan orang-orang Tionghoa dengan pemerintah Belanda dalam berbagai keperluan.

Kawasan pecinan menjadi daerah yang sangat padat dan ramai, karena penambahan penduduk Tionghoa dan juga ramainya perdagangan di daerah pecinan. Perkembangan kota dan ekonomi turut mempengaruhi penyebaran pemukiman Tionghoa. Pemukiman Tionghoa memiliki karakter yang khas yaitu bentuk arsitektur rumah, toko, dan pola perkampungan yang memiliki gang-gang yang sempit. Rumah-rumah di pecinan umumnya juga dipakai sebagai ruko dengan model bertingkat. Pemukiman Tionghoa sendiri lebih berorientasi

ekonomis, karena dari awal hingga penyebarannya menempati daerah lahan yang terdapat klenteng, pasar, akses/orientasi, dan jalan.

Dalam konteks sosial, kehidupan orang Tionghoa di Surakarta pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan orang Tionghoa yang tinggal di daerah lainnya di Indonesia. Mereka menganut sistem kekerabatan bilineal, membentuk perhimpunan atau organisasi khusus Tionghoa yang berdasarkan suku, perhimpunan dagang, politik sosial, kematian, dan organisasi untuk memperjuangkan kepentingan mereka di Surakarta. Dalam bidang pendidikan, pada mulanya anak Tionghoa tertinggal jika dibandingkan dengan anak pribumi. Mereka mulai mendapatkan pendidikan setelah THHK (Tiong Hoa Hwe Koan) mendirikan sekolah pada tahun 1901 dan pemerintah Hindia Belanda mendirikan HCS (Hollands Chineesche School) pada tahun 1908.

Dalam konteks ekonomi, orang-orang Tionghoa di Surakarta sejak awal sudah menjalin hubungan baik dengan pedagang Jawa, namun hubungan tersebut mengalami ketegangan yang berawal dari industri batik. Para pengusaha dan pedagang Jawa sangat tergantung pada bahan-bahan batik yang dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Awal abad ke-20, orang-orang Tionghoa mendirikan perkumpulan dagang *Kong Sing*. Samanhudi, seorang pedagang batik terkemuka di Laweyan bergabung dengan *Kong Sing*. Revolusi Tiongkok 1911 membuat orang-orang Tionghoa mulai bersikap angkuh terhadap orang Jawa dan memperlakukan orang Jawa secara kurang layak. Samanhudi dan pengikutnya mengundurkan diri dari *Kong Sing* dan mendirikan *Rekso Roemekso* yang menjadi cikal bakal berdirinya SDI (Sarekat Dagang Islam) yang kemudian diganti dengan

nama SI (Sarekat Islam). *Kong Sing* semakin mundur dan ketegangan antara orang Tionghoa dan Jawa sering terjadi perkelahian jalanan. Oleh karena itu semua kegiatan SI dilarang oleh Residen Surakarta. SI menghentikan kegiatan tetapi tidak dibubarkan. Memasuki tahun 1915, SI mengalami kemunduran yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu renggangnya hubungan antara keraton dan SI.



DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Regeering Almanak, 1908

Staatblad van Nederlandsh Indie, 1835, No. 37

Staatblad van Nederlandsch Indie, 1891, No. 214

Volkstelling, 1930

Buku

Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia*, Yogyakarta: DIVA Press, 2014.

Alex Sudewa, *Dari Kartasura ke Surakarta*, Yogyakarta: Lembaga Studi Asia, 1995.

Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)*, Yogyakarta: Ombak, 2010.

A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan di Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Ayu Windy Kinasih, *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*, Yogyakarta: Fisipol UGM, 2005.

Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Trans Media, 2008.

Benny Juwono, "Etnis China di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi", *Lembaran Sejarah* Vol. 2, No. 1, Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 1999.

Brown, Colin, *A Short History of Indonesia*, Singapore: South Wind Productions, 2003.

Cabaton, Antoine, *Jawa, Sumatra, dan Kepulauan Lain di Hindia Belanda*, Yogyakarta: Ombak, 2015.

Cholisin, dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial UNY, 2006.

- Coppel, Charles, A., *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Daradjadi, *Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC*, Jakarta: Kompas, 2013.
- Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*, Yogyakarta: Taman Siswa, 1989.
- Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Djakariah, *Sejarah Indonesia II*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Dwi Ratna Nurhajarini, dkk., *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*, Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.
- E, Hall, D.G., *Sejarah Asia Tenggara*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1988.
- Frieda Amran, *Batavia: Kisah Kapten Woodes Rogers dan Dr. Strechler*, Jakarta: Kompas, 2012.
- Gondomono, *Manusia dan Kebudayaan Han*, Jakarta: Kompas, 2013.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 2000.
- Handinoto, *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa pada Masa Kolonial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.
- I. B. Mantra, *Migrasi Antar Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM, 1989.
- Iwan Santosa, *Legiun Mangkunegaran (1808-1942)*, Jakarta: Kompas, 2011.
- Kastoyo Ramelan, *Sinuhun Paku Buwono X: Pejuang dari Surakarta Hadiningrat*, Bandung: Jaihan Institute, 2004.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

_____, *Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta, 1900-1915*, Yogyakarta: Ombak, 2004.

_____, *Penjelasan Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Larson, George, D., *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

Lay, Sie Tjoen, dkk., *Di Sekitar Sedjarah Indonesia-Tiongkok*, Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru, t.t.

Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986.

_____, *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995*, Singapore: Singapore University Press, 1997.

_____, *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002.

_____, *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.

Lombard, Denys, *Nusa Jawa: Silang Budaya Bagian 2 Jaringan Asia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Mely G. Tan, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Gramedia, 1979.

M. Hari Mulyadi (et.al), *Runtuhnya Kekuasaan “Keraton Alit”: Studi Radikalisasi Sosial “Wong Sala” dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta*, Surakarta: LPTP, 1999.

Moelyono Sastronaryatmo, *Babad Pacina I*, Jakarta: Depdikbud Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1981.

Moerthiko, *Riwayat Klenteng, Vihara, Lithang, Tempat Ibadah Tri Dharma Se-Jawa*, Semarang: Gramedia, 1980.

Nasruddin Anshoriy dan Jeihan Sukmantoro, *Paku Buwana X: Penjaga Tradisi dan Pelopor Modernitas Budaya Jawa*, Yogyakarta: Ilmu Giri, 2014.

Nuraini Soyomukti, *Soekarno dan Cina*, Yogyakarta: Garasi, 2012.

Onghokham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.

Pratiwo, *Arsitektur Tradisional Tionghoa dan Perkembangan Kota*, Yogyakarta: Ombak, 2010.

Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Purcell, Victor, *The Chinese in South East Asia*, London: Oxford University Press, 1981.

Purwadi, *Babad Giyanti: Sejarah Pembagian Kerajaan Jawa*, Yogyakarta: Media Abadi, 2008.

Puspa Vasanty, "Kebudayaan Orang Cina di Indonesia", dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1971.

Radjiman, *Sejarah Mataram Kartasura sampai Surakarta Hadiningrat*, Surakarta: KRIDA, 1984.

Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

R.M. Ng. Tiknopranoto dan R. Mardisuwignyo, *Sejarah Kutha Sala: Kraton Sala, Bengawan Sala, Gunung Lawu*, Sala: Toko Buku Pelajar, 1980.

R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2005.

R.M. Sajid, *Babad Sala*, Surakarta: Rekso Pustoko, 2001.

Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta (1895-1998)*, Yogyakarta: Ombak, 2007.

_____, *Jawa Sejati: Otobiografi Go Tik Swan Hardjonagoro*, Yogyakarta: Ombak, 2008.

Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Nasionalisme Indonesia 1905-1942*, Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008.

Sariyatun, *Usaha Batik Cina di Vorstenlanden Surakarta Awal Abad XX*, Surakarta: UNS Press, 2005.

Sartono Kartodirjo, *Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2*, Jakarta: Gramedia, 1990.

_____, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Shiraishi, Takashi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

S. Margana, *Pujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kolonial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, t.t.

Soedarmono, *Studi Historis Kerusuhan di Surakarta*, Surakarta: PMS, 2000.

Suhartono, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Tim Kaprodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

W. D. Soekisman, *Masalah Cina di Indonesia*, Jakarta: Bangun Indah, 1975.

Windi Astuti, *Peran Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Bangun Indah, 2002.

Yusiu Liem, *Prasangka terhadap Orang-Orang Cina*, Jakarta: Jambatan, 2000.

Z. M. Hidajat, *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1993.

Skripsi

Bakti Syamsudin, "Eksistensi Etnis Tionghoa di Surakarta pada Masa Orde Lama 1945-1965", *Skripsi*, Yogyakarta: FIS UNY, 2014.

Cahyo Adi Utomo, "Peran Etnis Cina dalam Perdagangan di Surakarta pada Tahun 1959-1998", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

Eka Deasy Widyaningsih, "Masyarakat China Balong Sudiroprajan (Studi Interaksi Sosial Masyarakat China-Jawa di Surakarta pada Pertengahan Akhir Abad XX)", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2007.

Internet

<https://phesolo.wordpress.com/2012/02/25/pemukiman-tionghoa-di-surakarta-masa-kolonial/> (Diakses pada tanggal 28 April 2017, pukul 17:25).

<https://www.youtube.com/watch?v=jMZQBfXyRTg> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2017, pukul 07.00).

<https://www.youtube.com/watch?v=p5kQijcZWJw> (Diakses pada tanggal 27 Mei, pukul 08.00).

<https://www.youtube.com/watch?v=05U57F-ImKg> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2017, pukul 08.30).

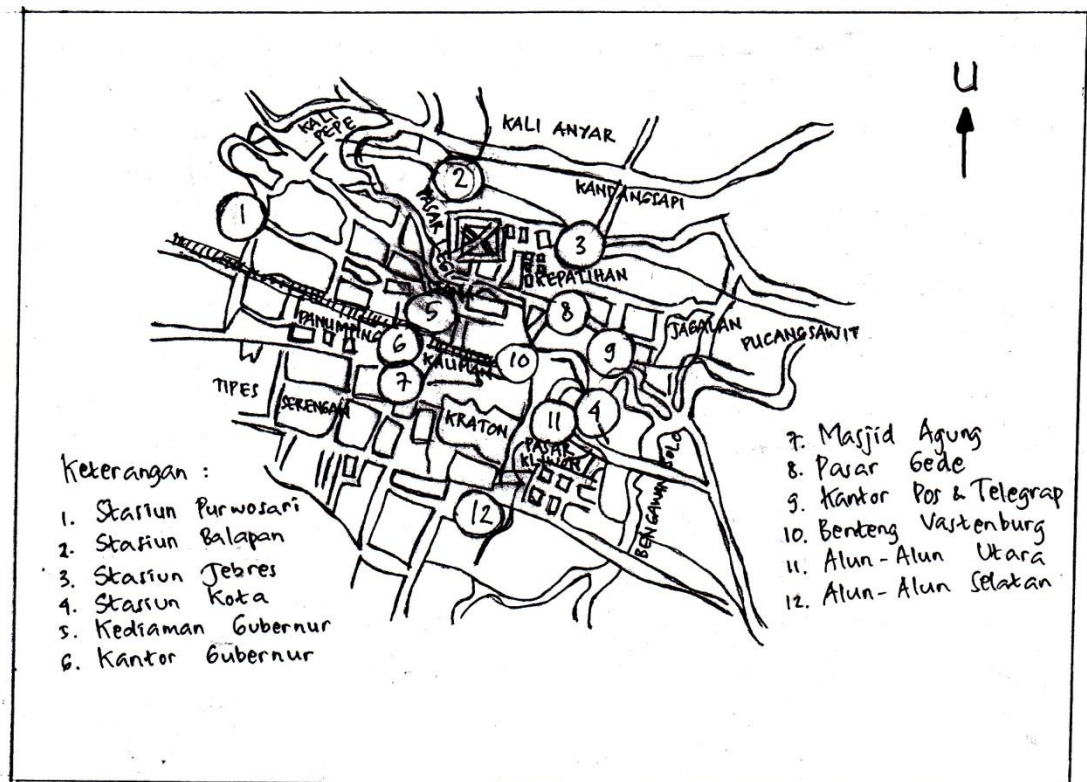




LAMPIRAN

Lampiran 1

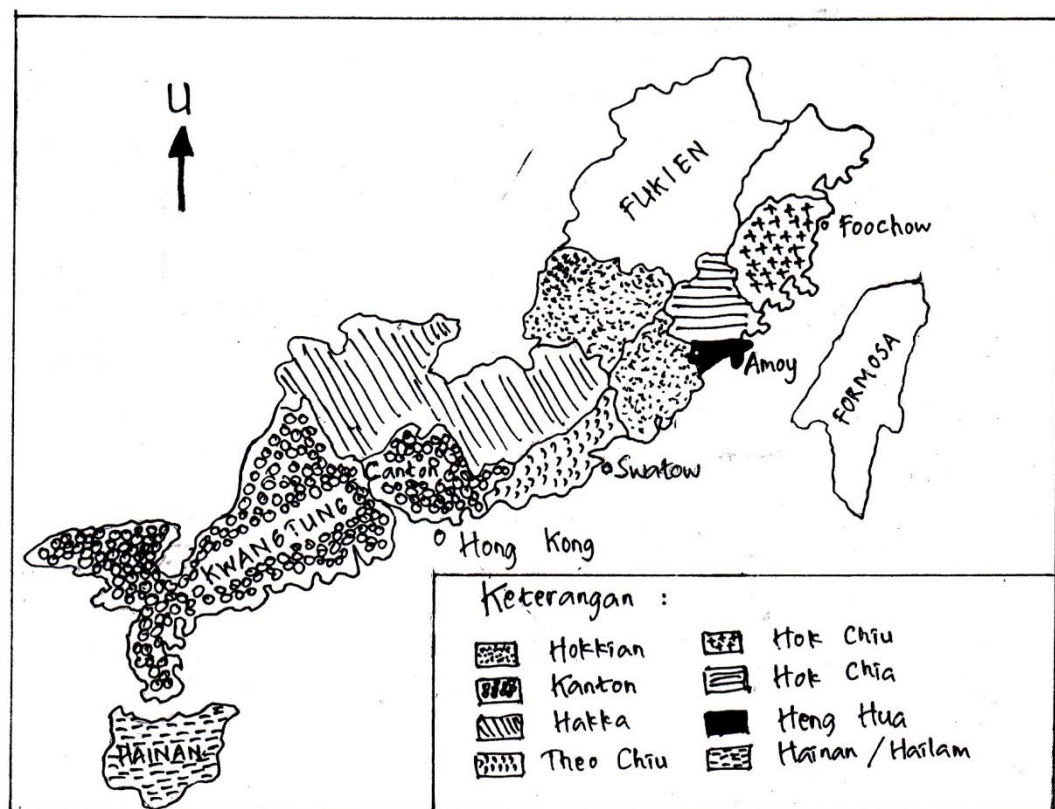
Peta Kota Surakarta Tahun 1940



Sumber: George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990, hlm. xvi.

Lampiran 2

Peta Propinsi Fukien dan Kwangtung, Asal Suku Bangsa Orang-Orang Tionghoa
di Surakarta



Sumber: Handinoto, *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa pada Masa Kolonial*,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 355.

Lampiran 3

Permukiman Tionghoa di Surakarta Tahun 1901



Sumber: <http://www.kitlv.nl> (Diakses pada tanggal 24 Juli 2017, pukul 18.30)

Lampiran 4

Pasar Gede Surakarta Pusat Aktivitas Ekonomi Masyarakat Tionghoa
di Surakarta tahun 1930



Sumber: <http://www.kitlv.nl> (Diakses pada tanggal 24 Juli 2017, pukul 18.30)

Lampiran 5

Klenteng Tien Kok Sie Pasar Gedhe - Solo 1906



Sumber: <http://www.kitlv.nl> (Diakses pada tanggal 24 Juli 2017, pukul 19.00)

Lampiran 6

Rumah Seorang Major Tionghoa - Solo 1906



Sumber: <http://www.kitlv.nl> (Diakses pada tanggal 24 Juli 2017, pukul 19.30)

Lampiran 7

Salinan *Regeering Almanak* 1908

Dienst der Chineesche Zaken

De werkkring van dezen dienst omvat in de ruimsten zin alle aangelegenheden, welke de Chineezzen in Nederlandsch-Indie betreffen ef waarbij deze betrokken zijn, het personeel is vereenigd in een, “Kantoor voor Chineesche zaken”, te Batavia en bestaat uit een Adviseur, Ambtenaren voor Chineesche zaken volgens een telken jare bij de begrooting te regelen strekte en het noodige kantoor en verder ondergeschikt personeel.

De Adviseur heeft de leiding van den dienst, voor zooveel bestuurszaken betreft onder toezicht van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur Hij geeft over alle op den dienst betrekking hebbende aangelegenheden raad aan de Regeering of de betrokken gezaghebbenden en lichamen en kan aan.

Haar of hen voorstellen of verzoeken indienen en rechtstreeks met hen briefwisseling voeren.

Waar dit verlangd wordt, verleent het kantoor voor Chineesche zaken ook zooveel mogelijk aan rechterlijke en administratieve gezaghebbenden en colleges hulp voor het maken van vertalingen.

Een reglement voor den dienst is vastgesteld bij St. 1916 no. 377, gewijzigd bij St. 1917 no. 682 en St. 1919 no. 643. Het tarief voor werkzaamheden, door het kantoor ten behoeve van particulieren verricht, is opgenomen in St. 1916 no. 378.

Lampiran 8

Salinan Staatblad van Nederlandsch Indie, 1835, No. 37

Nº. 37 Resolutie van den Gouverneur Generaal ad interim rade, van 12 Augustus

1835 n°. 1, omtrent de vereeniging der op Java aanwezige vreemde Oosterlingen in afzonderlijke wijken.

Is goedgevonden en verstaan :

Ten tweede. Aan de plaatselijke autoriteiten op Java te kennen te geven, dat hier en daar eene neiging is bespeurd, om de op Java aanwezige vreemde Oosterlingen, zooals Maleiers, Boegineezen, Chineezzen enz, te amalgameeren onder de Javaansche bevolking; dat de Regeering dit ondoelmatig acht en integendeel verlangt, dat de aloude gewoonte, om dusdanige vreemdelingen in afzonderlijke wijken of buurten onder een hoofd van hun eigen landaard te doen wonen, in stand worde gehouden, en dat zij mitsdien, bij voorkomende gelegenheden, in dezen zin zullen hebben te handelen, zonder eenige afwijking.

Aant. Stbl. 1846 n°. 24 beveelt de plaatselijke autoriteiten op Java om Chineezzen en andere vreemde Oosterlingen niet algemeen te beletten zich in de binnenlanden van Java te vestigen.

Bij Stbl. 1866 n°. 57 zijn bepalingen vastgesteld op het vereenigen in afzonderlijke wijken van vreemde Oosterlingen of van alle in Nederlandsch Indie gevestigde personen van Oostersche af komst, oorspronkelijk aan Nederlandsch Indie vreemd. Deze bepalingen zijn aangevuld bij Stbl. 1866 n°. 101, 1871 n°. 145

en 146; 1872 n°. 9; 1873 n°. 72, 83 en 141; 1874 n°. 112, 133, 179 en 180; 1875
n°. 69.



Lampiran 9

Salinan *Staatblad van Nederlandsch Indie*, 1891, No. 214

STAATBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE

No. 214. VREEMDE OOSTERLINGEN. RECHT VAN VERBLIJF.

SOERAKARTA. DJOKJAKARTA. *Nadere bepalingen ten aanzien van het verblijf van Chineezzen in de residentien Soerakarta en Djokjakarta.*

IN NAAM DER KONINGIN

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE

Den Raad van *Nederlandsch-Indie* gehoord;

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saluut!

doet te weten :

Dat Hij, het wenschelijk achtende nadere bepalingen in het leven te roepen ten aanzien van het verblijf van Chineezzen in de residentien *Soerakarta* en *Djokjakarta* ;

Lettende op de artikelen 20, 29, 51, 53 en 105 van het Reglement op het beleid der Regeering van *Nederlandsch-Indie* ;

Heeft goedgevonden en verstaan :

Krachtens Koninklijke machtiging te bepalen als volgt :

Art. 1. De Hoofden van Gewestelijk en Plaatselijk Bestuur mogen geene reispassen verleen en aan Chineezzen voor de residentien *Soerakarta* en *Djokjakarta*, zonder vooraf daarop het gevoelen van de Residentien van gemelde

twee residentien te hebben ingewonnen, en ingeval deze daartegen zwaarigheid maken, mogen zoodanige reispassen niet worden afgegeven dan krachtens uitdrukkelijke machtiging van den Gouverneur-Generaal.

Chineezen, ingezetenen van *Nederlandsch-Indie*, die in een der residentien *Soerakarta* en *Djokjakarta* worden aangetroffen zonder in het bezit te wezen van een geldigen reispas en zonder in dat gewest gevestigd te zijn, worden gestraft met eene geldboete van zes- en twintig tot zestig gulden, of met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van dertien tot twintig dagen. Daarna worden zij uit het gewest verwijderd.

Art. 2. De ordonnatie van 12 Maart 1872 (Staatblad N^o. 40), gewijzigd bij die van 15 September 1890 (Staatblad N^o. 187), wordt aangevuld als volgt :

- a. Tuuschen de eerste en de tweede alinea van artikel 2 wordt eene nieuwe alinea ingelascht, luidende :

“Plaatsen in de residentien *Soerakarta* en *Djokjakarta* mogen niet in de toelatingskaart worden vermeld”.

- b. Aan artikel 6 wordt eene tweede alinea toegevoegd, luidende :

“De residentien *Soerakarta* en *Djokjakarta* zijn hiervan uitgezonderd, tenzij in de vergunning uitdrukkelijk verklaard wordt dat zij ook voor die residentien of eene daarvan geldt”.

En opdat niemand hiervanonwetendheid voorwende, zal deze in het Staatblad van Nederlandsch-Indie geplaatst en, voor zooveel noodig, in de *Inlandsche* en *Chineesche* talen aangeplakt worden.

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage Colleges en Ambtenaren, Officieren en Justicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te *Buitenzorg*, den 2^{den} October 1891.

C. PIJNACKER HORDIJK

De Algemeene Secretaris,

SWEERTS.

Uitgegeven den zevenden October 1891.

De Algemeene Secretaris,

SWEERTS.

